



JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA
Transformasi (ketegangan) Sosial
di Pusat-Pusat Pertumbuhan Pantura



JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA
Transformasi (ketegangan) Sosial
di Pusat-Pusat Pertumbuhan Pantura

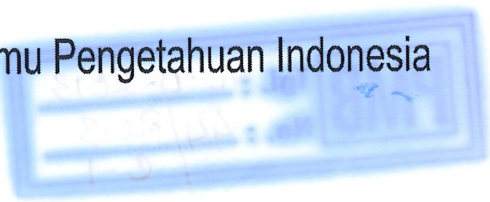


Oleh :
Riwanto Tirtosudarmo
Anas Saidi
M. Bashori Imron
Ana Windarsih
Khoirul Muqtafa
Syarfina Mahya Nadila

Editor :
Ana Windarsih



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



© 2012 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jakarta, Semarang, Surabaya: Transformasi (Ketegangan) Sosial
di Pusat-pusat Pertumbuhan Pantura/Riwanto Tirtosudarmo,
Anas Saidi, M. Bashori Imron, Ana Windarsih, M. Khoirul
Muqtafa, Syarfina Mahya Nadila – Jakarta, 2011.

vi hlm + 155 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-221-181-5

1. Transformasi Sosial

303. 48

Penerbit:

PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

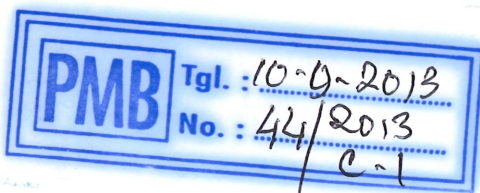
Jakarta 14250

Telp: (021) 4508142



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232



KATA PENGANTAR

Penelitian ini merupakan penelitian jangka panjang yang telah dimulai pada tahun 2010 dan diharapkan akan berakhir pada tahun 2014 yang mengambil tema “Transformasi Sosial di Perkotaan Pantai Utara Jawa (Pantura). Seperti telah dilaporkan dalam buku-buku yang telah diterbitkan sebelumnya, penelitian jangka panjang ini bertolak dari adanya anggapan (asumsi) bahwa kota-kota di sepanjang Pantai utara Jawa telah berkembang menjadi sebuah *urban corridors* atau sebuah kawasan yang terintegrasi secara ekonomi dan sosial, *an integrated space*.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya penelitian dilakukan di kota-kota menengah, antara lain Serang, Cirebon, Pekalongan, Demak, Jepara, Kudus, Gresik dan Situbondo; pada tahun 2012 penelitian sengaja difokuskan pada kota-kota utama yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu Jakarta, Semarang dan Surabaya. Sesuai dengan *core competence* yang dimiliki oleh peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) aspek utama yang diteliti adalah bagaimana proses transformasi sosial berlangsung di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu.

Dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dalam penelitian tahun 2012 ini dipilih beberapa kasus yang diharapkan dapat menggambarkan bagaimana transformasi sosial itu berlangsung. Lima kasus yang kami pilih adalah: (1) proses tarik-menarik yang terjadi antara Negara dan agama, yang direpresentasikan oleh para kyai, dalam konteks pembangunan jembatan Suramadu di Surabaya, (2) proses marjinalisasi warga-kota di kompleks perbelanjaan Tunjungan Plaza, di pusat kota Surabaya, (3) geliat sebuah pusat pendidikan keagamaan (Pesantren Futuhiyah) di pinggir kota Semarang, (4) dinamika hubungan antara kelompok-kelompok keagamaan di Kota Semarang, dan yang terakhir (5) persoalan sengketa tanah di Tanah Merah, di Jakarta. Berbagai temuan lapangan yang digambarkan dalam buku ini,

meskipun berasal dari kasus-kasus yang bersifat spesifik, tetap mencerminkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh sebuah masyarakat perkotaan yang sedang mengalami perubahan secara cepat.

Kelancaran dalam melakukan penelitian ini tidak mungkin dicapai tanpa adanya bantuan dan kerjasama yang sangat baik dari berbagai instansi pemerintah, lembaga masyarakat, universitas dan para narasumber yang berada di daerah penelitian. Atas bantuan dan kerjasama yang baik itu, kami selaku Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB) dan segenap anggota tim penelitian ini mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya. Kami berharap hasil penelitian yang dilaporkan dalam buku ini bias memberikan sumbangan pengetahuan bagi berbagai pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, Desember 2012

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan LIPI.

Dr. Endang Turmudi, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PERUBAHAN SOSIAL DI PANTURA: SEBUAH PENGANTAR1

Oleh *Riwanto Tirtosudarmo*

- Konteks Sosial Pertumbuhan Wilayah Perkotaan Pantura3
- Struktur dan Sistematika Buku6

BAB II KONFLIK TANAH MERAH, JAKARTA UTARA: KESENJANGAN KOMUNIKASI-POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT?9

Oleh *M. Bashori Imron*

- Pendahuluan9
- Konflik Pertanahan di Tanah Merah Jakarta Utara12
- Kesenjangan Komunikasi-Politik?18
- Penutup24
- Daftar Pustaka25

BAB III EKOLOGI RUANG DAN RELIGI KECAMATAN MRANGGEN, DI PINGGIRAN KOTA SEMARANG.....27

Oleh *Ana Windarsih*

- Pendahuluan27
- Profil Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen30
- Ekologi Ruang, Posisi, dan Peran Mranggen33
- Tarekat sebagai Jaringan yang Menyatukan46
- Refleksi Teoritis50
- Penutup53
- Daftar Pustaka55

BAB IV
TENTANG TOLERANSI DAN SOLIDARITAS
SOSIAL: DINAMIKA KEBERAGAMAAN
DI KOTA SEMARANG57

Oleh Muhammad Khoirul Muqtafa

- Pendahuluan57
- Keberagama(a)n, Toleransi, dan Solidaritas Kewargaan59
- Kondisi Sosial Demografis Kota Semarang63
- Kondisi Keberagamaan di Jawa Tengah65
- Kondisi Keberagamaan di Semarang68
- Sejarah dan Pilar Toleransi di Semarang71
- Narasi Toleransi: Pasif dan Aktif75
- Perawatan Toleransi dan Solidaritas Ke-warga-an78
- Pergulatan: Negara, Pasar, dan Masyarakat80
- Penutup: Tantangan Radikalisme dari Kampus Umum85
- Daftar Pustaka86

BAB V
MARGINALISASI DI TUNJUNGAN PLAZA,
PUSAT KOTA SURABAYA91

Oleh Syarfina Mahya Nadila

- Pendahuluan91
- Rencana Kawasan Tunjungan93
- Kondisi Demografis Kecamatan Tegalsari101
- *Mall* di Surabaya107

- Marjinalisasi Kawasan Sekitar Tunjungan Plaza112
- Penutup116
- Daftar Pustaka118

BAB VI
TRUNOJOYO: GERBANG MADURA
YANG SEDANG BERUBAH?121

Oleh Anas Saidi

- Sekilas tentang Trunojoyo125
- Dinamika Politik Trunojoyo131
- Kepemimpinan Kharisma dan Harga Kulturalnya138
- Kyai, Blater, dan Birokrat141
- Pilkada: Perpanjangan Politik Dinasti144
- Penutup146
- Daftar Pustaka149

BAB VII
KESIMPULAN:
KETEGANGAN SOSIAL DI TENGAH
PERTUMBUHAN EKONOMI151

Oleh Riwanto Tirtosudarmo

BAB I

PERUBAHAN SOSIAL DI PANTURA: SEBUAH PENGANTAR

Oleh Riwanto Tirtosudarmo

Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan (*archipelagic state*) dengan motto *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun demikian, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa realisasi cita-cita sebagai Negara Kepulauan itu tampaknya justru semakin menyimpang dari harapan yang ada. Pembangunan nasional masih berpusat di Jawa dengan penekanan yang besar pada infrastruktur transportasi darat dari pada laut. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang diharapkan bisa mengembangkan secara merata pembangunan ekonomi dan sosial di semua pulau di negeri, ini tampaknya harus menghadapi realita bahwa kebijakan Negara menyerah pada kekuatan pasar yang mementingkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi.

Jika dilacak kebelakang pemusatan ekonomi di Jawa tampaknya dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Herman Willem Daendels yang relatif singkat, yaitu 1808-1811. Dalam waktu yang sangat singkat inilah karena alasan pertahanan di satu sisi dan alasan perdagangan di sisi lain mulai dibangun jalan raya sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Jalan itu, yang kemudian dikenal sebagai jalan raya Daendels, berhasil menghubungkan Anyer di barat sampai dengan Panarukan di sebelah timur Pulau Jawa. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara kota-kota pelabuhan di Pantai Utara Jawa, dengan pusat-pusatnya di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sejak saat inilah Pulau Jawa menjadi lokasi utama berbagai kegiatan perekonomian, perdagangan, perkebunan, pusat administrasi dan birokrasi Negara,

pendidikan dan pusat pergerakan politik. Memusatnya infrastruktur ekonomi, sosial dan politik di Jawa adalah kondisi struktural yang mau tidak mau mendorong proses sentralisasi kekuasaan dan pembangunan di Pulau Jawa.

Apabila melihat pembangunan ekonomi dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan, periode Orde Baru barangkali merupakan periode yang paling penting. Dalam periode Orde Baru yang dimulai pada awal tahun 1970an kita saksikan berbagai perubahan yang bersifat fundamental sebagai akibat dari strategi pembangunan yang menekankan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun dalam tulisan ini perhatian akan difokuskan pada kurun waktu sekitar lima tahun terakhir, namun apa yang berlangsung sebelumnya, terutama sejak dimulainya rejim pemerintahan Orde Baru pada awal tahun 1970an, akan dikemukakan sebagai bagian yang penting. Dalam konteks ini, strategi pembangunan Orde-Baru yang sangat sentralistis sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari proses sentralisasi infrastruktur yang telah dirintis sebelumnya, sejak masa pemerintahan Gubernur Jendral Daendels. Jenderal Soeharto barangkali bisa dikatakan sebagai penerus saja dari apa yang telah sebelumnya diwariskan oleh Gubernur Jendral Daendels.

Dalam tulisan ini, pengertian transformasi sosial adalah perubahan-perubahan, baik dalam sistim maupun struktur sosial yang berlangsung dalam sebuah masyarakat yang terjadi dalam tempo yang relatif cepat. Dalam kasus kota Jakarta, Semarang dan Surabaya, sebagaimana telah dikemukakan, perubahan yang cepat dibandingkan kota-kota lainnya di kawasan Pantura, terjadi terutama karena ketiga kota ini merupakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tidak saja bagi Pantura, namun juga bagi keseluruhan Jawa dan Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Jakarta, Semarang dan Surabaya, yang terhubungkan satu dengan lainnya, melalui jalur transportasi darat (Jalan Raya Daendels), maupun melalui jalur laut dan udara, merupakan sebuah poros (hub) yang menjadi pusat dari berputarnya dinamika ekonomi, sosial maupun politik dari Negara Republik Indonesia.

Konteks Sosial Pertumbuhan Wilayah Perkotaan Pantura

Howard Dick (2010) seorang ahli ekonomi yang mendalami isu pelayaran di Indonesia, berpendapat bahwa perkembangan Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*archipelagic state*) ternyata tidak seperti yang dibayangkan semula. Perubahan aspek administrasi pemerintahan setelah bangkrutnya VOC dan diangkatnya Daendels sebagai Gubernur Jendral, membawa konsekuensi yang besar bagi perkembangan pemerintahan maupun geografi-ekonomi di Nusantara. Meskipun hanya memerintah dalam waktu yang singkat (1808-1811) Daendels telah membawa perubahan yang drastis dalam sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Sejak Daendels sistem pemerintahan diubah mengikuti sistem yang dipakai di Perancis saat Napoleon menguasai Eropa, termasuk Belanda. Sejak itulah apa yang dikenal sebagai “Napoleonic reform” masuk ke Nusantara, sebagaimana dikemukakan oleh Howard Dick (2010)

...the Napoleonic reforms, although much modified by Thomas Raffles and his Dutch successors, were consequential. Best known, perhaps, in Indonesian historiography is the Great Post Road, a Napoleonic feat of public works stretching from Anyer on Sunda Strait via Batavia and the Priangan to Semarang, Surabaya and, in an attenuated final stage, to Banyuwangi. All this was done, with enormous sacrifice by Javanese laborers, within about two years, allowing rapid threat of interruption by British blockade. The Post Road was gradually elaborated into an impressive network that prefigured the railways of the late nineteenth century.

Perkembangan ekonomi Indonesia setelah masa Daendels semakin ditentukan arahnya oleh naik turunnya peran Negara di satu sisi dan peran pemilik modal di sisi lain. Prinsip-prinsip kapitalisme sejak saat itu sesungguhnya semakin berperan, meskipun besar kecilnya sangat tergantung dari konteks politik dan karakter rejim politik yang berkuasa. Richard Robison (1986) menelusuri dengan teliti hubungan antara Negara dan modal (*capital*) sejak masa kolonial

hingga masa pemerintahan Soeharto Orde Baru. Menurut Richard Robison (1986) setelah kemerdekaan peranan Negara justru sangat penting bagi perkembangan kapitalisme. Pada saat Soeharto dan Orde Baru mulai berkuasa Negara lah yang justru menjadi pemeran utama bagi tumbuh dan bangkitnya kekuatan modal dan kapitalisme. Tentang hal ini, berikut adalah paparan Richard Robison (1986: 105):

The state has played a crucial role in shaping the development of capitalism in post-colonial Indonesia. Its influence has been decisive, not only in providing the political conditions for capitalist development but in providing the fiscal framework and even much of the investment capital.

Sejak awal tahun 1970an ketika strategi pembangunan jangka panjang pemerintah Orde Baru mulai dilaksanakan kita sudah menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari bekerjanya prinsip-prinsip kapitalisme di Indonesia. Pembangunan infrastuktur untuk menopang industri manufacturing yang berpusat di sekitar kota-kota besar di Pantai Utara Jawa mulai dari Cilegon, Tangerang, Bekasi, Bogor, Kerawang, Semarang, Gresik dan Surabaya; telah merubah kawasan pertanian menjadi kawasan industri. Pada sisi lain kita juga menyaksikan dampak dari apa yang dikenal sebagai “revolusi hijau” yang menekankan penggunaan sistim dan teknologi pertanian baru yang sangat didukung oleh industri pupuk dan pestisida. Pembangunan industri manufaktur yang berlangsung di kawasan perkotaan dan industri pertanian yang berlangsung di kawasan pedesaan telah merubah secara mendasar pola kehidupan penduduk Jawa dari masyarakat rural ke masyarakat urban.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota yang telah dimulai sejak awal tahun 1970an masih kita saksikan terus berlangsung hingga hari ini. Persoalan yang muncul di perkotaan hampir selalu berkaitan dengan semakin besarnya jumlah penduduk yang mengadu nasibnya di kota. Jakarta, Semarang dan Surabaya menjadi besar terutama karena meningkatnya jumlah penduduknya. Besarnya jumlah penduduk di Jakarta, Semarang dan Surabaya menyebabkan tingkat kepadatan menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Jakarta tercatat sebesar 9, 58 juta jiwa, dengan luas wilayah DKI yang hanya 662,33 km², menjadikan kepadatan penduduk rata-rata DKI mencapai 14,464 jiwa per km². Jakarta mengalami penambahan penduduk yang sangat cepat, pada awal Orde Baru (1971) jumlah penduduk Jakarta hanya 5,5 juta jiwa, separuh dari jumlah penduduk sekarang. Artinya dalam waktu 40 tahun penduduknya hampir meningkat 2 kali lipat. Angka kepadatan penduduk DKI menempati posisi ke-9 dari kota-kota di dunia. Jumlah penduduk di Jabodetabek sebagai wilayah perluasan kota Jakarta tercatat sebesar 28 juta jiwa lebih. Semarang (Kota) berpenduduk 1,5 juta jiwa, dengan luas hanya 305,17 km², kepadatan penduduk Kota Semarang saat ini sekitar 5 ribu per km². Kota Semarang menempati urutan ke-9 dalam jumlah penduduk di antara kota-kota di Indonesia. Seperti halnya Jakarta, Semarang juga menjadi pusat pertumbuhan kota-kota dan kabupaten yang ada di sekitarnya. Saat ini dikenal istilah “Kedungsapur” yang merupakan kepanjangan dari Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga dan Purwodadi, di mana secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 4,7 juta jiwa. Surabaya merupakan kota terbesar ke-2 setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 2,7 juta jiwa, dan kepadatan penduduk mencapai 8 ribu jiwa per km². Surabaya juga merupakan pusat pertumbuhan kota-kota dan kabupaten yang mengelilinginya yang dikenal sebagai Gerbangkertosusilo, atau Gresik, Bangkalan, Kertosono, dan Sidoarjo. Total penduduk Gerbangkertosusilo diperkirakan mencapai 5 juta jiwa.

Jakarta, Semarang dan Surabaya, merupakan kota-kota terbesar di Pantura yang memiliki pelabuhan besar yang menjadi penghubung kota-kota di Nusantara, maupun dunia. Perkembangan ketiga kota ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi awalnya sebagai kota pelabuhan bagi pemerintah kolonial Belanda yang mengutamakan perdagangan laut pada masanya. Pertumbuhan kota, baik di Jakarta, Semarang dan Surabaya juga pada awalnya berada di sekitar pelabuhan, yang pada saat ini bisa disaksikan sebagai bagian dari kota lama. Di bagian kota lama inilah gedung-gedung perkantoran dan perdagangan pada masa kolonial dibangun yang saat ini seharusnya menjadi warisan budaya

(*cultural heritage*) yang harus dilestarikan. Sejalan dengan perjalanan sejarah, pertumbuhan kota bergerak ke segala arah tanpa kendali, dan menjadikan kota lama seolah-olah tertinggal dan muncul pusat-pusat kota baru di mana konsentrasi dinamika pertumbuhan ekonomi dan perdagangan berlangsung.

Struktur dan Sistematika Buku

Buku ini merupakan hasil penelitian tahun ke-3 (2012) dari tema besar penelitian yang dilakukan dalam waktu lima tahun (2010-2014) “Perubahan Sosial di Kawasan Perkotaan di Pantura”.

Pada tahun pertama (2010) penelitian dilakukan di Banten dan Demak, tahun kedua (2011) di Kudus dan Situbondo. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa wilayah perkotaan di Pantai Utara Jawa (Pantura) merupakan wilayah yang mengalami perubahan secara cepat dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Jakarta, Semarang dan Surabaya adalah tiga kota terbesar di Pantura yang bisa dipastikan merupakan tiga pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat penting. Perubahan atau transformasi yang berlangsung secara cepat di ketiga pusat pertumbuhan ini diduga akan berpengaruh terhadap dimensi sosial-spasial yang pada gilirannya akan berdampak pada kelompok-kelompok masyarakat dan warga-kota yang ada didalamnya.

Untuk mendapatkan gambaran tentang proses yang terjadi, dalam penelitian tahun 2012 ini dipilih lima buah kasus yang dianggap menonjol dalam masyarakat. Kelima kasus tersebut adalah: (1) Problema Pelayanan Publik, Kasus Tanah Merah, Jakarta (Bab 2, ditulis oleh M. Bashori Imron), (2) Perubahan Sosial di Pinggiran Kota, Kasus Mranggen, Semarang (Bab 3, ditulis oleh Ana Windarsih), (3) Hubungan Antar Kelompok Keagamaan di Semarang (Bab 4, ditulis oleh M. Khoirul Muqtafa), (4) Perubahan Sosial di Pusat Kota, Kasus Tunjungan Plaza, Surabaya (Bab 5, ditulis oleh Syarfina M. Nadila), (5) Kyai dan Jembatan Madura: Ketegangan Masyarakat dan Negara (Bab 6, ditulis oleh Anas Saidi). Bab 1 (Pengantar) dan Bab 7 (Kesimpulan) ditulis oleh Riwanto Tirtosudarmo.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik wawancara tidak terstruktur, observasi, penggunaan data sekunder dan studi kepustakaan. Kelima kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses transformasi sosial yang sedang berlangsung dalam sebuah masyarakat perkotaan di Pantura yang mengalami perkembangan demografi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat.

BAB 2

KONFLIK TANAH MERAH, JAKARTA UTARA: KESENJANGAN KOMUNIKASI-POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT?

Oleh M. Bashori Imron

Pendahuluan

Pembangunan kota senantiasa menyisakan masalah terhadap masyarakatnya. Masalah yang muncul dapat berupa masalah: sosial, ekonomi, politik, hukum dan juga masalah kebijakan administrasi kependudukannya. Secara garis besar, munculnya masalah di perkotaan khususnya di Tanah Merah Jakarta bermula dari masalah konflik pertanahan. Hal ini memungkinkan karena kebutuhan dasar manusia yang paling bernilai ekonomis adalah tanah. Tanah juga bernilai sosial dan bernilai budaya. Namun ketersediaan tanah sungguh tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, tempat usaha, maupun untuk tempat tinggal. Akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah juga belum dapat dinikmati oleh setiap orang, karena perbedaan akses modal atau akses politik.

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, lahan kosong atau tanah yang tidak diurus oleh pemiliknya, menjadi sasaran utama masyarakat untuk memanfaatkannya. Sangatlah tidak pantas tanah yang bernilai ekonomi, sosial dan budaya seperti itu, dibiarkan saja oleh pemiliknya. Seharusnya diberi pembatas pagar atau tanda, sehingga orang lain mengurungkan niatnya untuk memanfaatkan lahan kosong tersebut. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Marwan menyatakan bahwa lahan kosong yang disebut lahan terlantar diibaratkan seperti memiliki emas permata yang

ditinggalkan nun jauh di sana, tanpa penjagaan, tanpa perlindungan; niscaya akan menjadi incaran banyak orang.¹

Lahan-lahan kosong tersebut, sudah menjadi salah satu dari lima program strategis pertanahan. Hal ini terkait dengan reformasi agraria dan penanganan sengketa, konflik dan perkara. Penanganan tanah terlantar telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2008 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Namun masalah ini menurut beberapa hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanahan BPN (BPN, 2011) belum dapat berjalan efektif karena belum adanya persamaan persepsi tentang lahan terlantar, objek yang belum jelas, masalah keperdataan berkas pemegang hak maupun kendala teknis operasionalnya.

Jumlah konflik pertanahan secara nasional dari data Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN, 2009) setiap tahunnya mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan pembangunan kota itu sendiri. Tahun 2006 tercatat 322 kasus konflik pertanahan, Tahun 2007 tercatat 858 kasus, tahun 2008 tercatat 520 kasus dan tahun 2009 tercatat 194 kasus konflik pertanahan. Konflik pertanahan itu sendiri disebabkan oleh berbagai penyebab. Terbatasnya ketersediaan tanah untuk pembangunan maupun pemukiman di perkotaan menyebabkan adanya dorongan untuk menggunakan lahan sengketa melalui cara-cara melanggar hukum, tidak etis atau bahkan tidak manusiawi. Penggusuran paksa, penggunaan “preman” dalam melindungi keberadaan tanah sengketa, atau bahkan tanah sengketa terbakar secara tiba-tiba yang mengesankan sengaja dibakar, merupakan pemandangan yang biasa.

Dalam tataran hukum, masalah konflik pertanahan bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

¹Wawancara dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2012.

Undang-Undang ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang sejak semula berciri populis. Namun perbandingan antara ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam yang langka di satu sisi, dan penambahan jumlah penduduk dengan berbagai pemenuhan kebutuhannya akan tanah di sisi lain, tidak mudah dicari titik temu (SW Soemardjono, 2008).

Konflik pertanahan sesuai Peraturan Kepala BPN RI No. 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Lebih rendah dari konflik pertanahan adalah sengketa pertanahan, yaitu perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis (BPN, 2011). Mengingat masalah konflik pertanahan itu tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, hasil BPN-RI menyatakan bahwa penyebab terjadinya konflik pertanahan meliputi:

- (a) Pemalsuan keterangan, salah lokasi, kepemilikan tidak jelas, tanda batas tidak ada;
- (b) Keterangan pihak Lurah/Kepala Desa karena pemalsuan keterangan waris dan atau keterangan kepemilikan);
- (c) Keterangan PPAT karena pemalsuan akta jual beli, keterangan waris dan keterangan kepemilikan salah;
- (d) Keterangan Kantor Pajak karena penetapan wajib pajak keliru dan penetapan NJOP salah, serta
- (e) Faktor intern dari BPN sendiri karena tidak tertibnya administrasi pertanahan dan kurang cermat dalam mengidentifikasi letak, batas dan tanda bukti atas hak (BPN, 2011).

Secara etimologi, konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat. Dengan kata lain konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, hal ini karena konflik

merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (*social relations*). Rauf (2001) menyatakan hubungan sosial menghasilkan dua hal yaitu: pertama, hubungan sosial yang mendatangkan manfaat bersama adalah hubungan sosial yang didiamkan oleh setiap masyarakat yang dinamakan hubungan sosial positif. Kedua, hubungan sosial yang negatif yang menghasilkan konflik antara mereka yang terlibat di dalamnya. Pandangan bahwa satu pihak dalam hubungan sosial tersebut menganggap bahwa pihak lain memperoleh manfaat yang lebih besar dari hubungan sosial ini menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam diri pihak (atau pihak-pihak) yang terlibat di dalamnya, sehingga terbentuk perbedaan mengenai manfaat dari hubungan sosial tersebut.

Selanjutnya menurut Galtung (2009) konflik sosial sebagai salah satu bentuk produk hubungan sosial dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu: (1) konflik kultural (kekerasan kultural); (2) konflik struktural (kekerasan struktural); dan (3) konflik kekerasan (kekerasan langsung). Dalam pandangan Galtung, kekerasan kultural adalah kekerasan yang melegitimasi terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung serta menyebabkan tindakan kekerasan dianggap wajar saja atau dapat diterima oleh masyarakat. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan itu. Kekerasan jenis ini lebih tersembunyi seperti ketidakadilan, kebijakan yang menindas, dan perundang-undangan yang diskriminatif. Kekerasan struktural ini termanifestasi dalam bentuk ketimpangan kekuasaan dan ekonomi yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan hidup. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian, sehingga kekerasan jenis ini sangat mudah diidentifikasi karena merupakan manifestasi dari kekerasan kultural dan struktural.

Konflik Pertanahan di Tanah Merah Jakarta Utara

Manusia Indonesia oleh Emha Ainun Najib dinyatakan sebagai manusia tangguh, tidak peduli punya masa depan atau tidak. Mereka

berani hidup tanpa pekerjaan tetap, berani beranak pinak dengan pendapatan yang tidak masuk akal. Juga berani menyerobot, menjegal, menjambret dan mendengki, seiring kesantunan dan kerajinan beribadah (Kompas, 2012). Apakah masyarakat penghuni tanah kosong di Tanah Merah seperti gambaran Emha di atas? Tentu tidak sepenuhnya benar.

Masyarakat penghuni lahan kosong di Tanah Merah, semula hanya berniat untuk menjadikan lahan kosong tersebut sebagai tempat tinggal sementara dengan membangun “gubuk” sementara pula. Seiring perjalanan waktu, rumah-rumah gubuk diubah menjadi rumah tinggal setengah permanen, dan seterusnya menjadi rumah permanen. Semula hanya beberapa warga saja, lama kelamaan lahan kosong tersebut menjadi pemukiman warga yang permanen seperti yang terlihat saat ini. Demikian halnya, dengan kelengkapan tempat tinggal permanen, rumah-rumah di lahan tersebut dilengkapi dengan aliran listrik, warung makanan, pos keamanan dan lain sebagainya sebagaimana layaknya kondisi lingkungan tempat tinggal.

Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa sudah sejak puluhan tahun yang lalu, perlahan tapi pasti, masyarakat mulai memanfaatkan tanah kosong tersebut untuk membangun tempat tinggal. Bertahun-tahun tempat tinggal yang semula hanya sedikit, lama-lama menjadi daerah pemukiman padat penduduk. Bukan hanya para pendatang dari luar kota dan tidak memiliki KTP DKI saja yang memanfaatkan tanah kosong tersebut, namun beberapa masyarakat DKI yang sudah memiliki KTP DKI pun juga memanfaatkan tanah kosong tersebut untuk tempat tinggalnya. Sebagian masyarakat membangun rumah sendiri, sebagian membangun untuk usaha, sebagian lainnya untuk dikontrakkan.

Di dalam struktur dan formasi sosial di perkotaan, maka tanah memiliki fungsi dan peran yang bernilai tinggi, khususnya dari sudut ekonomi. Besarnya peran tersebut, menjadikan tanah sebagai obyek kepentingan dari berbagai macam aktor. Pengelolaan kepentingan tersebut diatur dengan perundang-undangan. Namun tumbuh

berkembangnya pemukiman di Tanah Merah menunjukkan rendahnya kualitas hidup terkait dengan ketersediaan air, sampah, dan transportasi publik. Pembinaan wajib dilakukan. Kuncinya adalah meneliti dan menggali sedalam mungkin potensi masyarakat sebagai subjek utama yang wajib dilibatkan dari awal perencanaan hingga implementasi program.

Pelibatan masyarakat tersebut perlu dilakukan karena adanya lima sumber konflik di Indonesia yaitu: (1) sumber konflik yang diakibatkan oleh konflik struktural yaitu adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya seperti tanah, hutan dan tambang, kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan. (2) konflik kepentingan yang dapat terjadi ketika pemuasan kebutuhan dan cara memenuhi yang dilakukan oleh suatu kelompok, dengan cara mengorbankan kelompok atau orang lain, persaingan yang tidak sehat di bidang politik, sosial dan budaya. (3) konflik nilai dapat muncul akibat perbedaan adat, nilai ideologis, implementasi nilai agama, yang saling berbenturan. (4) konflik hubungan sosial psikologis disebabkan oleh stereotip, prasangka, dan stigmatisasi. (5) konflik data dapat terjadi ketika satu pihak kurang mendapat informasi, adanya perbedaan pandangan, salah komunikasi, perbedaan interpretasi atas suatu masalah yang berakibat pada distorsi informasi (Arkanudin, 2008).

Kasus dengan sebutan Tanah Merah ini berlokasi di Kecamatan Plumpang Jakarta utara, merupakan salah satu contoh dari kondisi seperti pernyataan sebelumnya. Di lokasi Tanah Merah terdapat tanah Negara yang kosong, tidak terpakai, dan tanpa pembatas yang jelas. Kondisi seperti ini menarik bagi masyarakat urban yang datang ke Ibukota dengan modal nekad untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Siapa saja dapat memanfaatkan tanah kosong tersebut, tanpa dihalangi oleh pihak-pihak berwenang terkait.

Kawasan ini, melintasi tiga wilayah Kelurahan di dua Kecamatan, yaitu: Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja, dan Kelurahan Kelapa

Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading. Jumlah penduduk sekitar 27.000 jiwa yang tergabung dalam 7.400 Kartu Keluarga. Matapencaharian penduduk adalah pekerja di sektor informal antara lain buruh, pekerja serabutan, pemulung, sopir dan kernet. Kronologis kasus kawasan Tanah Merah Plumpang Jakarta Utara dapat dicatat sebagai berikut:²

Tahun 1968 PT. Pertamina membeli tanah sekitar 160 hektar dari PT. Mastraco dengan bukti kepemilikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Agraria nomor 190/DA/1976 tanggal 5 Juni 1976. Artinya selama delapan tahun (1968-1976) lahan dibiarkan kosong tanpa bukti sah kepemilikan secara hukum, tanpa pemagaran. Pada periode inilah menurut mantan Walikota Jakarta Utara, tanah tersebut sudah mulai banyak bangunan liar semi permanen dan rumah-rumah petak yang dibangun oleh masyarakat. Dalam kondisi seperti ini Pemerintah Daerah dan juga PT. Pertamina, sama sekali belum melihat fakta bahwa bangunan liar tersebut dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 1974 pihak PT. Pertamina mencoba melakukan pemagaran dan pengurukan di atas tanah tersebut, namun tidak berhasil. Padahal pada saat itu, penghuni lahan Tanah Merah belum semarak dan sebanyak sekarang. Masalah yang muncul, juga belum sebanyak ini, campur tangan para spekulan mafia tanah belum serumit ini. Tetapi kenapa tidak berhasil? Menurut pengakuan tokoh masyarakat, banyak oknum pegawai Pemerintah Daerah ikut bermain untuk memperoleh keuntungan pribadi khususnya keuntungan finansial.³ Layaknya suatu permainan, sejak tahun 1980-an lahan Tanah Merah mulai dihuni banyak warga. Bahkan sebagian di antaranya memperjualbelikan atau setidaknya-tidaknya mengontrakkan tempat

² Wawancara dengan Mantan Walikota Jakarta Utara Dr. Suprawito tanggal 27 Juni 2012 serta diolah dari pemberitaan Harian Kompas, tanggal 8 Pebruari 2012.

³ Wawancara dengan salah satu penghuni lahan Tanah Merah yang tidak mau disebut namanya, tanggal 30 Juni 2012.

tinggalnya kepada warga lainnya. Sementara terus bertambah pula warga lain yang datang dan memanfaatkan lahan yang masih kosong lainnya di lingkungan Tanah Merah.

Tahun 1991 (bulan Nopember) pemilik lahan yaitu Pertamina akan membangun Depo baru dan perumahan karyawan di atas tanah tersebut dengan menggusur sekitar 1.969 bangunan. Ganti rugi kepada penghuni juga sudah ditetapkan, sesuai dengan penetapan Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 4143/073.3 tahun 1991. Sebagai bentuk pengukuhan transaksi pesangon sebesar Rp.37.000 per m². Kondisi seperti ini merupakan keterlambatan pihak pemerintah dalam penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat. Pada saat masalahnya masih kecil (sampai tahun 1980-an) dibiarkan tanpa melakukan komunikasi intensif kepada warga atas kepemilikan lahan yang ditempati. Begitu masalahnya sudah kompleks, campur tangan berbagai pihak menjadi ikut terlibat, kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal tersebut juga sudah menjadi kebutuhan primernya, maka masalahnya akan semakin sulit. Itulah sebabnya, konflik pertanahan menjadi sesuatu yang bersifat laten dan cenderung tidak dapat diidentifikasi dari awal, dikarenakan permasalahan yang sangat kompleks.

Selama bertahun-tahun kasus Tanah Merah tetap tidak dapat diselesaikan. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, pihak yang terlibat menjadi lebih banyak, sehingga kasusnya menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Kasus konflik Tanah Merah ini membuktikan pula bahwa terdapat banyak kasus yang diselesaikan hanya melalui legitimasi formal, tanpa melihat filosofi rasa keadilan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Kasus Tanah Merah ini terus menggelembung menjadi bola liar.

Satu bulan setelah rencana Pertamina akan membangun Depo baru dan perumahan karyawan pada lahan sebagaimana SK Gubernur tersebut, masyarakat memberikan reaksinya. Delegasi warga Tanah Merah menghadap DPR meminta penangguhan SK Gubernur dan menghendaki ganti rugi tanah sebesar Rp.100.000,- per m² dan harga

bangunan sebesar Rp.250.000,- per m². Dilanjutkan pada tahun 1992 (sekitar bulan Maret-Juni), warga Tanah Merah menggugat Walikota Jakarta Utara, Pertamina dan Gubernur DKI Jakarta ke PTUN Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 2 Nopember 1992, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan warga Plumpang dan Pertamina yang bersengketa atas kepemilikan lahan, keduanya tidak punya hak sah terhadap tanah sengketa karena merupakan tanah Negara.

Pada bulan Nopember 2008 setelah 16 tahun (1992-2008) Forum warga Tanah Merah tidak mengakui lahan seluas 160 hektar yang mereka okupasi sebagai tanah milik PT. Pertamina (persero), tetapi mereka mengakui sebagai tanah milik Negara. Kondisi seperti ini ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta (2009) dengan rencana merelokasi warga Tanah Merah ke tempat lain, namun sampai saat ini juga belum ada kejelasan lokasi relokasi.

Akhirnya, dalam ketidakjelasan relokasi, pada bulan Januari 2012 warga Tanah Merah berunjuk rasa di depan Kemendagri menuntut pembentukan RT dan RW. Unjuk rasa sudah tidak lagi mempersoalkan konflik kepemilikan lahan, namun sudah bergeser ke persoalan lain. Pemukiman warga Tanah Merah tetap tidak memiliki pengakuan resmi dari pemerintah kota Jakarta Utara, meskipun tempat tinggal yang ada sudah memiliki listrik dan perlengkapan lainnya, layak sebagai daerah pemukiman. Mereka membentuk RT-RW Mandiri terdiri dari lima RW dan 57 RT. Mereka memiliki KTP daerah dan sebagian di antaranya memiliki KTP resmi DKI Jakarta dengan cara *nembak* dan beralamat di luar daerah Tanah Merah, menumpang di Kartu Keluarga famili di wilayah lain. Akibat tidak memiliki RT-RW resmi, maka:

- Mereka tidak memiliki Akta Kelahiran buat anak-anak mereka yang lahir di Tanah Merah
- Tidak dapat sekolah di sekolah negeri
- Sulit memperoleh pekerjaan formal
- Sulit memperoleh pelayanan kesehatan murah
- Yang membutuhkan data kependudukan resmi, dll.

Bersamaan dengan itu Pertamina berniat mengosongkan lahan Tanah Merah milik Pertamina secara bertahap setelah ada sosialisasi. Masalah terus bergulir sampai dengan unjuk rasa berikutnya yang dilakukan oleh warga Tanah Merah menuntut penerbitan e-KTP bagi mereka. Pembubaran unjuk rasa tanggal 7 Pebruari 2012 di depan Kemendagri oleh petugas Satpol PP dan Kepolisian berakhir dengan baku hantam dan kericuan yang mengangkat masalah ini menjadi masalah nasional.

Penyelesaian konflik pertanahan secara litigasi atau semata-mata melalui pendekatan normatif, juga membutuhkan waktu cukup lama dan biaya tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik pertanahan sangat diperlukan. Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dari konflik tersebut. Konfigurasi pertanahan yang terus berubah dan berkembang tentu saja menimbulkan banyak benturan kepentingan yang terus berjalan. Solusi pemecahan yang diajukan dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat menjamin keadilan dalam hal penyelesaian konflik dan penggunaan tanah selanjutnya, tidak lagi berlarut-larut dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kesenjangan Komunikasi-Politik?

Lemahnya pengawasan aparat Negara terhadap pertumbuhan pemukiman tidak resmi di perkotaan melahirkan masalah sosial ekonomi kependudukan bagi warganya. Akibatnya terjadi pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, tanpa upaya keras untuk menghentikannya. pembiaran-pembiaran seperti ini merupakan indikasi adanya kesenjangan komunikasi antara Negara dengan warga negaranya. Seorang tokoh masyarakat Jakarta Utara yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan bahwa:⁴ Kondisi dan persoalan yang terjadi di lahan Tanah Merah ini merupakan bentuk "kegagalan" kebijakan

⁴ Wawancara dengan Anggota DPRD Fraksi Partai Hanura mewakili daerah pemilihan Jakarta Utara, tanggal 3 Agustus 2012

administrasi publik, selain juga memperlihatkan gejala puncak gunung es dari berbagai kesenjangan komunikasi dalam dinamika warga masyarakat perkotaan.

Pertumbuhan pemukiman liar di perkotaan seperti kasus Tanah Merah ini (baca tidak direncanakan) merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah menjalankan tugasnya sebagai unit yang memerintah. Dalam penelitian masalah perkotaan tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh Soewarsono, dkk. (Soewarsono, dkk., 2011: 203-228) dan Riwanto, dkk. (Tirtosudarmo, dkk., 2010: 237-238) dinyatakan bahwa:

- Ruang Kota (*urban space*) baik yang bersifat fisik maupun simbolik mengalami perubahan terutama bukan karena direncanakan oleh disain yang dibuat oleh pemerintah kota maupun oleh warga kota dan kelompok-kelompok masyarakat yang menghuninya, namun lebih merupakan “produk intervensi” dari kekuatan-kekuatan yang berada di atas pemerintah kota (pemerintah pusat) dan kekuatan-kekuatan kapital baik yang berskala nasional maupun yang sudah bersifat trans-nasional.
- Kasus kota Gresik dan kota Cirebon sebagai *the production of space* sebagaimana dikemukakan oleh Lefebvre – memperlihatkan proses transformasi yang menarik, karena warga kota memiliki posisi yang lemah dan ditentukan oleh kekuatan lain, terutama kekuatan pasar dan modal
- Dari prespektif studi perkotaan, ilustrasi yang ditemukan di kota Cirebon dan kota Gresik menggarisbawahi apa yang selama ini terjadi di berbagai tempat, yaitu tentang gejala kotadesasi dan meluasnya proses sub-urbanisasi. Juga memperlihatkan proses perubahan struktur sosial-ekonomi yang terus berlanjut di kota-kota di Indonesia mulai sejak tahun 1970-an, yaitu terus mengalirnya penduduk desa ke kota untuk menjadi *urban pioletariat* baik sebagai buruh murah maupun pekerja sektor informal.
- Pertumbuhan kota atau urbanisasi ternyata tidak berlangsung seperti yang sering dibayangkan yaitu semakin baiknya tingkat

ekonomi masyarakat. Hal Ini akan menimbulkan konflik berbasis kesenjangan ekonomi.

- Dalam konflik yang berbasis ekonomi ini peran pemerintah kota dan masyarakat sipil, terbukti belum mampu menjadi katalisator bagi transformasi sosial yang lebih memihak pada mayoritas warga kota yang miskin.

Hasil penelitian tersebut meyakinkan kita bahwa kasus lahirnya pemukiman tradisional Tanah Merah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota yang diikuti dengan keberadaan kampung di tengah kota. Keberadaan pemukiman tradisional (kampung-kampung) di tengah Jakarta, bukan hanya ada di Tanah Merah, tetapi juga terdapat di wilayah Jakarta lainnya. Apabila pemukiman tradisional yang ada di Tanah Merah lahir secara kodrati, tentu pemukiman perkampungan lainnya ada yang direncanakan. Banyak kawasan pemukiman tradisional, yaitu kampung yang sampai sekarang dianggap sebagai salah satu masalah besar di Jakarta, hingga kini belum terpecahkan. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk membuktikan kebijakan ketika semua kampung dipindahkan ke Perumnas, Rusunawa, atau apapun istilahnya dengan tujuan penataan kota dan masalahnya selesai.

Eric Sheppard dari universitas Minnesota AS dalam Conference of Urban Revolutions in the Age of Global Urbanism di Universitas Tarumanegara 16 Maret 2012, menyatakan bahwa: permasalahan kompleks yang membelit kota-kota besar di negara berkembang seperti Jakarta, tidak bisa diatasi lagi dengan sekedar mengadopsi konsep-konsep dari negara maju. Diperlukan revolusi dalam melihat dan mencari cara mengatasi permasalahan yang menimpa kota-kota besar di negara berkembang. Salah satunya adalah revolusi dalam berpikir. Tata kota tidak harus hasil adopsi dari kota-kota besar di USA dengan New York nya atau Eropa dengan London nya. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kota seperti Jakarta. Tidak semuanya negatif dan mungkin justru bisa diadopsi oleh kota-kota besar negara maju (Sheppard, 2012).

Jakarta selalu disebut sebagai kota yang amat buruk dari berbagai sisi kemacetan, kekumuhan, banjir dan lain-lain. Namun jika benar-benar tinggal dan mencoba memahami Jakarta ada banyak hal yang menarik dan positif dari kota ini. Pembuatan kota-kota satelit di pinggiran Jakarta seperti Serpong, Karawaci, Depok dan Bekasi sejak 1980-an, justru melahirkan ledakan jumlah penduduk tidak terkendali. Jumlah penduduk Jakarta di siang hari akan menjadi lebih besar dibanding penduduk yang menetap di DKI. Memang sudah menjadi kecenderungan di berbagai belahan dunia bahwa urbanisasi akan terus terjadi, sehingga perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kawasan sekitar kota makin membengkak. Demikian halnya dengan keterkaitan dengan penduduk kota-kota yang berbatasan dengan Jakarta. Secara administratif penduduk pinggiran Jakarta adalah bukan bagian dari Jakarta, tetapi dalam kesehariannya menjadi beban Jakarta. Jakarta dipaksa menyediakan fasilitas transportasi dan infrastruktur lain, agar kebutuhan warga pinggiran Jakarta tersebut terpenuhi.

Sejarah panjang perkembangan Ibukota DKI Jakarta oleh Budiarto Shambazy (Kompas, 2012) dibagi menjadi empat era sejarah, yaitu: era kolonialisme sampai 1945, era kemerdekaan 1945-1967, era Ali Sadikin 1967-1977, dan Era stagnasi 1977 sampai kini. Batavia pada era kolonialisme disebut masyarakat sebagai jaman normal yang stabil, damai, dan klasik berkat perencanaan tata kota yang bagus dengan jumlah penduduk sedikit. Pengelolaan Batavia tidak terlalu kompleks dan tidak menimbulkan gejolak sosial, politik ataupun kultural.

Dalam era kemerdekaan, Jakarta merupakan simbol politik paling penting ketika republik baru dipimpin bangsa sendiri. Ibukota tempat lahir kemerdekaan, sentra perjuangan diplomasi, dan pusat pengembangan birokrasi Persaudaraan warga subur karena berkobarnya kebhinekaan. Meski demikian, setiap era pengembangan kota DKI Jakarta tersebut memiliki masalahnya sendiri. Penting untuk dicatat bahwa pembangunan Jakarta terasa menjadi gonjang ganjing, ketika sistem politik mencengkeram setelah Dekrit Presiden 5 juli 1959. Lewat demokrasi terpimpin bertangan besi itu, pemberedelan

surat bakar dan penangkapan oposisi Jakarta meledak. Dengan dana tak sedikit, Bung Karno membangun kota satelit Kebayoran Baru, Tugu Monas, Masjid Istiqlal, Jalan Sudirman, Kompleks olah raga Bung Karno, dll.

Era Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dianggap sebagai satu-satunya Gubernur yang dapat melanjutkan ide besar Bung Karno tentang Jakarta. Masyarakatnya hidup rukun damai dan memiliki *sense of belonging*. Mengapa era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin dianggap berhasil membangun kota Jakarta. Kuncinya adalah pada komunikasi yang dipakai, yaitu komunikasi yang dalam teori ilmu komunikasi disebut dengan *upward communication* (Pace & Don F. Faules, 1985: 105). Komunikasi yang dapat memberikan kebijakan sebagaimana harapan masyarakat yang dirumuskan dari keinginan masyarakat sendiri. Jika mengilas balik (Kompas, 2012) kepemimpinan Ali Sadikin, apa yang dilakukan cuma satu, yakni bekerja. Ia dikenal sebagai gubernur yang tak kenal lelah. Turun ke bawah untuk membangun komunikasi dengan warga, terutama dari kalangan bawah. Ia tak segan menindak tegas warga yang melanggar aturan, misalnya menempeleng sopir bus atau truk yang mengemudi secara ugal-ugalan.

Intinya setiap masalah yang muncul di masyarakat senantiasa direspon oleh Gubernur Ali Sadikin. Salah satu cara Gubernur mengetahui perkembangan Jakarta sehari-hari adalah membuka ruang komunikasi dengan masyarakatnya, antara lain menugaskan staf khusus untuk menyuguhkan berita-berita di media massa tentang ibukota. Selain itu, selalu menyapa warga dengan turun ke lapangan, bekerja tak kenal lelah, serta terus mengawasi apa yang terjadi.

Dengan cara-cara membangun komunikasi seperti itu, Gubernur Ali Sadikin menstimuli masyarakat untuk ikut peduli dengan lingkungan masing-masing, sehingga setiap warga mempunyai rasa memiliki sebagaimana jargon Jakarta sebagai *The Big Village* alias Desa Besar, yang menjadi milik semua golongan yang berdomisili di Jakarta. Desa besar mencerminkan bahwa semua warga Jakarta

menjaga erat kerekatan antara suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan bangga dengan persaudaraan itu. Apakah saat ini perkembangan kota dengan jargon kota metropolitan yang serba modern dengan bangunan Mall maupun pemukiman elite yang eksklusif, masih dapat disebut dengan Desa Besar? (Shambazy, 2012).

Model untuk membangun tingkat pengertian dan kesepahaman bersama, sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin seperti Ali Sadikin, diperlukan serangkaian siklus komunikasi konvergen yang berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu. Ini bertujuan agar perbedaan pengertian dan makna tentang pembangunan kota DKI Jakarta, terus berkurang sampai pada tingkat toleransi tertentu. Sedangkan untuk memeliharanya diperlukan komunikasi yang berkesinambungan, sehingga akan membentuk hubungan-hubungan komunikasi yang terpolakan, yang oleh Rogers dan Kincaid (Roger & Laurence D. Kincaid, 1981: 62) disebut dengan jaringan komunikasi. Hal ini disebabkan karena partisipasi komunikasi itu bersifat dinamis baik bagi individu maupun kelompok.

Praktik komunikasi seperti ini dapat menghapus mentalitas birokrasi priyayi. Selama ini meskipun Negara kita telah menjadi Negara merdeka berbentuk Republik, tetapi sikap dan perilaku birokrasi kita masih saja seperti birokrat pada masa kerajaan (priyayi) dan penjajahan (*ambtenar*). Donald K Emerson (1976) dalam Budi Setiyono (2012) memandang bahwa walaupun birokrasi kita telah memperlihatkan bentuk dan ciri modern, tetapi secara kultural perilaku mereka masih memperlihatkan corak budaya tradisional. Di mana birokrat (priyayi) adalah abdi dalem atau sentana dalem yang menjadi alat raja (penguasa) untuk mengeksploitasi rakyat (wong cilik) serta menganggap rakyat sebagai kelas rendah yang dapat diperintah sedemikian rupa tanpa adanya hak berpartisipasi, apalagi ditempatkan sebagai mitra seajar (Setiyono, 2012). Kultur budaya tradisional kita tidak mengenal pertanggungjawaban publik. Arah pertanggungjawaban tidaklah ke bawah, melainkan ke atas. Akibatnya pegawai rendah apalagi rakyat biasa, tidak pernah memiliki kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, apalagi kontrol terhadap kekuasaan dan aparatur pelaksanaannya.

Penutup

Konflik Pertanahan Tanah Merah di Jakarta Utara merupakan bentuk kesenjangan komunikasi dalam dinamika masyarakat perkotaan yang menyimpan banyak masalah yang tidak terpecahkan. Kesenjangan komunikasi yang dilahirkan oleh pembiaran-pembiaran aparat pemerintah DKI Jakarta dalam menangani permasalahan warga. Pembiaran-pembiaran ini menjadi puncak gunung es yang sewaktu-waktu akan meledak.

Untuk tidak terulang kembali pembiaran maupun munculnya kesenjangan komunikasi antara Pemerintah dengan warga negaranya itu, diperlukan pemimpin yang dapat memberikan solusi pemecahan masalah dan tindak lanjutnya. Pemimpin yang dapat mewujudkan komunikasi dengan warganya melalui bentuk *upward communication*. Komunikasi model ini akan meningkatkan *sense of belonging* warga atas pembangunan yang sedang dilaksanakan.

DKI Jakarta terus berbenah diri menjadi kota metropolitan dengan menyimpan berbagai masalah yang belum terpecahkan. Kehadiran Gubernur baru Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama dengan slogan “Jakarta Baru”, memutarbalikkan fakta kesenjangan komunikasi tersebut. Pemerintah DKI telah membuka pintu pengaduan masyarakat melalui dki@jakarta.go.id; forum sosial di situs www.jakarta.go.id; *sms centre* dengan nomor 32881818; [twitter@jakarta.go.id](https://twitter.com/jakarta.go.id) dan klipping media cetak. Keterbukaan komunikasi Gubernur baru tersebut, seperti komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin ada kecenderungan memberikan harapan baru. Bukti kemampuan dalam menjalin komunikasi ini, setidaknya sebagian warga bergerak untuk bersama-sama ikut menyingsingkan lengan, membenahi berbagai persoalan Jakarta.

Daftar Pustaka

- Ainun Najib, Emha , Harian Kompas, 2012.
- Arkanudin. 2008. *Resolusi Konflik Pertanahan Berdasarkan Pranata Adat*. Universitas Kapuas Sintang.
- BPN-RI. 2011. *Kapasitas Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Proses Alternatif Berbasis Masyarakat*. Hasil Penelitian.
- BPN RI. 2011. *Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*.
- BPN RI. 2011. *Himpunan Hasil Penelitian Puslitbang BPN*.
- BPN RI. 2009. *Data Konflik Pertanahan*
- Galtung, Johan. 2009. *Kekerasan Kultural*. *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Yogyakarta: Insist Press.
- Harian Kompas, 8 Pebruari 2012
- Harian Kompas, 20 September 2012
- Pace, R Wayne & Don F Faules. 1989. *Organizational Communication*. New York: Mc Graw Hill Inc.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta, Penerbit Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional
- Riwanto, dkk. 2010. *Transformasi Sosial di Perkotaan Pantai Utara Jawa: Studi perbandingan Cirebon dan Gresik*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Roger, Everett M, & Laurence D. Kincaid. 1981. *Communication Networks: Toward a new Paradigm for Research*. New York: The Free Press.
- Setiyono, Budi. 2012. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

- Shambazy, Budiarto. 2012. *The Big Village*. Harian Kompas, 20 September 2012.
- Sheppard, Eric. 2012. Makalah seminar dalam *Conference of Urban Revolutions in the Age of Global Urbanism* di Universitas Tarumanegara, Jakarta, 16 Maret 2012
- Soemardjono SW, Maria. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soewarsono, dkk. 2011. *Kota-kota Pantura Bagian Barat dalam Pemekaran: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.

BAB 3

EKOLOGI RUANG DAN RELIGI KECAMATAN MRANGGEN, DI PINGGIRAN KOTA SEMARANG

Oleh Ana Windarsih

Pendahuluan

Pesantren dan masjid merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental berkaitan dengan umat Islam. Penelitian ini akan menguraikan tentang posisi dan kekuatan Pesantren Futuhiyyah di Mranggen dalam konteks hubungannya dengan dinamika kelompok perkotaan. Sebagaimana sebuah wilayah yang mempunyai institusi religius (pesantren) tentulah mempunyai *bargaining position* di dalam kehidupan kota tersebut, baik dalam sisi ruang atau sikap keberagamaannya.

Mranggen merupakan sebuah kota kecamatan di perbatasan Kota Semarang, tetapi masuk ke dalam wilayah Kabupaten Demak. Dilihat dari segi jarak justru lebih dekat dengan Kota Semarang, sehingga kadang-kadang menimbulkan wacana bahwa perluasan Kota Semarang akan sampai ke kota Mranggen. Sementara menurut batas administratif Kecamatan Mranggen masuk ke dalam wilayah Kabupaten Demak yang tentu saja kebijakan pembangunannya tidak bisa lepas dengan Kabupaten Demak.

Di Mranggen keberadaan Pesantren Futuhiyyah sudah memasuki seabad pada tahun 2001, sehingga sudah mengalami periodisasi masa seiring sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pesantren yang didirikan oleh K.H. Abdurrochman saat ini sudah

memasuki generasi ke-3. Berbagai perkembangan dan perubahan telah terjadi selama kurun waktu tersebut.

Demikian pula Kabupaten Demak sebagai wilayah di atas Kecamatan Mranggen, dalam sejarah telah melewati beberapa periodisasi. Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah sejak tahun 1402 (Raffles, 2008: 488), tentu banyak sekali peran pentingnya dalam pengembangan agama Islam, di antaranya hadirnya para “wali songo” yang memperkuat islamisasi di wilayah tersebut. Kerjasama antara para wali dan para raja menghasilkan suatu corak Islam yang pada mulanya disesuaikan dengan pandangan dunia dan kepentingan baik para ulama maupun bangsawan. Di wilayah-wilayah yang merupakan tempat tradisi Hindu masih terpelihara, Islam kehilangan sedikit banyak dari kekakuan ajarannya. Dan dapat dipahami memang sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam pengislaman pada masa ini adalah kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada adat lama sebagaimana diungkapkan oleh Berg dalam Mochtarom (2002: 51). Pada tahun 1475 didirikan pesantren di Glagah Wangi atau Glagah Arum, sebuah tempat yang kemudian terkenal sebagai Bintara, pusat kerajaan Demak (Mochtarom, 2002: 47).

Demak pada masa kolonial merupakan wilayah di bawah karesidenan Semarang. Setelah melewati beberapa suksesi raja Demak, pada akhirnya kerajaan Demak dipindahkan ke pedalaman Jawa yakni di Pajang pada masa Jaka Tingkir. Pergeseran dari pesisir ke pedalaman semakin menambah dan mempercepat kemunduran Demak, sampai akhirnya muncul kerajaan Mataram. Pada masa kerajaan Mataram ini Pulau Jawa telah sering dikunjungi para pelayar dari Portugis dan negeri-negeri Eropa lainnya, yang kemudian mendirikan kantor-kantor mereka di Bantam (Raffles, 2008: 498). Setelah hampir semua pantai di seluruh Nusantara dikuasai oleh Belanda pada tahun 1677, menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat yang kuat keislamannya sulit berlanjut. Dengan politik memecah belahnya para pangeran yang berebut kekuasaan diadu domba. Celah ruang tersebut bagi Belanda yang kala itu sudah mempunyai kantor dagang di Batavia,

dimanfaatkan untuk mengembangkan kekuasaan ekonomi dan menanamkan pengaruh politiknya. Akhirnya kerajaan Mataram yang kuat terus digerogeti dan secara perlahan terputus hubungan dagangnya dengan pulau-pulau lain. Belanda telah mengubah struktur dasar organisasi kemasyarakatan, hingga melancarkan pembatasan gerak dan pengawasan ketat terhadap pemimpin yang dikhawatirkan membahayakan kekuasaan Belanda (Dhofier, 2011: 16-18). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda menggantikan kekuasaan Belanda, wilayah Jawa Tengah dibagi menjadi 5 karesidenan, yaitu (1) Karesidenan Semarang meliputi Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Grobogan; (2) Karesidenan Rembang meliputi Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro; (3) Karesidenan Kedu mencakup Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen dan Karanganyar; (4) Karesidenan Banyumas meliputi Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga; serta (5) Karesidenan Pekalongan yang mencakup Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang (Yulianti dalam Tirtosudarmo, 2009: 47).

Karena pembatasan-pembatasan tersebut masyarakat Islam menjadi lambat pertumbuhannya. Namun demikian, justru Islam menjadi daya tarik tersendiri sebagai kekuatan utama melawan kolonialisme Belanda. Sehingga setelah pembatasan tersebut dicabut pada tahun 1859, maka jumlah jemaah haji melonjak dan penyediaan pengajar Islam berlipat ganda. Karena perlawanan menjadi tidak mungkin dilakukan di kota, maka pusat studi Islam pindah ke desa-desa dalam kompleks pesantren yang dikembangkan oleh para kyai. Akibat monopoli perdagangan yang awalnya merupakan mata pencaharian masyarakat dilakukan oleh Belanda, maka mata pencaharian sebagai pengajar menjadi pilihan di samping tetap sebagai petani atau pemilik sawah pertanian (Dhofier, 2011: 22). Pesantren Futuhiyyah, yang awalnya lebih dikenal dengan sebutan Pondok Suburan Mranggen, Demak berdiri pada tahun 1901 yang juga dimaksudkan sebagai upaya untuk melawan Belanda terbukti pasca perang Diponegoro wilayah Mranggen merupakan areal gerilya (Jabar, ed., 2001: 3).

Mranggen pada saat ini merupakan salah satu wilayah kecamatan Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah. Hal yang menarik adalah Pesantren Futuhiyyah sampai saat ini masih menunjukkan keberadaannya. Bahkan mempunyai lebih banyak bidang pengajaran yang cukup menarik banyak peserta didik untuk menuntut pendidikan di sana. Apa yang menjadi daya tarik dan perannya hingga masih tegak berdiri sampai saat ini, merupakan bahasan yang menarik untuk dikaji.

Profil Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen

Sebagaimana diuraikan pada pendahuluan, pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1901 oleh K.H. Abdurrochman bin Qosidil Haq. Merupakan warga asli Mranggen keturunan pangeran Wijil II atau Pengeran Noto Negoro II, kepala perdikan Kadilangu Demak dan sesepuh ahli waris kanjeng Sunan Kalijaga Kadilangu (Jabar, ed., 2001: 2). Maksud didirikannya adalah untuk melaksanakan pendidikan santri agar terbuka hati dan pikirannya, sehingga ilmunya bermanfaat dan barokah, terbebas dari kebodohan dan segala bentuk penjajahan baik fisik maupun moral dan tertulari kesuksesan para pejuang Islam terdahulu seperti Sultan Fatah dan wali songo.

Latar belakang masyarakatnya pada waktu itu wilayah Mranggen merupakan daerah hitam penuh dengan kecu, brandal, rampok dan lain-lain. Penduduknya mayoritas menganut abangan⁵ akibat penjajahan yang berjalan sangat lama. Mayoritas penduduknya juga menyukai kesenian terutama wayang dan tari-tarian sebagai sarana hiburan baik saat perkawinan maupun sunatan, meskipun ada juga yang menyukai rebana saat mengiringi pembacaan Maulid. Ilmu pencak silatnya juga membudaya, terutama dari golongan hitam dicampur mantra-mantra yang cenderung sesat. Tetapi karena gigihnya para golongan putih, maka tidak sedikit dari golongan hitam tersebut yang

⁵Abangan: menerima Islam hanya sebagai keyakinan, jarang menjalankan ibadah menurut agama Islam dan masih berpegang pada kepercayaan Hindu Budha dan kepercayaan asli dalam Muchtarom, 2002, h.15

bertaubat dan berubah menjadi golongan santri. Pada saat dilakukan penelitian lapangan (akhir Juni 2012) menurut keterangan pejabat kecamatan setempat masih dinyatakan ada golongan yang dianggap hitam tersebut, meski secara kuantitas sudah jauh berkurang dibandingkan dengan masa lalu. Hal tersebut dikuatkan dengan surat dari Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan keterangan berapa persen jumlah warga Mranggen yang menjadi penghuni LP tersebut.⁶

Letak Pondok Pesantren Futuhiyyah di belakang pasar Mranggen di jalan utama Semarang-Purwodadi. Jika dirunut dari masa perkembangan awalnya sempat berpindah tempat, dikarenakan suatu hal. Dikaitkan dengan peran pesantren yang meliputi bidang ekonomi sangatlah strategis lokasinya karena benar-benar berhimpitan dengan lokasi pasar Mranggen yang sangat dinamis menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga Semarang pinggiran yang berbatasan langsung dengan kecamatan Mranggen melakukan aktivitas ekonomi di pasar Mranggen. Didukung oleh transportasi trans Semarang yang mempunyai rute terakhir di terminal Penggaron, wilayah yang berbatasan langsung dengan Mranggen selanjutnya tinggal naik angkutan satu kali dengan biaya sekitar dua ribu rupiah, maka sampailah ke Pesantren Futuhiyyah Mranggen. Banyak pula mahasiswa yang 'nglaju' (*commuter*) kuliahnya dengan menggunakan fasilitas trans Semarang.

Materi pendidikan yang diberikan sejak awal sampai meninggalnya K.H. Abdurrochman bin Qosidil Haq adalah meliputi:

- Praktik ubudiyah, sholat fardhu lima waktu secara berjamaah diteruskan wiridan serta dzikir thoriqoh di antaranya melakukan mujahadah, riyadhoh, sholat-sholat sunnah, tadarus Al-Qur'an termasuk membaca kisah Maulid nabi Muhammad s.a.w.

⁶Wawancara saat penelitian lapangan dengan petugas Kecamatan Mranggen, 27 Juni 2012.

- Pengajian Al-Qur'an baik bagi anak-anak maupun remaja kampung Suburan dan sekitarnya, ataupun para santri dari luar wilayah Mranggen
- Bimbingan serta pengamalan Qodiriyah wa Naqsyabandiyah
- Pengajian syari'at
- Pengajian kitab kuning, antara lain tauhid, fiqh dan lain-lain (Jabar, ed, 2001: 7).

Sepeninggal K.H. Abdurrochman bin Qosidil Haq digantikan oleh putranya yakni K.H. Ustman Abdurrochman (1927-1935) yang berhasil mengembangkan Futuhiyyah dengan memajukan manajemen pondok yang meliputi keorganisasian, tata tertib pondok pesantren termasuk jadwal kegiatan santri. Selain itu juga munculnya manajemen madrasah berupa kurikulum, evaluasi belajar, kenaikan dan kelulusan jenjang. Pendidikan yang bersifat klasikal dan materi kepemimpinan, sehingga semakin menambah luas fungsi pondok pesantren, yakni sebagai lembaga pendidikan Islam, pendidikan kebangsaan sekaligus sebagai lembaga dakwah dan perjuangan yang lebih intensif dan akuratif.

Pada tahun 1936-1981 pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyyah dipegang oleh K.H. Muslich Abdurrochman, putra kedua K.H. Abdurrochman bin Qosidil Haq. Beberapa kemajuan yang diraih adalah pendidikan klasikal dari tingkat MI (Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD), MTs (Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP) dan MA (Madrasah Aliyah setingkat SMA) sebagaimana diuraikan dalam buku sejarah 100 tahun Pesantren Futuhiyyah Mranggen (Jabar, ed., 2001: 20). Pada saat sekarang malah sudah dilengkapi dengan pendidikan SMP-IT khusus putri. Latar belakang pembukaan SMP khusus putri untuk mewadahi dan mengimbangi permintaan masyarakat dan materi yang dipersiapkan khusus untuk kelas putri. Pendirian SMP-IT ini pun dengan persetujuan tetua pesantren, yang diusulkan oleh salah satu menantu, suami dari salah satu putri pemilik pondok pesantren. Selain memang garisnya dari putra pemilik pesantren yang berjenis kelamin putri, maka mendirikan sekolah putri pun mendapatkan sambutan dan ijin dari orang tuanya. Di samping itu juga karena didukung oleh

suaminya yang selain berlatar belakang pendidikan universitas umum juga sebagai pelengkap penguasaan ilmu keagamaan menuntut ilmu ke negeri Yaman, selepas menyelesaikan sarjananya. Setelah mereka dipertemukan rupanya mempunyai keinginan untuk mengasuh sebuah SMP-IT khusus putri. Animo peminatnya pun langsung menggembirakan, tidak saja dari sekitar Mranggen, tetapi juga dari luar Mranggen.

Keleluasaan mengembangkan atau mendirikan jenis maupun bentuk pengajaran di lingkungan Pesantren Futuhiyyah mempunyai satu maksud. Yakni bahwa hal yang mungkin bisa diterapkan di pondok pesantren lain adalah sistem pengelolaan yang tetap terpadu dalam satu yayasan, tetapi boleh mendirikan sekolah atau madrasah sendiri di antara para cucunya dengan ijin dan kompetensi positif, sehingga tidak terjadi perebutan posisi pengasuh pondok pesantren.⁷

Strategi seperti tersebut di atas terbukti mampu menghindari konflik atau perpecahan atas siapa yang berhak mewarisi pengelolaan pesantren, namun justru sebaliknya mampu memperkuat keberadaan pesantren dengan diversifikasi usahanya. Misalnya sejak pertama yang dikembangkan adalah pengajaran melalui pesantren dengan sistem *sorogan*, berlanjut ke sistem klasikal sampai saat penelitian dilakukan mencoba mengembangkan SMP-IT khusus putri. Semua usaha tersebut dilakukan dalam satu kompleks besar Yayasan Futuhiyyah Mranggen dengan perbedaan pengasuh dan pemilik yang merupakan anak-anak dan cucu dari pendiri Pesantren Futuhiyyah Mranggen.

Ekologi Ruang, Posisi, dan Peran Mranggen

Sebagaimana perkembangan kota besar atau metropolitan seperti Semarang, tentu memerlukan pinggiran dalam hal ini yang berbatasan langsung adalah Kecamatan Mranggen sebagai kota penyangga perkembangan wilayahnya. Sebaliknya Kecamatan

⁷Wawancara dengan salah satu pendiri SMP khusus putri, (Gus Ilimi) pada tanggal 26 Juni 2012.

Mranggen merupakan fenomena yang tidak lepas hubungan atau interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam jaringan ekonomi, perdagangan dan jasa terhadap Kota Semarang.

Kota Semarang mempunyai daya tarik karena mempunyai dua simpul pusat perdagangan komoditas non pertanian, yakni Pelabuhan Tanjung Mas yang merupakan pusat distribusi barang-barang elektronik, dan pasar Johar yang merupakan pusat distribusi sandang. Di dukung oleh prasarana jalan Semarang – Purwodadi yang cukup memadai, maka semakin memperlancar arus penyebaran barang-barang komoditas non pertanian tersebut. Sebaliknya Kota Semarang juga sangat tergantung akan pasokan barang-barang hasil pertanian dari Kecamatan Mranggen. Gambaran peta seperti tersebut di bawah ini menunjukkan bagaimana posisi Kecamatan Mranggen:

Gambar 1
Peta Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak



Sumber: <http://www.demakkab.go.id/index.php/tentang-demak/wilayah-administrasi/197-kecamatan-mranggen>, diakses 9 Nopember 2012.

Berdasarkan UU no 13/1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Demak ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Demak terdiri atas 14 kecamatan, yaitu kecamatan Demak, Wonosalam, Karangtengah, Bonang, Wedung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Mranggen, Karangawen dan Kebonagung, yang dibagi lagi atas sejumlah 243 desa dan 6 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Demak.

Kecamatan Mranggen yang merupakan salah satu wilayah kecamatan di bawah Kabupaten Demak, terletak berbatasan dengan Kota Semarang di sebelah baratnya sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang (Ungaran). Memiliki luas 7.222 ha (8.05% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Demak). Jumlah penduduk kecamatan Mranggen terbanyak di Kabupaten Demak, yaitu sebesar 159.832 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.143 orang/Km².⁸ Berikut tabel tentang luas desa-desa di Kecamatan Mranggen:

Tabel 1
Luas Masing-Masing Desa di Kecamatan Mranggen

No.	Desa	Luas (Km ²)
1.	Banyumeneng	6,96
2.	Sumberrejo	8,89
3.	Kabonbatur	4,77
4.	Batursari	6,57
5.	Kangkung	5,15
6.	Kalitengah	3,39
7.	Kembangarum	3,80
8.	Mranggen	2,60
9.	Bandungrejo	2,05
10.	Brumbung	1,68
11.	Ngemplak	2,04
12.	Karangsono	2,13
13.	Tamansari	2,53
14.	Menur	3,37

⁸<http://www.demakkab.go.id/index.php/penduduk>, diakses 9 Nopember 2012.

No.	Desa	Luas (Km ²)
15.	Jamus	2,80
16.	Wringinजार	3,29
17.	Waru	2,40
18.	Tegalarum	4,21
19.	Candisari	3,58
Jumlah		72,21

Sumber: BPS Kabupaten Demak

Dari data tabel di atas diketahui semakin dekat aksesnya ke jalan Semarang-Purwodadi, maka semakin mudah pula mendapatkan aksesibilitas hal-hal yang lain yang ada di Kota Semarang, begitu juga sebaliknya. Misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan maupun berbagai kegiatan ekonomi.

Karena letak Kecamatan Mranggen sangat dekat dengan Kota Semarang, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat Mranggen telah membaaur dengan kehidupan masyarakat Kota Semarang. Kondisi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa masyarakat Mranggen merupakan masyarakat 'campuran' antara masyarakat yang bercorak pedesaan dengan masyarakat yang bersorak perkotaan. Beberapa ciri-cirinya bisa dilihat dari tingkat mobilitasnya yang cukup tinggi ke Kota Semarang, terutama tumbuhnya permukiman yang berbentuk perumahan-perumahan yang dikembangkan oleh investor. Sebagai contohnya adalah Perum Perumnas Pucang Gading yang dikembangkan di daerah Desa Batusari dan Kebonbatur seluas 224,36 ha, sampai dengan tahun 2004 rata-rata perkembangan perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian adalah sebesar 1,29%. Ciri yang lain adalah mulai bergesernya kehidupan masyarakat Mranggen dari yang bersifat agraris ke kehidupan perdagangan dan jasa, juga industri non pertanian. Menurut data BPS pada tahun 2004, rata-rata pergeseran tersebut sebesar 8% sejak tahun 1999-2004. Kondisi ini ditunjang oleh posisinya yang strategis sebagai jalur alternatif Pantura ke Jawa Timur serta sebagai penghubung dengan jalan regional antara Kota Semarang dengan Kabupaten Purwodadi.

Peran Mranggen sebagai wilayah pendukung kota utama yaitu Kota Semarang menjadikan Mranggen mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan wilayah regionalnya. Sementara dalam pengembangan wilayah Kabupaten Demak, Mranggen berperan sebagai kota pusat pengembangan Sub Wilayah Pengembangan dua dan dalam pengembangan wilayah kecamatan, kota Mranggen ini berperan sebagai ibukota kecamatan.

Menurut hasil penelitian Sunartono dan Widodo dalam Suprpta (2006: 17), adanya interaksi desa dan kota dapat dilihat dari homogenitas kehidupan desa yang semakin berkurang, berubahnya mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, berubahnya fungsi lahan pertanian untuk perumahan dan industri, meningkatnya laju migrasi desa-kota dan komuter, meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, serta berubahnya fungsi desa sebagai sumber bahan makanan dan sayuran.

Dalam kenyataannya memang wilayah perkotaan seringkali melewati batas-batas administrasinya. Keberadaan pusat kota telah mendorong terjadinya perubahan pada wilayah sekitarnya menjadi berbagai macam penggunaan lahan terutama untuk perumahan. Pertumbuhan perumahan ke arah luar kota atau pinggiran memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan dan keterhubungan atau interaksi, bahkan dimungkinkan kesempatan memperoleh mata pencaharian tambahan karena letaknya yang sangat berdekatan dengan kota.

Reid sebagaimana dikutip oleh Nas (2007) menunjukkan keyakinannya terhadap peran penting dari para tenaga buruh sebagai kekayaan yang sangat berharga di kota-kota Indonesia lama. Sebagai konsekuensinya denah kota-kota tersebut tidak ditentukan oleh pembatasan ruang berdasarkan mekanisme harga tanah seperti yang berlaku pada masa sekarang, tetapi pada bagaimana hubungan-hubungan itu dijalin dan dipertahankan dan hanya berpengaruh secara tidak langsung terhadap pembagian ruang. Fokusnya ditempatkan oleh kekuasaan di pusat kota dengan hubungannya bersifat konsentris dan

menjauh sampai di daerah pinggiran/periferi, sehingga memperoleh ruang yang kokoh sebagai kumpulan-kumpulan pemukiman terpisah yang berada di tengah-tengah alam. Kondisi ini menjadikan kota lama tumbuh menjadi besar (Nas, 2007: 302). Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kecamatan Mranggen yang berada di pinggiran kabupaten Demak yang memang mempunyai corak kota lama yang konsentris dengan pusat kerajaan sebagai center-nya.

Saat ini kecamatan Mranggen dipimpin oleh seorang Camat yang asli dari Demak. Sebagai generasi muda lulusan Universitas Diponegoro ini berbekal niat yang kuat dalam menata dan membangun Mranggen. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan jarak hanya 13 km, sementara ke pusat Kabupaten Demak justru berjarak 25 km, merupakan modal yang strategis dalam pengembangan wilayahnya. Modal sosial lain adalah pondok pesantren tertua yakni Pondok Pesantren Futuhiyyah yang sudah menghasilkan alumni yang berkiprah di berbagai bidang kehidupan, meskipun di sisi lain juga masih dihadapkan pada stigma sebagai wilayah hitam karena banyak pencurian sepeda motor dengan frekuensi yang sangat tinggi, disebutkan 2 motor per hari. Selain itu diakui pula bahwa penghuni RSJ Semarang lebih banyak usia anak-anak, tingkat perceraian yang cukup tinggi dan banyaknya pasangan yang akan menikah sudah dalam kondisi “bermasalah”.⁹

Sepintas bisa dikatakan bahwa terdapat budaya pesantren yang berbasis Islam dan budaya yang bersifat kapitalis yaitu buruh yang selalu terhimpit kehidupan rutin dan daerah *slum*. Hal ini menjadikan Mranggen menjadi wilayah yang transisi antara wilayah urban dan rural. Belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai baru, tetapi sedikit bergeser dari nilai yang lama. Bisa saja ini dikarenakan kuatnya posisi Pondok Pesantren Futuhiyyah dalam mempengaruhi masyarakat sekitarnya melalui nilai-nilai pesantrennya. Sehingga masyarakat tetap

⁹Wawancara dengan Camat Mranggen pada tanggal 27 dan 29 Juni 2012.

memegang teguh nilai-nilai pesantren tersebut dalam setiap aktivitas kehidupannya baik dalam perdagangan maupun bidang-bidang lain, misalnya simpan pinjam yang bersistem syariah. Menurut konsep Bax (1997) sebagaimana dikutip oleh Peeters dalam Wertheim (1958: 143), kekuatan religius dapat diuraikan sebagai suatu konstelasi banyak atau sedikitnya formalisasi institusional pada hubungan saling ketergantungan, legitimasi ide-ide religius dan anjuran yang bersifat religius. Dalam hal ini Pondok Pesantren Futuhiyyah menunjukkan pengaruh yang lebih di dalam nilai-nilai kepesantrenan yang berbasis Islam di dalam kehidupan masyarakatnya.

Meskipun di satu sisi arus keterbukaan akibat globalisasi menjadi agak sulit dibendung juga di lingkungan pondok pesantren tersebut. Hal ini diakui oleh salah satu pengurus dan pengasuh ketika dilakukan penelitian lapangan,¹⁰ misalnya fasilitas internet yang dibatasi di lingkungan pondok pesantren kadang-kadang mempengaruhi jumlah santri yang mau tinggal mondok di pesantren, jika memungkinkan untuk dilajo akan memilih untuk pulang pergi. Di rumah lebih dimungkinkan untuk bisa akses internet secara bebas dibandingkan dengan jika tetap tinggal di pondok pesantren, selain ada pembatasan juga adanya jadwal kajian materi keagamaan yang padat. Ditambah semakin banyak dan mudahnya fasilitas transportasi yang murah seperti sepeda motor dan trans Semarang. Pandangan hidup keduniawian semakin menonjol di lingkungan pesantren, dan uniknya para kyainya semakin bergairah dalam menghadapi tantangan proses modernitas.

Mempunyai jumlah penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Demak bisa jadi merupakan modal potensial yang bisa dikembangkan. Beberapa alasan yang tidak bisa dilupakan adalah terdapatnya Pondok Pesantren Futuhiyyah yang merupakan pondok pesantren tertua. Santri yang mukim di pondok tersebut berasal dari berbagai wilayah Mranggen bahkan banyak juga yang berasal dari luar Pulau Jawa. Di samping itu

¹⁰Wawancara dilakukan saat penelitian lapangan pada tanggal 26 Juni 2012.

adanya perluasan Kota Semarang, sehingga memerlukan ruang untuk pemukiman penduduknya, mulai bergeser ke arah pinggiran termasuk Mranggen sebagai wilayah yang berbatasan langsung. Fasilitas transportasi trans Semarang yang rutenya sampai perbatasan dengan Mranggen, sehingga memudahkan penduduk yang bekerja di Semarang tetapi tempat tinggal di Mranggen. Berbagai keterkaitan semacam itu baik keterkaitan infrastruktur transportasi, pelayanan kesehatan maupun pendidikan pernah diteliti dalam sebuah tesis untuk mendapatkan gelar master di Universitas Diponegoro, Semarang.

Supermarket seperti Giant juga sudah terbangun di kawasan dekat terminal Penggaron yang terletak di pinggiran Semarang dan perbatasan dengan kecamatan Mranggen. Di kawasan tersebut juga ada restoran cepat saji yang merupakan produk luar. Sementara di pinggir jalan sepanjang pasar Mranggen terdapat warung-warung makan yang melayani para santri maupun masyarakat sekitar. Kondisi keduanya tentu saja sangat jauh berbeda, baik fasilitasnya apalagi harganya. Desentralisasi penyediaan fasilitas-fasilitas penting seperti *supermarket*, rumah sakit, bank dan pasar ke kawasan pinggiran lebih umum dilakukan oleh pihak swasta, sehingga mampu mengurangi ketergantungan penduduk pinggiran dalam mengkonsumsi fasilitas ke Semarang. Di sisi lain bisa mendorong terbentuknya struktur pelayanan fasilitas kota yang sesuai dengan jarak atau waktu rata-rata berdasarkan standar yang harus ditempuh dalam memperoleh pelayanan fasilitas di suatu kota.

Demikian pula prasarana jalan, dari arah Semarang sampai dengan terminal Penggaron yang masuk wilayah Semarang kondisi jalan rayanya sangat halus dan luas, namun begitu masuk wilayah Mranggen lebar jalan menyempit apalagi di sepanjang pasar serta kondisinya pun tidak terlalu mulus. Nampak perbedaan yang mencolok begitu memasuki wilayah Mranggen ini, macet dan penuh sesak, sebaliknya ketika dari arah Mranggen akan ke Semarang begitu melintas perbatasan terminal Penggaron akan merasa terbebas dari kemacetan dan kesesakan jalanan. Seperti menemukan angin segar ketika memasuki wilayah Semarang. Mranggen bisa dipandang sebagai

wilayah pedesaan yang tercakup dalam perluasan kota, khususnya dari perluasan Kota Semarang, dengan asumsi pokok penghuninya kekurangan atribut modernitas, mempunyai ruang yang bercampur baur dan bermasalah atau problematis, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan dari Negara. Biasanya kebijakan yang diambil diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, peningkatan taraf hidup hingga membuat keberadaan wilayah tersebut tertata (Basundoro, 2007: xii-xiii).

Penelitian Suprpta (2006:53) memperlihatkan bahwa Kecamatan Mranggen mempunyai tiga keterkaitan dengan Kota Semarang, yakni keterkaitan pelayanan sosial, keterkaitan fisik dan keterkaitan ekonomi. Hal yang melatarbelakangi penelitian tersebut didasarkan pada pendapat Rondinelli (1985: 142-148) sebagaimana dikutip oleh Suprpta, bahwa interaksi keruangan dalam perencanaan pembangunan wilayah meliputi tujuh keterkaitan, yaitu keterkaitan fisik (*physical linkages*), keterkaitan ekonomi (*economic linkages*), keterkaitan pergerakan penduduk (*population movement linkages*), keterkaitan teknologi (*technological linkages*), keterkaitan sosial (*social linkages*), keterkaitan pelayanan sosial (*service social linkages*) dan keterkaitan administrasi, politik dan kelembagaan. Tabel di bawah ini menunjukkan ketiga keterkaitan tersebut dengan indikator-indikatornya:

Tabel 2
Keterkaitan Kecamatan Mranggen Terhadap
Kota Semarang dan Indikator-indikatornya

No.	Jenis Keterkaitan	Unsur yang dilihat	Indikator
1.	Keterkaitan pelayanan Sosial	Keterkaitan pelayanan fasilitas penduduk dalam pendidikan dan kesehatan.	Pola interaksi dan frekuensi rumah tangga dalam mendapatkan fasilitas pelayanan sosial
2.	Keterkaitan fisik	Keterkaitan jaringan jalan terhadap aktivitas penduduk	Sistem infrastruktur jaringan jalan antara desa dengan kota

No.	Jenis Keterkaitan	Unsur yang dilihat	Indikator
			dan kualitas jaringan jalan
3.	Keterkaitan ekonomi	Aliran barang	Pola aliran barang produksi rumah tangga yang dihasilkan (pertanian dan perdagangan) Pola perdagangan Pola Pemasaran

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibaca bahwa keterkaitan pelayanan sosial akan didapat oleh masyarakat Mranggen berupa fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pada saat penelitian lapangan banyak mahasiswa yang melajo (komuter) dari daerah Mranggen ke Kota Semarang, dengan fasilitas transportasi yang semakin mudah diakses sebagai wujud keterkaitan fisik yaitu bis trans Semarang. Dengan dukungan prasarana jalan yang semakin baik, maka jarak yang dulunya terkesan jauh menjadi semakin terjangkau oleh masyarakat. Keterkaitan ekonomi, bisa dilihat dari daya tarik Kota Semarang sebagai pusat distribusi komoditas non pertanian dan mempunyai pusat perbelanjaan baik modern (*mall*) maupun tradisional (pasar), maka banyak warga Mranggen yang menikmati kemudahan tersebut. Berdirinya berbagai pusat perekonomian di Kota Semarang juga menjadi daya tarik bagi warga Mranggen untuk mengadu nasib menjadi tenaga kerja di sektor tersebut.

Apa yang seharusnya kecamatan Mranggen lakukan dengan kondisi tersebut, tentu harus melihat kemampuan modal sosialnya baik itu berupa sumber daya alamnya, sumber daya manusianya ataupun institusi religius yang bisa menanamkan nilai dan etos kerja yang tinggi sehingga mampu membuat Mranggen bangkit. Menurut pengamatan sebenarnya ada modal semangat yang tinggi dari pihak kecamatan karena sumber daya manusianya cukup mumpuni dan merupakan kalangan generasi muda. Pejabatnya merupakan pegawai negeri (PNS), bukan jabatan politis, sehingga lebih berdedikasi dan mempunyai

otoritas yang mandiri. Hal ini penting agar bisa menjadi agen perubahan yang matang, mau mendengar generasi tua yang mempunyai pengalaman tetapi juga mampu mengakomodasi generasi muda yang cenderung berbeda pandangan dengan generasi tua. Kemampuan memadukan keduanya, justru akan merupakan kekuatan yang hebat.

Di satu sisi, Pondok Pesantren Futuhiyyah sebagai institusi religi yang masih menjaga tradisi pesantren juga sudah mengakomodasi perubahan. Banyak penulis yang menguraikan pesantren selalu lekat dengan aspek tradisional dan konservatisme, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa sudut pandangan agama pesantren masih terbelenggu dalam bentuk pikiran dan aspirasi para kyai generasi tua dan mempunyai kecenderungan untuk mundur, ketinggalan zaman dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat sekitarnya. Pengasuh dan pendiri SMP khusus putri di lingkungan Pondok Pesantren Futuhiyyah selain telah menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto juga melanjutkan pendidikan agama ke Yaman. Perubahan ini menjadi kekuatan baru berupa staf pengajar yang terdidik lebih baik. Upaya memadukan ilmu pengetahuan modern (termasuk sains dan teknologi) sangat diperlukan, sehingga para alumninya mempunyai pengetahuan yang lengkap merupakan perpaduan yang serasi dengan tetap memelihara tradisi keilmuan Islam yang dikembangkan oleh para ulama masa lalu.

Data statistik Departemen Agama menunjukkan bahwa sekitar 30% dari 25.000 pesantren pada tahun 2009, masih mengkhususkan pengkajian kitab-kitab karangan ulama klasik. Warna-warni pesantren dari yang tradisional sampai yang modern saling menunjang dan memperindah paduan tradisi dan modernitas dunia pesantren. Dalam rangka memodernisasi isi dan sistem pendidikan lembaga-lembaga pesantren umumnya tetap memelihara hubungannya dengan arus utama tradisi Islam. Para kyai tidak mau membuang kerangka besar tradisi keilmuan, walaupun telah melakukan perubahan-perubahan sangat fundamental dalam bidang-bidang aktivitas sosial dan intelektual, cara

hidup, kebiasaan-kebiasaan sosial, dan dalam aspirasi profesional (Dhofier, 2011: 164-165).

Perlu dipahami pula kecenderungan para santri yang masuk pesantren tidak semuanya berniat menjadi ulama, sehingga tidak perlu mempelajari bahasa Arab dan kitab-kitab Islam klasik dalam bahasa Arab. Bagi santri yang demikian cukup mengikuti latihan kehidupan beberapa bulan di pesantren dan mempelajari Islam yang ditulis dengan bahasa Indonesia akan cukup memadai. Sebagian besar waktunya di pesantren akan lebih bermanfaat bila dipakai untuk belajar berbagai pengetahuan dan ketrampilan praktis. Sementara pengajaran bahasa Arab untuk memahami kitab-kitab asli berbahasa Arab diterapkan pada santri dengan jumlah yang terbatas yang memang akan dipandu untuk menjadi ulama (Dhofier, 2011: 164-165).

Berikut keadaan santri atau peserta didik di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen sebagaimana data yang tersedia dari tahun ajaran 1991/1992 sampai dengan tahun 2000:

Tabel 3
Keadaan Santri atau Peserta Didik
Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen

No.	Tahun Ajaran	Jumlah Santri
1.	1991/1992	3.310 orang
2.	1992/1993	3.390 orang
3.	1993/1994	3.350 orang
4.	1994/1995	3.450 orang
5.	1995/1996	3.515 orang
6.	1996/1997	3.755 orang
7.	1997/1998	3.850 orang
8.	1998/1999	3.897 orang
9.	1999/2000	4.179 orang

Sumber: Sejarah Seabad Pondok Pesantren
Futuhiyyah Mranggen, h.82

Terbaca dari tabel tersebut dari tahun ke tahun ajaran selalu menunjukkan adanya kenaikan jumlah santri. Jika terjadi penurunan

jumlah pada tahun ajaran 1993/1994 lebih dikarenakan banyak santri yang jarak rumah dan pesantren dekat, sehingga tidak terhitung sebagai santri menetap. Santri demikian sering dikenal dengan *santri kalong*, mereka melajo tidak ikut menetap di pesantren.

Asal daerah santri meliputi Jawa dan luar Jawa, dengan 65% merupakan santri mukim di pondok pesantren dan selebihnya melajo dari daerah masing-masing. Mempunyai 297 pengajar dari berbagai disiplin ilmu dan 45 orang tenaga administrasi yang membantu kelancaran roda organisasi dan yayasan yang masing-masing berasal dari para alumni pondok pesantren Futuhiyyah. Mencakup 13 pendidikan formal (Diniyah Awaliyah, TPQ, TK, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan Fakultas Syariah I.I.W.S), 3 pendidikan non formal (pengajian Al-Qur'an, pengajian kitab-kitab klasik dan pengajian khusus/kilat) dan pengajian khusus thoriqoh serta pendidikan tinggi Thoriqoh Qodiriyyah wa Naqsyabandiyyah (Jabar, ed., 2001: 80-81).

Di sisi lain, secara fisik posisi kecamatan Mranggen yang berada di lintasan jalur alternatif ke Jawa Timur, seharusnya dihidupkan dengan berbagai fasilitas yang memadai, sehingga mampu mengurangi beban jalur pantura yang cukup padat. Penghidupan jalur alternatif akan memacu pertumbuhan ekonomi warga yang berada di lintasan jalur tersebut, dengan membuka usaha penginapan, warung makan maupun fasilitas umum seperti pom bensin, tempat ibadah dan sanitasi umum. Pengelolaan produk-produk unggulan baik yang bersifat sumber daya alam maupun sektor jasa, juga akan memacu munculnya keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) daerah.

Perencanaan dan pemanfaatan ruang untuk berbagai fasilitas dan pelayanan publik sekaligus juga akan memberikan pelayanan bagi masyarakat Mranggen sendiri, di samping bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik para pelintas yang melewati Mranggen. Masjid merupakan nilai budaya yang penting bagi wilayah Demak di mana Mranggen merupakan bagian didalamnya, yang mempunyai sebutan sebagai kota wali, sehingga penanda tersebut bisa dijadikan monumen (Wertheim,

1958: 32) yang menandai wilayah ini sekaligus menjadi fasilitas ibadah bagi publik. Dengan berbagai keunggulan identitas kota wali, pondok pesantren bisa juga dimanfaatkan sebagai ruang wisata ruhani atau ruang wisata studi banding pendidikan. Pada saat penelitian lapangan dilakukan Pesantren Futuhiyyah kedatangan tamu dari berbagai sekolah Islam asal Jakarta yang berjumlah sekitar 250 siswa dan guru untuk mengadakan studi banding. Hal ini menunjukkan sebagai pesantren tua Futuhiyyah mempunyai nilai strategis tersendiri.

Sesuai dengan tata ruang suatu wilayah hendaknya mempunyai peta skematis. Peta skematis nilai tanah relatif mudah digambarkan dengan parameter sederhana, pertama, ada daerah pusat perkotaan yang sudah dikembangkan menjadi daerah usaha yang besar, jarak relatif dari pusat kota dan jaringan jalan, termasuk lebar dan mutu jalan tersebut apakah diaspal atau tidak sangat penting. Kedua, jenis hak penggunaan tanah yang berlaku bagi penghuni setempat hak milik atau hak girik juga banyak memberikan perbedaan. Hak milik tanah adalah hak pemilikan tanah yang diakui dan dicatat oleh BPN, sementara hak girik adalah hak atas tanah yang tidak tercatat ataupun tidak diakui oleh BPN (Dorlean dalam Grijns, 2007: 272). Dengan jelasnya peta skematis akan membantu perencanaan dan peruntukan ruang bagi pembangunan dan pengembangan kota. Dalam sisi ini Kecamatan Mranggen belum menunjukkan penataan yang serius bahkan terkesan belum disentuh dengan kebijakan. Secara tersirat justru kurang percaya diri ketika dikonfirmasi tentang potensi mengembangkan jalur alternatif dikarenakan berkembang pesatnya wilayah Kota Semarang yang posisinya sangat dekat dengan Kecamatan Mranggen. Berikut pernyataan pejabat Kecamatan Mranggen: "... apanya yang mau dikerjakan di Mranggen, secara pelintas jalan sudah kenyang di Semarang, sehingga sampai Mranggen tinggal tidur".

Tarekat sebagai Jaringan yang Menyatukan

Bahasan ini diajukan sebagai renungan atau refleksi bagaimana suatu jaringan tarekat bisa dimanfaatkan sebagai modal sosial yang mampu memberikan solusi atau setidaknya mewadahi perubahan sosial

yang terjadi pada masyarakat. Wadah jaringan ini bisa mempersatukan segala lapisan masyarakat sebagai penganut tarekat dari berbagai wilayah baik di sekitar pesantren maupun dari luar pesantren. Di samping itu bisa juga dimanfaatkan sebagai ajang mengkomunikasikan berbagai kebijakan maupun peraturan yang akan diterapkan di masyarakat. Apalagi dengan sifat organisasinya yang tidak memandang kaya atau miskin, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa, bahkan berpendidikan atau tidak yang penting mempunyai niat dan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Begitu kompleks latar belakang para anggota suatu tarekat tersebut akan merepresentasikan masyarakat sesungguhnya.

Salah satu kajian yang menjadi unggulan di Pondok Pesantren Futuhiyyah adalah tarekat aliran Qodiriyah wa Naqsyabandiyah. Berasal dari kata “*thariqah*” yang berarti umum “jalan” atau lebih lengkapnya “jalan menuju surga”. Para pengikutnya saat melakukan amalan berusaha mengangkat dirinya melampaui batas-batas kediriannya sebagai manusia dan mendekatkan dirinya ke sisi Allah SWT. Sering dipersamakan dengan tasawuf, yaitu dimensi esoterik dan aspek yang mendalam agama Islam. Sementara dalam arti khusus tarekat sering diartikan sebagai “organisasi tarekat”, yaitu kelompok organisasi dalam lingkungan Islam tradisional yang melakukan amalan-amalan dzikir tertentu dan menyampaikan suatu baiat yang telah ditentukan lafadznya oleh pimpinan tarekat (Dhofier, 2011: 212).

Globalisasi, pertumbuhan ekonomi dan revolusi berbagai bidang tidak mendorong pada peminggiran tarekat, tetapi justru sebaliknya meningkatkan keunggulan sosial dan politiknya. Tarekat merasakan tekanan untuk melakukan rasionalisasi dan mengadopsi bentuk organisasi formal yang dalam beberapa hal justru memunculkan partai atau perkumpulan politik. Sehingga tidak jarang tarekat menjadi kekuatan yang potensial yang menarik bagi penguasa untuk menarik orang-orangnya sebagai birokrat atau organisatoris (Bruinessen, 2008: 187-188).

K.H. Muslich Abdurrahman yang masih merupakan generasi kedua merupakan guru tarekat Qodiriyyah wa Naqsyabandiyyah di pondok pesantren Futuhiyyah. Sementara aliran ini berasal dari Syekh Khatib Sambas yang berhasil menggabungkan ajaran dua tarekat, yaitu Tarekat Qodiriyyah dan Tarekat Naqsyabandiyyah. Menurut Sartono Kartodirdjo tarekat tersebut merupakan sarana yang sangat penting bagi penyebaran Islam di Indonesia dan Malaysia dengan pusat-pusatnya di Mekah antara pertengahan abad ke-19 dan perempat abad ke-20. Beliau, Syekh Khatib Sambas adalah seorang yang menguasai berbagai cabang pengetahuan Islam, bahkan dianggap melebihi teman-temannya yang datang dari Hindia Belanda karena kedudukan tertingginya sebagai pemimpin Tarekat Qodiriyyah di Mekah. Bukunya *Fath Al-'Arifin* cukup masyhur dan menjadi bacaan bagi pengamal tarekat di wilayah Asia Tenggara, merupakan pedoman praktis yang menguraikan dasar-dasar ajaran praktik dzikir (Dhofier, 2011: 131, 129).

Saat ini lima organisasi tarekat di Indonesia yang masih merupakan tarekat yang paling berpengaruh dan memiliki puluhan ribu pengikut adalah Tarekat Qodiriyyah wa Naqsyabandiyyah dengan pusat-pusatnya sebagai berikut:

- (1) Pesantren Pegentongan di Bogor
- (2) Suralaya di Tasikmalaya
- (3) Pesantren Mranggen di Demak
- (4) Pesantren Bejosa di Jombang
- (5) Tebuireng di Jombang (Dhofier, 2011: 135).

Sebagai orang yang selalu di jalan Allah, para guru tarekat selalu berusaha patuh kepada ajaran Nabi SAW. Agama Islam terdiri dari tiga tingkatan yaitu, Islam, iman dan ihsan. Orang yang telah mengaku Islam sebagai agama selalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir Tuhan dan disebut muslim. Tetapi tidak setiap muslim bisa disebut mukmin, iman merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari pada sekedar muslim, karena iman berarti ketaatan dan ketertarikan hubungan yang terus menerus kepada Tuhan. Sedangkan ihsan merupakan kemampuan untuk menembus yang lebih tinggi ke dalam

wahyu ke-Tuhanan, hanya diberikan kepada orang tertentu saja. Ihsan sering juga dikaitkan dengan ikhlas, yakni keikhlasan mengabdikan kepada Tuhan dengan cara melaksanakan amalan-amalan ibadah. Para guru tarekat juga menekankan pentingnya sholat dan dzikir sebagai cara utama dalam peningkatan kehidupan spiritual, agar melepaskan ketertarikan kepada kehidupan duniawi dan menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk Allah yang harus selalu mendekatkan diri sebagai hamba Allah SWT. Para guru juga memberikan keyakinan bahwa tarekat merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari aspek hukum maupun aspek tauhid (Dhoffer, 2011: 225-227).

Banyaknya alumni Pondok Pesantren Futuhiyyah yang sudah berkiprah di berbagai bidang kehidupan memberikan gambaran atau bukti bahwa pondok pesantren tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hal yang menarik adalah ketika ada forum khaul kyainya misalnya, para alumni akan sangat bersemangat untuk hadir, karena rata-rata mereka merindukan suasana dan tradisi yang telah mereka tinggalkan setelah memasuki berbagai bidang kehidupan. Acara tersebut tidak pernah sepi dan selalu membludak pesertanya.¹¹ Banyak juga yang merindukan kelas *sorogan* maupun *bandongan*, sekaligus *batsaul masail* dalam pengkajian kitab-kitab klasik. Melalui *batsaul masail* akan tercerahkan pemikiran maupun wawasan para santri, karena pada tataran tersebut para santri diperkenankan berdebat dengan para kyainya langsung tentang suatu kitab atau pemikiran. Para pesertanya biasanya santri yang sudah mencapai level tinggi, sehingga ketika dihadapkan pada bahan bacaan yang akan dibahas pada *batsaul masail*, para santri umumnya tidak merasa keberatan. Kesempatan ini merupakan ajang latihan berpikir dan mengembangkan wacana yang para santri pelajari selama di pesantren. Selanjutnya para santri pun mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat yang akan para santri temui ketika mereka sudah memasuki dunia kerja maupun kehidupan di luar pesantren.

¹¹Wawancara dengan beberapa alumni dan staf yayasan saat penelitian lapangan, 26 Juni 2012.

Di sisi lain pesantren pun perlu umpan balik dari para alumninya untuk tetap bisa berkembang sesuai dengan harapan masyarakat. Sejarah intelektual para kyai pendiri pesantren ini bermula dari hubungan surat menyurat maupun mengadakan hubungan langsung dengan para ulama di Arab Saudi. Para kyai menurut hasil studi Prof. Johns sebagaimana dikutip oleh Dhofier (2011: 129) sering mengundang para ulama dari India dan negeri-negeri Arab dengan membawa buku-buku tafsir, fiqh dan lain-lain pada abad k-16 dan ke-17.

Namun pada abad ke-19 pesantren-pesantren di Jawa dapat meluluskan ulama yang mencapai taraf internasional, bahkan banyak dari mereka yang menjadi guru besar di Mekah dan Madinah. Kemudian yang menjadi unik, para pelajar dari tanah air melanjutkan pendidikannya ke sana dengan berkelompok memilih guru yang berasal dari Indonesia. Para pelajar tersebut kemudian menjadi para ulama pada abad ke-20 (Dhofier, 2011: 129).

Refleksi Teoritis

Teori interaksi pusat pinggiran (*core periphery interaction*) yang dikembangkan oleh Hirschman dan Friedman memaparkan bahwa pusat digambarkan sebagai area yang mempunyai kemampuan dan kapasitas yang tinggi untuk membangkitkan dan melakukan perubahan inovatif. Sementara pinggiran merupakan daerah pelengkap yang tergantung pada pusat wilayah dan sebagian pembangunannya ditentukan oleh intitusi pemerintah pada pusat wilayah. Penyebaran pembangunan dari pusat ke pinggiran berlangsung sebagai proses kasusasi kumulatif berdasarkan kekuatan-kekuatan *spread effect* dan *backwash effect* (Suprpta, 2006: 44).¹²

¹²Kekuatan *backwash effect* disebabkan oleh data tarik pusat-pusat wilayah terhadap daerah belakangnya, sementara *spread effect* yang merupakan *counter* dari *backwash effect* mengasumsikan bahwa dengan semakin tumbuhnya daerah kaya, maka akan semakin bertambah permintaan terhadap produk yang di daerah miskin belakang tersebut (Suprpta, 2006: 45).

Akar fungsionalisme dapat ditemukan dalam pandangan Durkheim yang mempunyai jejak sangat berarti dalam pemikiran kontemporer. Prinsip utamanya adalah: (1) kekuatan-kekuatan sosial yang memberikan paksaan eksternal pada individu-individu; (2) individu-individu ini sendiri terorganisir secara hirarkhis oleh kekuatan-kekuatan tersebut (Troung sebagaimana dikutip oleh Ismail, 2008: 10). Menekankan pada kekuatan institusional sebagai instrumen yang paling penting dalam menentukan arah kebudayaan, sebagaimana Berger uraikan bahwa institusi tidak hanya mengatur, membuat regulasi, tetapi juga melakukan kontrol terhadap perilaku masyarakat.

Dalam konteks Pondok Pesantren Futuhiyyah dapat memberikan paksaan internal kepada anak didiknya atau santrinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan konstruksi yang dipilih. Santri secara otomatis diproyeksikan dalam sistem pembelajaran yang telah diatur sedemikian rupa. Perilaku masyarakat di sekitarnya akan ditentukan pula oleh nilai-nilai dominan yang dibangun oleh pondok pesantren Futuhiyyah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa modernisasi dalam berbagai bidang mengharuskan adanya suatu perubahan. Meski tetap mempertahankan yang tradisional khususnya pada pemikiran yang bersumber pada kitab-kitab klasik, ada sedikit pergeseran yang menunjukkan semakin dinamisnya kehidupan saat ini antara lain kemajuan transportasi semakin mempercepat perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, begitu pula dengan kemajuan teknologi komunikasi yang hampir menghilangkan batas-batas administratif suatu wilayah.

Menurut Geertz, temuannya terhadap kelompok Islam reformis menunjukkan kesamaan dengan apa yang terjadi di Mranggen bahwa yang menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi bukanlah modal, tetapi masalah organisasi. Kemampuan untuk mengarahkan dana dan menyalurkan semangat mereka sedemikian rupa sehingga dapat menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang ada (Geertz 1976 dalam Tirtosudarmo, 2010:151). Hal ini berkaitan dengan

kemauan pemerintah dalam mendukung setiap kebijakan agar mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan modal sumber daya manusia yang mempunyai semangat dan niat yang kuat untuk maju, masyarakat akan mendapatkan panutan dan pelindung yang bisa diandalkan. Kehadiran pondok pesantren yang menjelma sebagai tradisi ritual memberikan kontribusi akan pentingnya solidaritas, paling tidak hadir dalam mengukuhkan semangat yang sudah terhadirkan di masyarakat.

Pada umumnya tidak ada perasaan maju secara kolektif adalah sesuatu yang wajib dan merupakan panggilan keagamaan di lingkungan pondok pesantren. Sikap yang tampak mewujud biasanya secara pribadi atau individu yang serba tidak percaya diri. Belum muncul semangat saling membantu, kecuali dalam tradisi yang memang sudah diatur dan ditetapkan. Menurut Hefner, budaya publik bukanlah hal yang sama seperti subyektivitas individu dan bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi minat, pertimbangan dan watak seseorang. Ketika datang dari lingkungan serupa, anggota-anggota masyarakat yang sama dapat terlihat dan menerapkan tradisi mereka dalam berbagai cara yang berlainan, dan bahkan bertentangan (Hefner 1998 dalam Tirtosudarmo, dkk, 2010: 152).

Tarekat sebagai suatu formasi diskursif mencakup sejumlah asumsi integral tentang penolakan dunia, otoritas spiritual dan kedekatan dengan Tuhan yang ditemukan secara global dan banyak dimiliki di seluruh dunia Islam, pada saat yang sama terdapat variasi permukaan antar kelompok di setiap lokalitas tertentu (Webner, 2008: 336). Hal ini penting dalam rangka memahami tarekat sebagai suatu jaringan yang bersifat global. Pada titik ini menunjukkan keuniversalan Islam yang dalam titik tertentu justru kadang secara unik menunjukkan kelokalannya karena melekat dalam kebudayaan yang berbeda-beda di tiap wilayah muslim. Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah yang dianut di pondok pesantren Mranggen pun mempunyai jaringan dengan tarekat yang sama di wilayah lain. Dalam konteks ini guru bukan saja menjadi perantara antara murid dengan Tuhan tetapi juga menjadi sumber inspirasi baik dalam pergaulan nasional maupun global.

Pendapat tersebut bukan dalam arti menolak mengakarnya kultus tarekat lokal atau malah cara-cara positif para murid tarekat dalam menerima modernitas. Tetapi perlu dijelaskan logika struktural tarekat yang lebih dalam yang mengandung daya simbolik yang determinan yang membentuk lingkungan kultural tersendiri atau baru.

Penutup

Titik temu antara tradisi dan modernitas, universalisme atau partikularisme, komunitas atau asosiasi sukarela, pengetahuan ilmiah atau esoterik yang sangat kompleks sangat dimungkinkan untuk saling melengkapi dan hidup secara berdampingan. Pesantren-pesantren yang masih mengkhususkan pengkajian kitab-kitab klasik harus tetap dihargai agar paduan antara tradisi dan modernitas berada dalam kondisi seimbang. Pondok Pesantren Futuhiyyah memadukan perubahan ke arah modernis dengan berbagai strategi, termasuk dengan mendirikan sekolah klasikal yang memberikan materi ilmu pengetahuan. Semua ditujukan agar para santri mempunyai pengetahuan iptek modern untuk kesejahteraan dirinya dan masyarakat. Bila pengembangan intelektual dan kreativitas ini dimaksimalkan dan didukung oleh para pengambil kebijakan, maka dari Mranggen akan muncul sumber daya yang akan memperbesar kemampuan di bidang-bidang kehidupan masyarakat.

Mobilitas geografis yang meningkat dan meminggirkan kultus lokal dan ritual berbasis pedesaan justru memperkuat peralihan dari yang berorientasi *abangan* ke orientasi *santri*. Perubahan keagamaan dalam masyarakat umum ini memberikan peluang bagi para birokrat *santri* dapat terberdayakan karena sebelumnya sangat terpinggirkan. Namun dalam kasus penyediaan lokasi tempat kerja penduduk kawasan pinggiran masih berpusat di Semarang, sehingga peranan pusat-pusat pertumbuhan yang ada relatif masih belum berkembang secara optimal. Perlu kerjasama antar pemangku kepentingan baik di Semarang maupun di Mranggen agar tercipta kebijakan yang saling menguntungkan.

Beberapa kerugian akibat penyederhanaan ciri-ciri tarekat dan hakikat kedudukan guru sebagai perantara murid dan Tuhannya, yaitu kurangnya keinginan meneliti secara lebih mendalam ciri-ciri yang sebenarnya dan kadang-kadang menjadi kurang menghargai pandangan dan pikiran para penganut tarekat. Sementara jaringan tarekat bisa dilihat sebagai jaringan yang bisa mempersatukan umat, meski berbeda-beda aliran tarekat tetapi bisa hidup berdampingan dan saling melengkapi.

Mranggen yang letaknya di perbatasan Semarang yang sering diidentikkan dengan korban perluasan Kota Semarang, memerlukan dorongan kebijakan yang lebih memberdayakan. Posisinya yang strategis karena berada di lintasan jalan alternatif menuju Jawa Timur, seharusnya dapat dimaksimalkan, sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Modal sosial jumlah penduduk yang terbanyak di Kabupaten Demak bisa lebih dioptimalkan. Hal ini tentu harus pula diselaraskan dengan citra Demak sebagai Kabupaten yang merupakan hirarkhi pemerintah di atasnya. Kohesi kewilayahan seharusnya berpadu dengan budaya dan kecenderungan perubahan sosial hingga dapat bersinergi dan saling menguntungkan. Keberadaan modal sosial Pesantren Futuhiyyah juga bermanfaat untuk menjaga dan pengendali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang mulai bergeser akibat pengaruh luar maupun akumulasi dari stagnasi yang begitu lama yang sering bagai gunung es yang setiap saat bisa mencair. Jika mempunyai modal sosial penjaga nilai (pesantren), maka kesenjangan antar generasi pun bisa terjembatani.

Dalam kerangka perubahan sosial hal di atas merupakan proses menuju kontinum nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang, yakni nilai yang manunggal dalam setiap kearifan lokal masyarakat. Nilai-nilai ini mungkin pernah tercerabut oleh politik kolonial yang merusak transformasi nilai antar generasi melalui konflik atau perebutan kekuasaan. Namun dalam setiap konflik pun tentu ada nilai-nilai yang masih tetap bertahan. Pada sisi inilah organisasi pesantren bisa berperan menjaga atau memaknai kembali nilai-nilai lama yang hampir hilang. Dengan jumlah santri yang dimiliki yang merupakan

generasi muda akan menguatkan posisi pesantren sebagai instrumentasi dalam pencapaian cita-cita bersama. Pesantren harus pula mampu membangkitkan kesadaran akan pencapaian cita-cita bersama yakni kesejahteraan masyarakat yang harus diperjuangkan secara bersama.

Daftar Pustaka

- Basundoro, Purnawan, dkk., 2007. *Tempo Doeloe Selaloe Aktoeal*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bruinessen, Martin van dan Julia Day Howell. 2008. *Urban Sufism*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Colombijn, Freek, dkk., 2005. *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, Yogyakarta: kerjasama NIOD (Netherlands Intituut voor Oorlogdocumentatie dan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga dengan Penerbit Ombak.
- Dhofier, Zamakhsyari, 2011. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Grijns, Kees dan Peter J.M. Nas. 2007. *Jakarta Batavia Esai Sosio-Kultural*, Jakarta: kerjasama KITLV-Jakarta dan Banana.
- Jabar, Prie. G.S. Abdul. 2001. *Sejarah Seabad Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen*, Panitia Perayaan Seabad Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak.
- Karni, S. Asrori. 2009. *Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Khusyairi, Johny A. dan La Ode Rabani. 2011. *Kampung Perkotaan Kajian Historis-Antropologis atas Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota*, Yogyakarta: kerjasama ANRC (Australia-Netherlands Research Collaboration) Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga dengan Penerbit New Elmatara.

- Mochtarom, Zaini. 2002. *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri & Abangan*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nas, Peter J.M., ed., 1995. *Issues in Urban Development Case Studies from Indonesia*, Research School CNWS, University Leiden, Netherlands: CNWS Publication.
- Nas, Peter J.M., 2007. *Kota-Kota Indonesia Bunga Rampai*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Tirtosudarmo, Riwanto, dkk., 2010. *Dinamika Sosial di Perkotaan Pantura dan Implikasinya Bagi Indonesia Studi di 'Banten' dan "Demak"*, Jakarta: LIPI Press.
- Raffles, Thomas Stamford. 2008. *The History of Java*, Jakarta: Buku Kita.
- Suprpta. 2006. *Ketergantungan Wilayah Kecamatan Mranggen terhadap Kota Semarang*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Werbner, Pnina. 2008. *Murid-murid yang Intim di Dunia Modern Terciptanya Persahabatan Trnslokal di Kalangan Sufi Asia Selatan di Inggris. Dalam Bruinessen, Martin van dan Julia Day Howell, Urban Sufism*, Jakarta: Rajawali Press.
- Wertheim, W.F., dkk., 1958. *The Indonesian Town Studies in Urban Sociology*, The Hague and Bandung: W. van Hoeve LTD.

BAB 4

TENTANG TOLERANSI DAN SOLIDARITAS SOSIAL: DINAMIKA KEBERAGAMAAN DI KOTA SEMARANG

Oleh Muhammad Khoiril Muqtafa

Pendahuluan

Runtuhnya rezim Orde Baru telah menandai babak baru bagi kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia. Ia menghadirkan peluang dan tantangan sekaligus. Kalau dulu begitu ketat dikontrol dan diawasi, kini mereka mempunyai kebebasan untuk mengatur kehidupannya dalam payung dan koridor demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin. Namun, di saat yang sama, masyarakat Indonesia dihadapkan pada anarkisme dan konflik sosial yang meruyak di berbagai daerah. Anarkisme dan konflik ini tak hanya mengakibatkan rusaknya fasilitas publik, tapi juga menorehkan luka dan merenggut korban jiwa yang tak terhitung.

Meski eskalasi konflik cenderung turun dibanding pada masa awal keruntuhan Orde Baru, konflik semacam ini seperti tak kunjung urung dalam masa transisi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik beraroma agama pecah di berbagai daerah. Penyebabnya bervariasi, namun yang cukup dominan adalah pendirian tempat ibadah dan keberadaan kelompok minoritas agama. Sementara kasus Ahmadiyah belum juga mereda (kasus mutakhir adalah penyerangan masjid Ahmadiyah di Bandung), kasus Sunni-Syiah mengemuka di Sampang, Madura. Di Bekasi dan Bogor, pendirian gereja tak kunjung menemukan jalan penyelesaian yang terang.

Laporan berbagai survei keberagamaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang *concern* pada isu ini seperti Setara Institute atau the Wahid Institute pada 2010 misalnya menunjukkan konflik beraroma agama di berbagai daerah masih tinggi. Menyimak berbagai berita akhir-akhir ini, peristiwa semacam itu terjadi hampir di banyak kota di seluruh Indonesia. Ditambah dengan fenomena menjamurnya fundamentalisme di berbagai lembaga pendidikan dan menguatnya konservatisme dan radikalisme di berbagai ormas keagamaan¹³ rasanya konflik antar kelompok umat beragama ini cenderung menjadi warna dominan dalam kehidupan sosial politik kita hari-hari ini.

Meski demikian, di saat konflik dan kekerasan semacam ini menjamur di sudut dan tengah kota di Indonesia, Semarang seringkali disebut sebagai kota “aman”.¹⁴ Bukan karena tidak ada konflik, juga tak berarti tiada kelompok primordial di sana, tetapi konflik dalam skala yang massif dengan melibatkan isu primordial (etnik, agama atau ideologi) hampir tak terjadi di sana. Sekedar gambaran adalah fenomena kekerasan terhadap kelompok minoritas agama yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, terutama kota-kota di Jawa Tengah seperti Temanggung, Semarang justru terlihat “adem”. Protes terhadap kelompok Ahmadiyah memang pernah terjadi, tapi tak berujung pada kekerasan yang brutal.

Pada konteks ini, menarik untuk mencermati relasi atau dinamika masyarakat, khususnya keberagamaan Kota Semarang. Pertanyaan berurut sederhana bisa diajukan di sini: apa yang memungkinkan kondisi semacam ini terjadi? Bagaimana relasi antar kelompok atau warga masyarakat di sana berlangsung? Kalaulah

¹³Lihat misalnya di Khalik, Abdul. 2008. Most Islamic studies teachers oppose pluralism, survey finds. Tersedia di: <http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/26/most-islamic-studies-teachers-oppose-pluralism-survey-finds.html>.

¹⁴Lihat misalnya di Anonym. Semarang Kota Paling Aman di Indonesia. Tersedia di: <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/03/29/103655/Semarang-Kota-Paling-Aman-di-Indonesia>.

kerukunan atau ketahanan sosial adalah gambar relasi antar warga di sana, faktor apakah yang memungkinkan hal semacam itu terjadi? Tulisan berikut mencoba untuk menjajagi dan mencari jawab fenomena di atas. Namun, sebelum membahas Semarang lebih lanjut, berikut ini disajikan “ancangan pikir” tentang keberagama(a)n, toleransi dan solidaritas kewargaan sehingga pembacaan atas dinamika antar kelompok di Semarang menemukan ruangnya.

Keberagama(a)n, Toleransi, dan Solidaritas Kewargaan

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan yang melibatkan isu agama dan komunitas beragama marak terjadi di Indonesia. Kekerasan itu bukan hanya melibatkan kelompok yang berbeda agama, tapi juga komunitas dalam satu agama karena perbedaan tafsir dan pemahaman atas agama itu sendiri. Setara Institut mencatat bahwa sepanjang tahun 2007 terjadi 185 kasus tindak kekerasan. Setahun berselang, 2008, terjadi tindak intoleransi sebanyak 367, hampir dua kali lipat pada tahun 2007. Adapun tahun 2009, terdapat sebanyak 291 kasus (Setara Institute, 2010). Pada tahun 2010, The Wahid Institute, juga melansir data bahwa tindak kekerasan bercorak agama mencapai 135 di 13 daerah pemantauan (The Wahid Institute, 2010). Sementara kasus Ahmadiyah belum menemukan jalan terang penyelesaian, kejadian terakhir adalah penyerangan terhadap warga Syi'ah di Sampang, Madura.

Sederet kekerasan beraroma agama di atas tentunya menambah daftar hitam keberagamaan di Indonesia. Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini selama ini dikenal sebagai negara moderat, percontohan kompatibilitas Islam dan demokrasi yang *genuine*.¹⁵ Namun, seiring dengan kasus kekerasan umat beragama yang muncul, *image* Indonesia sebagai negara yang moderat nampaknya hanya mitos

¹⁵Lebih jauh tentang hal ini, lihat misalnya Saiful Mujani. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, PPIM, Yayasan Wakaf Paramadina, Freedom Institute, Kedutaan Besar Denmark.

belaka. Seringkali didengungkan dan dibanggakan, kenyataan yang terjadi adalah barisan kasus kekerasan yang terjadi bertubi-tubi. Inilah ironi sebuah Negara dengan keragaman dan keberagaman yang padat. Keragaman bisa menjadi berkah dan bencana sekaligus. Sukses mengelola akan membuat Negara itu tumbuh kuat, sebaliknya, gagal merawat akan menjadi petaka dan laknat.

Galib diketahui, Indonesia adalah Negara dengan keragaman yang sangat tinggi, bahkan mungkin Negara termajemuk di dunia. Keragaman suku, bahasa, agama dan orientasi keberagaman yang lain adalah warna yang kaya dari bumi Nusantara ini. Dalam sejarah yang panjang, cerita tentang Nusantara, sumpah pemuda dan deklarasi kebangsa-negaraan, keragaman itu berhasil “dirawat” oleh para pendahulu sehingga eksistensi Indonesia masih terjaga kini. Meski tak bisa dinafikan bahwa ada sejarah kelam dalam proses sejarah itu: konflik, pengkhinatan, kekerasan dan “pembantaian”. Namun, seluruh proses itu paling tidak, hingga sekarang “berhasil” dilalui. Dinamika politik lokal dan global tak jua meluluhlantakkan Negara berpenduduk lebih dari 200 juta ini, hal yang berbeda dengan Negara Balkan yang pecah pada tahun 90-an.

Dalam konteks perawatan dan pengelolaan itu, toleransi, dialog, dan kerukunan sering menjadi mantra agung: dihutbahkan, dikampanyekan, dan didengungkan ke segala penjuru. Toleransi di sini bisa dimaknai sebagai sikap menghargai keberadaan yang lain sebagai partner, bukan ancaman (Chetkow-Yanoov, 1999: 20). Tak hanya Negara, aktivis dan tokoh keberagaman juga tak luput menyampaikan tema-tema seputar ini kepada para umatnya. Pada masa ini, Negara malah mensponsori proyek kerukunan yang kemudian terkenal sebagai trilogi kerukunan umat beragama. Dengan ini, Negara hendak menegaskan komitmennya untuk merawat harmoni dan kerukunan umat beragama yang pada dasawarsa 70-an memang cukup bergejolak, terutama antara Islam dan Kristen.

Namun, setelah Orde Baru runtuh, bukannya kerukunan tapi malah pertikaian dan kekerasan massal yang menyeruak di berbagai

daerah. Harmoni dan kerukunan yang dibayangkan, dikampanyekan dan disponsori oleh Negara runtuh. Seolah tak tersisa, gejala kebencian merambah kemana-mana. Konflik ini secara telak telah menjadi salah satu petaka besar keragaman di Indonesia. Pada aras ini, pertanyaan besar muncul: kalaulah harmoni adalah proyek besar Negara dan toleransi adalah mantranya, kenapa justru kekerasan yang mengemuka? Adakah tindakan salah rawat dan salah tafsir toleransi dan harmoni itu? Ataupun ada hal lain yang membuat hal semacam ini terjadi.

Sementara hal di atas bisa dijelaskan lewat berbagai teori dan perpektif, banyak kalangan menilai bahwa proyek toleransi yang dikampanyekan oleh rezim Orde Baru adalah toleransi yang semu, yang dipaksakan oleh pemerintah untuk menciptakan “kestabilan sosial politik” di bawah rezim yang represif itu. Harmoni dan kerukunan dipakai sebagai alat untuk mengontrol kehidupan umat beragama. Atas nama SARA, agama dan keberagaman dipandang dan dipersepsikan sebagai ancaman dan karena itu perlu diatur (Sutanto, 2011: 128). Di masa itu, faham atau kelompok yang dicurigai membahayakan atau bertentangan dengan Negara, setidaknya dalam perspektif rezim, akan diawasi dengan ketat dan kalau perlu dibungkam. Situasi semacam ini menjadikan toleransi yang dikampanyekan tidak menemukan ruh-nya.¹⁶

Dalam lanskap kerukunan, toleransi bisa dibedakan menjadi dua: toleransi pasif dan toleransi aktif (Misrawi, 2007: 186). Toleransi yang pertama kerap merujuk pada situasi di mana dua atau lebih kelompok yang berbeda bisa hidup saling berdampingan tanpa saling mengganggu antara yang satu dengan yang lain. Dalam konteks ini, hal yang ditekankan dalam proyek harmoni adalah ada bersama tanpa harus saling mengintervensi (ko-eksistensi). Pada gilirannya, keadaan

¹⁶Tentang kerapuhan toleransi yang digagas oleh rezim Orde Baru dan dampak yang ditimbulkannya, bisa dibaca lebih jauh di Tim MADIA. 2001. *Meretas Horison Dialog: Catatan dari Empat Daerah*. Jakarta: ISAI kerjasama dengan The Asia Foundation untuk MADIA.

yang tumbuh adalah situasi acuh tak acuh (*indifference*). Atas nama toleransi model ini, orang cenderung melakukan suatu tindakan sendiri atau bersama kelompoknya tanpa harus melibatkan kelompok lain. *Thus*, toleransi cenderung dimaknai sebagai *I am what I am not* yang cenderung pada pengentalan identitas primordial kelompok tertentu (Muqtafa, 2004: 10).

Toleransi model ini kuat menggurat dalam proyek kerukunan Orde Baru. Rezim ini telah membuat toleransi yang sejatinya adalah sebuah idealitas sikap menjadi pragmatisme tindakan yang sejatinya tidak akan melahirkan kerukunan atau harmoni yang diidamkan. Toleransi hadir dalam ruang-ruang formalitas yang tidak berbasis mentalitas dari para warga. Ia hadir dalam acara-acara keagamaan resmi yang disponsori oleh Negara atau diskusi-diskusi kampus yang sangat normatif. Tak heran kalau kemudian ketika rezim prototype militer ini runtuh, pragmatisme dan formalitas itu, di tambah dengan polarisasi politik pasca buyarnya sentralisasi kekuasaan, berubah menjadi brutalitas yang merenggut banyak korban.

Berbeda dengan model pertama, toleransi aktif bukan hanya menerima “keberadaan” yang lain, tapi juga “kehadiran” mereka. Sebab itu, toleransi model ini mensyaratkan keterlibatan kelompok lain dalam setiap tindakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan masyarakat banyak (pro-eksistensi) (Muqtafa, 2003:20). *Thus*, keterlibatan secara aktif dari tiap-tiap komunitas yang ada adalah persyaratan mutlak dalam toleransi model ini. Dalam bahasa yang lain, pro-eksistensi tidak hanya mengandaikan masyarakat ada bersama-sama tapi juga bersama-sama kerja dalam membangun dan mengatasi persoalan yang terjadi di sekitar. Apa yang kemudian muncul dari proses sosial dalam kerangka ini adalah solidaritas sosial di mana setiap warga atau komunitas selalu peduli dengan apa yang terjadi pada warga atau komunitas lain (Muqtafa, 2004: 10).

Toleransi yang pro-eksistensi mengandaikan kesadaran yang dalam tentang makna kebersamaan dan keberbedaan. Toleransi bukan lagi hanya formalitas tapi mentalitas yang menjadi landasan dalam

bersikap kepada yang lain. Dalam bahasa Milad Khanna (2005), toleransi model ini adalah perwujudan sebetuk manifesto *qabuulul akhar*, menyambut keberadaan yang lain secara aktif sehingga perbedaan tak lagi menjadi penghalang bagi kerja-kerja sosial yang hendak dilakukan, malah saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Solidaritas yang terbangun adalah solidaritas sosial yang lekat, tak mudah goyah ketika digoyang.

Inilah sebetuk solidaritas kewargaan di mana sikap saling peduli atas yang lain sebagai sesama warga masyarakat dan Negara telah menjadi bagian inheren dalam tindakan mereka. Apa yang menjadi urusan publik menjadi tanggung jawab bersama dan diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam bentuknya yang ideal, solidaritas ini berangkat dari sebuah subyektifitas di mana subyek memandang dirinya sebagai sesuatu yang kurang, *incomplete*. Kekurangan ini akan lengkap ketika sang subyek memandang keberadaan yang lain sebagai bagian dari dirinya. Keberadaan yang lain bukan lagi sebagai ancaman tapi sebagai pelengkap eksistensial bagi sang subyek untuk memahami dunia di mana dia berada. Subyektivitas semacam inilah yang senantiasa kukuh menopang solidaritas kewargaan ideal yang dibayangkan.¹⁷

Kondisi Sosial Demografis Kota Semarang

Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Daerah seluas 373,30 km persegi ini terbagi atas 16 kecamatan (Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu dan Ngaliyan) dan 177 kelurahan. Dari luas itu, 39,16 km persegi adalah

¹⁷ Pandangan subyektivitas semacam ini dibahas dengan detail oleh Julia Kristeva lewat berbagai tulisannya, terutama *Strangers to Ourselves* (1991) dan kumpulan tulisan *Nations without Nationalism* (1993). Bisa juga dibaca di Noelle McAfee. 2000. *Habermas, Kristeva and Citizenship*. Ithaca and London: Cornell University Press, terutama di Bab 2.

tanah sawah dan sisanya, 334,14 km persegi adalah lahan bukan sawah. Atas dasar kegunaannya, sebagian besar tanah sawah itu adalah tanah sawah tadah hujan (53,12%), dan hanya sekitar 19,97% yang dapat ditanami dua kali. Adapun tanah bukan sawah, sebagian besar, mencapai 42,17%, dipakai sebagai tanah pekarangan atau tanah bangunan (Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2011: 24).

Dari 16 kecamatan, Kecamatan Mijen adalah kecamatan terluas (57,55 km persegi), diikuti Kecamatan Gunungpati (52,63 km persegi). Adapun wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Semarang Tengah yang luasnya hanya mencapai 5,14 km persegi. Meski terluas, dari segi jumlah penduduk, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tugu justru berpenduduk sedikit, kurang dari 1000 orang per km persegi. Ini disebabkan karena kedua kecamatan ini diproyeksikan sebagai daerah pertanian dan industri. Di daerah pusat kota, kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan kepadatan penduduk mencapai 14.458 orang per km persegi (Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2011: 24).

Sampai tahun 2010, Kota Semarang berpenduduk 1.527.433 jiwa, sekitar 71, 65% berusia produktif (15-64 tahun). Dalam jangka 5 tahun (2006-2010), jumlah penduduk Semarang mengalami peningkatan, meski kepadatan penduduk belum merata. Tingkat perbandingan antara penduduk usia produktif dan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) pada tahun 2010 berkisar 39,57 yang berarti 100 orang usai produktif menanggung sekitar 40 orang usia tidak produktif (Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2011: 129). Dalam hal mata pencaharian, sebagian besar penduduk Semarang bekerja sebagai buruh industri (25,66%), disusul PNS/ABRI (13,78%), buruh bangunan (12,02%), jasa dan lainnya (11,76%) dan petani sebesar 3,86% (Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2011: 130).

Dilihat dari jumlah pemeluk agama, sampai pada tahun 2010, Islam menjadi agama yang paling banyak dipeluk oleh warga Semarang (1.272.693), disusul Kristen Katholik (114.311), Kristen Protestan (109.104), Budha (18.530), Hindu (10.545) dan lainnya (2.550) (Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2011: 155-156). Dibanding agama lain, jumlah kaum muslim konsisten mengalami peningkatan semenjak tahun 2006. Hal yang sama juga terjadi pada pemeluk kategori "lainnya". Sementara itu, agama lain cenderung mengalami pasang surut jumlah dalam lima tahun terakhir. Sayangnya, agama Khonghucu yang sudah resmi diakui oleh Negara tidak secara spesifik disebut dalam laporan tahun 2010. Padahal, semenjak itu, banyak orang China yang tadinya memeluk agama lain memilih memeluk Khonghucu, dan ini berimplikasi terhadap pengurangan jumlah pemeluk agama lain.

Sarana tempat ibadah, jumlah masjid dan musholla/langgar/surau mencapai 3.059 buah, sementara gereja/kapel berjumlah 287 buah, dan vihara/kuil/pura mencapai 38 buah. Dalam lima tahun terakhir, jumlah tempat ibadah ini cenderung meningkat. Pada tahun 2006, jumlah masjid ditambah musholla/langgar/surau adalah 2.644 buah, gereja/kapel 256 berjumlah buah dan Vihara/Kuil/Pura mencapai 36 buah (Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2011: 324). Kalaulah jumlah tempat ibadah ini bisa dipakai untuk melihat keberagamaan umat, maka intensitas peribadatan warga Semarang bisa dibilang cenderung meningkat. Seturut dengan hal ini, menarik untuk melihat kondisi keberagamaan di Semarang lebih jauh.

Kondisi Keberagamaan di Jawa Tengah

Sebelum melihat lebih jauh bagaimana kondisi keberagamaan di Kota Semarang, ada baiknya melihat peta kerukunan di Jawa Tengah. Ini penting mengingat konflik-konflik sosial keagamaan cenderung menular, dari satu daerah ke daerah lain. Apalagi ketika daerah-daerah tersebut sangat berdekatan, potensi efek dominonya cenderung tinggi. Sebagai contoh adalah kasus Ahmadiyah, yang bermula dari penyerangan di Parung, Bogor, kemudian merembet

menjadi perlawanan terhadap kelompok Ahmadiyah di hampir seluruh Indonesia. Melihat Jawa Tengah, terutama, kota-kota di sekitar Semarang, menjadi pintu masuk yang penting untuk melihat bagaimana itu berdampak terhadap kondisi keberagamaan di Semarang sekaligus untuk menakar kembali klaim Semarang sebagai kota “aman” dari konflik antar kelompok (keagamaan).

Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Tengah diguncang oleh konflik sosial beraroma keagamaan yang meledak di berbagai daerah. Konflik ini bervariasi, mulai dari melibatkan kelompok intra-agama dan antar agama. Salah satu kasus yang menyedot perhatian publik dan banyak menjadi sorotan media nasional adalah kasus Temanggung. Kasus ini bermula dari tuduhan penodaan agama yang dilakukan oleh Antonius Richmond Bawengan. Lewat bukunya “Ya Tuhanku, Tertipu Aku” dan “Saudara Perlukan Sponsor” yang disebar sejak 23 Oktober 2010, Antonius didakwa telah melakukan penodaan agama. Hal ini memicu keresahan warga Kenalan Kelurahan Kranggan, dan seturut ini surat dakwaan dengan No. Reg. Perk: PDM-44/TMANG/EP.2/12/2010 dilayangkan (Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang, tt: 41).

Mengikuti proses ini, beberapa kali sidang pun dilakukan. Sidang pertama pada 13 Januari 2011, dan kedua pada 20 Januari 2011. Selepas kedua sidang ini, terdakwa dipukuli oleh massa, mulai dari ketika keluar ruang sidang sampai mobil tahanan. Pada sidang ketiga, massa menuntut terdakwa dihukum mati dan pada sidang keempat terdakwa divonis hukuman maksimal 5 tahun penjara. Atas putusan ini, massa tidak terima dan kemudian melempari gedung pengadilan negeri Temanggung. Tak hanya itu, sejumlah tempat ibadah dirusak, mulai dari Gereja Bethel Indonesia, Gereja Pantekosta, dan Gereja Santo Petrus-Paulus. Khusus di Pantekosta, 3 unit mobil dan 6 unit sepeda motor tak luput dari amuk massa. Bahkan, markas Polres Temanggung pun tak luput dari aksi perusakan (Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang tt: 42-43).

Insiden lain yang melibatkan dua kelompok komunal terjadi di daerah “bersumbu pendek”, Solo. Konflik antara kelompok preman

Walet Merah (yang diidentifikasi sebagai Kristen) dan gabungan Laskar dari kelompok Jamaah Anshorut Tauhid, Laskar Umat Islam Surakarta, dan eks Hisbah bermula dari keributan antara anggota laskar dan preman Walet Merah di Jalan RE Martadinata, Gandekan, Jebres, Solo yang berakhir dengan penyerangan terhadap dua anggota laskar hingga terluka dan satu unit sepeda motor yang dibakar oleh anggota Walet Merah. Tindakan ini memicu serangan balasan dari kelompok Laskar yang melakukan *sweeping* di Jalan RE Martadinata dan sekitarnya. Konflik dua kelompok ini mengakibatkan 6 orang luka-luka, di antaranya adalah Kapolsek Jebres yang terkena serpihan kaca bom Molotov (Soleh, 2012: 6-9).

Sementara itu, di sebelah Barat Semarang, tepatnya di daerah Kendal, penutupan paksa Masjid dan intimidasi terhadap kelompok Ahmadiyah terjadi, tepatnya di desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum. Peristiwa ini terjadi pada bulan Mei 2012. Kelompok yang terlibat dalam penyegelan dan intimidasi ini adalah aparat negara, mulai dari Kepala Satpol PP, anggota Danramil, Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Kendal, dan Kepala Desa. Mereka mendesak kelompok Ahmadiyah untuk menandatangani surat yang berisi tentang pembekuan aktivitas Jamaah Ahmadiyah di sana. Kalau tidak, para aparat negara ini tidak menjamin keselamatan mereka, bahkan Satpol PP mengancam akan meratakan masjid mereka (Anwar, 2012: 10-11).

Di sebelah Timur Semarang, di kota Kudus, pembubaran paksa terhadap pengajian umum yang diselenggarakan oleh Majelis Tafis Alquran (MTA) perwakilan Kudus terjadi pada Januari tahun ini. pembubaran paksa ini dilakukan oleh berbagai elemen seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Barisan Ansor Serbaguna (Banser), dan Fatayat. Pembubaran ini dilakukan karena MTA dianggap meresahkan warga dan mendiskreditkan ajaran dan tokoh NU seperti menghujat para kiai, pembacaan tahlil dianggap lebih berdosa dibanding perbuatan zina dan sebagainya. Dengan aksi ini, pengajian yang dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta akhirnya dihentikan (Ceprudin, 2012a: 8-9).

Beberapa kasus di atas disebut untuk menunjukkan betapa Semarang sesungguhnya dikepung oleh maraknya tindakan intoleransi dan konflik yang melibatkan kelompok, utamanya, berbasis keagamaan. Di luar itu, masih banyak konflik yang terjadi seperti di Tegal, Pekalongan, Klaten, Rembang dan yang lain. Motif konflik pun bervariasi, namun setidaknya menunjukkan satu kecenderungan bagaimana satu kelompok atau ajaran tertentu berhasrat mendominasi kelompok atau ajaran lain, mulai dari pelarangan (dengan paksa), intimidasi sampai pada penyegelan tempat ibadah yang berimplikasi terhadap beku atau mandegnya kegiatan keagamaan kelompok yang menjadi korban.

Lalu, bagaimana dengan Semarang?

Kondisi Keberagaman di Semarang

Sebagaimanakota-kota lain di Jawa Tengah, Semarang sesungguhnya juga tidak *immune* dari peristiwa serupa. Beberapa kasus setidaknya bisa disebut di sini untuk menunjukan dinamika keberagaman di Kota Semarang. Kita mulai dari kasus Ahmadiyah sebagai peristiwa yang mempunyai efek domino besar di Indonesia. Tak berbeda dengan daerah lain, gelombang penolakan terhadap Ahmadiyah juga terjadi di Semarang. Pada Juni 2008, di Jalan Erlangga No. 7A Semarang, demonstrasi penolakan terhadap keberadaan Ahmadiyah dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang mengatasmakan aliansi Mahasiswa Islam anti-Ahmadiyah di depan Masjid Nusrat Jahan milik Ahmadiyah. Protes ini tak berujung pada perusakan tempat ibadah karena berhasil ditangani oleh aparat (Antara News, 2012).

Masih terkait kasus Ahmadiyah, upaya pelarangan terhadap kelompok ini juga gencar dilakukan, terutama oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana diketahui, Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu kelompok yang paling gencar melancarkan kesesatan terhadap Ahmadiyah, setidaknya melalui fatwa terakhir mereka pada tahun 2005 setelah sebelumnya fatwa serupa dikeluarkan pada 1980.

Tak hanya tentang kesesatan, MUI juga memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah. Pembubaran ini dianggap sebagai langkah terbaik untuk menghindari massa main hakim sendiri. Di samping itu, Ahmadiyah tak layak lagi dibina karena sudah terbukti sesat, setidaknya, dalam kacamata MUI (Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang, tt: 67-68).

Seturut hal ini, MUI Jawa Tengah merekomendasikan hal serupa: meminta gubernur untuk mengeluarkan peraturan mengenai larangan keberadaan Ahmadiyah di Jawa Tengah. Sekedar informasi, di Jawa Tengah, Jamaah Ahmadiyah tersebar di berbagai daerah seperti Semarang, Kudus, Tegal, Kendal, Salatiga, Karanganyar, dan lain-lain. Bahkan melalui sekretaris MUI, Ahmad Rofiq, koordinasi sudah dilakukan dengan asisten III Provinsi Jawa Tengah terkait penerbitan aturan larangan Ahmadiyah dalam bentuk peraturan daerah, surat keputusan gubernur atau peraturan gubernur. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah memutuskan tidak mengeluarkan peraturan apapun, berbeda dengan provinsi tetangga seperti Jawa Barat dan Jawa Timur yang sudah lebih dulu melarang keberadaan Ahmadiyah di wilayah mereka (Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang tt: 68-70).

Kasus lain adalah pemukulan terhadap seorang imam masjid di Kampung Karangggawang, kelurahan Tandang, Tembalang yang dilakukan oleh kelompok berjenggot dan bercelana cingkrang. Tindak intoleransi ini bermula ketika Ahmad Chumaidi, sang imam masjid, menegur salah seorang anggota kelompok berjenggot yang berusaha merebut *microphone* sang imam selepas sholat maghrib. Mengira dipukul, orang tua anggota yang ditegur tersebut tidak terima, dan bersama anaknya langsung memukul sang imam. Tak hanya itu, kedua anggota kelompok itu menantang sang imam kalau tidak terima dengan perlakuan yang dialami. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi. Konflik antara warga masjid dan kelompok berjenggot ini sudah berlangsung lama, dan warga jamaah masjid sudah cukup jengah

dengan tingkah laku para anggota *jaulah*¹⁸ ini yang selalu mengklaim sebagai ahli surga, sedang yang lain ahli neraka. Juga kebiasaan untuk berceramah setelah sholat dengan mengambil *microphone* padahal masih banyak jamaah yang wiridan dan sholat ba'diyah (Ceprudin, 2012b: 9-11).

Adapun kasus yang melibatkan isu antar agama adalah konflik penggunaan rumah sebagai tempat ibadah sementara oleh jemaat Hosana di Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan. Penggunaan rumah sebagai tempat ibadah sementara ini dipicu oleh pelebaran jalan Jarakah-Ngaliyan yang membuat Gereja Pantekosta Jemaat Hosana tidak bisa lagi dipakai untuk peribadatan. Karena itu, aktifitas peribadatan itu pun dilakukan dari rumah ke rumah sampai akhirnya Pendeta Suryani memutuskan untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat ibadah. Atas keputusan ini, warga sekitar, terutama Ketua RT 09, RT setempat, melayangkan sikap keberatannya. Beberapa kali berdiskusi, dan akhirnya, diadakan rapat yang melibatkan beberapa RT (09, 08, 07) dan beberapa tokoh masyarakat. Melalui rapat itu, yang dianggap berat sebelah karena pihak Jemaat Hosana hanya berdua, Pendeta Suryani dan anaknya, Zemmy, menghadapi 17 orang lainnya yang berbeda dengan mereka, penggunaan rumah perdeta Suryani sebagai tempat peribadatan sementara akhirnya dihentikan (Sholihan dan Sulthon, 2008: 48-61).

Beberapa konflik yang disebut di sini menunjukkan bahwa Semarang tidak sepenuhnya “aman”. Riak-riak konflik terjadi di beberapa sudut, baik yang menyangkut isu intra-agama maupun antar-agama. Meski demikian, hal yang cukup membedakan beberapa kasus di Semarang dengan daerah di sekitarnya adalah proses penyelesaian

¹⁸ Jaulah adalah nama yang kerap disematkan kepada kelompok jama'ah tabligh. Disebut demikian karena kegiatan mereka mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat khuruj dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang kaffah. Khuruj sendiri adalah kegiatan meluangkan waktu untuk secara total berdakwah memperbaiki diri sendiri dan orang lain (lebih lanjut lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh)

yang dilakukan. Kalau di daerah sekitar Semarang kekerasan fisik terjadi yang tak hanya menimbulkan korban luka dan kerusakan properti, penyelesaian konflik di Semarang lebih “persuasif”, melalui dialog, musyawarah dan jalur hukum. Beberapa kasus itu juga tidak melahirkan rentetan peristiwa lain seperti pembalasan atau berkembang besar menjadi konflik komunal.

Pada aras ini, klaim tentang ketahanan sosial masyarakat Semarang mengemuka, bahwa masyarakat Semarang sudah mempunyai mekanisme kultural untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang besar. Setiap soal yang muncul bisa diselesaikan dan diantisipasi untuk tidak terulang. Kecuali kasus pemukulan yang terjadi di Masjid Nurul Hikmah yang kemudian diselesaikan lewat jalur hukum, kasus lain seperti disebut di muka tidak melahirkan tindak kekerasan fisik. Kalaulah klaim ketahanan sosial ini bisa dibenarkan, pertanyaannya, karakter keberagaman seperti apakah yang membentuk watak masyarakat Semarang? Ataukah, karakter semacam ini lahir dari sifat pragmatisme di tengah hingar bingar proyek industrialisasi yang tengah terjadi di sana?

Sejarah dan Pilar Toleransi di Semarang

Membicarakan dinamika keberagaman di Semarang tak bisa dilepaskan, setidaknya, dari dua agama dominan di sana yakni Islam dan Katolik. Apalagi, dua agama ini, sebagaimana tercatat dalam sejarah, mengalami “persaingan” damai dalam misi dan dakwah mereka, terutama pada abad 19. Berdasarkan laporan BPS Kota Semarang pada tahun 2010, jumlah muslim mencapai 1.272.693 jiwa, sedangkan pemeluk Katolik berjumlah 114.311 jiwa. Jumlah muslim mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang berjumlah 1.251.059 (2009), 1.230.068 (2008), 1.207.614 (2007, dan 1.176.653 (2006). Sementara pemeluk Katolik mengalami pasang surut jumlah semenjak tahun 2006 (122.682), 2007 (110.655), 2008 (112.712) dan 2009 (114.636) (Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2011: 155-156).

Sebagaimana dicatat M. Shokheh (2010), abad 19 merupakan abad di mana revivalisme Islam melanda Pulau Jawa. Gejala revivalisme ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah orang Jawa yang naik haji, peningkatan jumlah lembaga pendidikan tradisional, dan pendirian cabang tarekat. Khusus tarekat, pada saat itu terdapat tiga aliran dominan yakni Qadiriyyah, Naqsyabandiyah, dan Syatariyyah. Penanda lain adalah pembangunan tempat ibadah yang cukup gencar diusulkan dan didirikan. Snouck Hurgronje (dikutip Shokheh, 2010: 4) mencatat bahwa masjid agung banyak ditemukan di tempat-tempat pemerintahan yang penting, seperti ibukota Kabupaten, sementara masjid-masjid kecil mudah dijumpai di ibukota Kawedanan.

Berbeda dengan kebangkitan gerakan Islam di daerah lain yang cenderung puritan dan konfrontatif, gerakan revivalisme Islam di Semarang pada abad 19 cenderung akomodatif. Ini bisa dilihat dari karya ulama pada saat itu yang menggunakan bahasa Jawa mengingat masyarakat Islam pada masa itu masih awam dengan bahasa Arab. Di antara karya-karya itu adalah *Faidh al-Rahman*, tafsir Alquran berbahasa Jawa yang ditulis oleh Kiai Saleh Darat dan penjelasan berbahasa Jawa pada bagian awal dan akhir atas kitab *Fathul Qarib* yang konon ditulis oleh KH. Abu Darda', pengasuh pondok pesantren Dondong. Bagi Shokeh (2010: 8), selain sikap akomodatif terhadap nilai lokal, penggunaan bahasa lokal ini menunjukkan karakter dakwah di Semarang yang bukan milinearisme.¹⁹

Tak bisa dipungkiri, model dakwah di Semarang ini cukup dipengaruhi oleh sosok Kiai Saleh Darat. Aktivitas pengajian yang dilakukan di pesantren Darat turut melahirkan sosok penting tokoh pembaharu dan pergerakan Islam KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad

¹⁹Miliniarisme adalah suatu keyakinan yang dipegang oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif. Dalam kasus Semarang, kelompok milinearisan ini memfokuskan diri pada kegiatan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (lebih lanjut lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh).

Dahlan. Dari dua tokoh inilah lahir organisasi keagamaan modern seperti Nahdlatul Ulama (1926) dan Muhammadiyah (1912). Keberadaan dua lembaga ini, ditambah dengan Sarekat Islam (1912), menjadi motor penggerak bagi reformulasi dan reinterpretasi keislaman dalam konteks ke-Indonesia-an dan kemodernan. Seturut semangat ini, pembenahan terhadap pesantren dan tarekat mulai dilakukan. Di saat yang sama perlawanan terhadap empat musuh, yakni formalisme kolot, kebudayaan adat dan priyayi, sikap kebarat-baratan dan kolonialisme gencar dilakukan (Shokheh, 2010: 9).

Sementara itu, pada Katolik, gerakan misi menemukan momentumnya dengan membangun fasilitas pendidikan bagi penduduk bumiputra mengingat ketimpangan fasilitas pendidikan yang ada antara warga Eropa dan bumiputra. Lembaga pendidikan ini dipakai di antaranya sebagai medium menyampaikan injil. Pada tahun 1896, sudah berdiri dua Sekolah Rakyat Katolik di Mlaten dan Lamper. Kerja misi pada wilayah pendidikan ini terbilang sukses di mana pada masa mendatang lembaga pendidikan di bawah naungan Katolik tumbuh pesat. Tak hanya pendidikan, gerakan misi Katolik ini juga fokus pada pelayanan kesehatan. Dari mereka, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit pertama kali dikenalkan di Semarang. Pelayanan kesehatan terlaksana dengan didirikannya Rumah Sakit Katolik Elisabeth pada tahun 1927 di kawasan perbukitan Candi di Semarang (Shokheh, 2010: 15-16).

Gerakan misi Katolik juga banyak mendirikan organisasi. Di antaranya adalah Pangruktilaya untuk mengurus kematian, Katolik Wandawa untuk keperluan peribadatan, Wanita Katolik Semarang, perkumpulan pelajar Palupi Darmo, Muda Katolik dan juga Koperasi bernama Among Mitra. Organisasi sosial keagamaan dan organisasi politik bernama *Pakempalan Politiek Katholiek Djawi* (PPKD), juga didirikan. Pada perkembangannya, perkumpulan politik ini bukan hanya untuk para Katolik Jawa, tapi juga bumiputra lainnya. Pada 1930, nama organisasi ini diubah menjadi *Perkoempoelan Politiek Katholiek di Djawa* (akronim sama PPKD) di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa organisasi. Beberapa perubahan tersebut dimaksudkan

untuk mempertegas visi kebangsaan perkumpulan politik ini (Shokheh, 2010: 17).

Dalam proses dakwah dan misi ini, dua kelompok keagamaan tidak berseteru, malah menunjukkan kecenderungan pembaharuan yang mempunyai dampak sosial yang signifikan. Meskipun kalau dilihat lebih jauh kecenderungan misi dan dakwah ini berbeda, di mana Islam lebih menekankan kepada semangat untuk mencapai otentisitas dan semangat pembaharuan terutama lewat organisasi keagamaan modern, sementara misi Katolik menawarkan inovasi seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan (Shokheh 2010: 20). Di samping itu, baik Islam dan Katolik dalam kegiatan misi dan dakwahnya cenderung anti-kekerasan dan mengapresiasi nilai-nilai lokal.

Di samping persoalan agama, nilai-nilai kejawaan juga diyakini menjadi salah satu faktor penyangga toleransi ini mengingat sebagian besar warga Kota Semarang adalah orang Jawa.²⁰ Nilai-nilai Jawa yang termaktub dalam berbagai ungkapan semisal *rukun agawe sentosa, crah agawe bubrah* (rukun membuat kuat sentosa, bertengkar membuat rusak) ataupun *tepa slira* yang kerap dimaknai sebagai nasihat untuk mengukur diri sendiri atas perbuatan yang hendak dilakukan terhadap orang lain (Suhandjati, et. al, 2009: 35-37) adalah norma yang selaras dengan sikap toleransi yang mengandaikan sikap penghormatan dan penghargaan kepada yang lain agar damai sentosa. Dalam rangka membangun kebersamaan, nilai-nilai Jawa yang mengagungkan harmoni ini menemukan ruangnya dalam praktik toleransi yang terejawantah dalam interaksi antarwarga.

Melihat warisan dan semangat toleransi serta nilai-nilai Jawa yang mementingkan kerukunan ini, secara ideal, tidak akan membuka ruang bagi tindak intoleransi yang dilakukan oleh satu warga kepada warga lainnya. Namun demikian, nilai-nilai idealitas itu tak selalu sejalan dengan praktik di lapangan. Berbagai kasus kekerasan di Jawa

²⁰Sebagaimana dituturkan oleh Peneliti Walisongo Mediation Center (WMC) dalam diskusi terbatas pada tanggal 4 Juli 2012 di sekretariat WMC.

Tengah misalnya menunjukkan bagaimana nilai-nilai “kejawaan” saja (tanpa internalisasi dalam laku tindak sehari-hari) tak cukup membendung tindak anarkis aparat dan warga. Untuk itu, dalam rangka melihat apakah semangat dan nilai-nilai agung itu diinternalisasi oleh warga, bagian di bawah ini akan mencoba mendiskusikan lebih lanjut.

Narasi Toleransi: Pasif dan Aktif

Dalam rangka ini ada baiknya melihat kembali kasus-kasus keberagamaan yang terjadi di Semarang dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, bisa disimpulkan daerah pinggir seperti Tembalang maupun Ngaliyan nampak lebih “rentan” ketimbang kawasan tengah seperti di Semarang Tengah maupun Timur. Menurut catatan Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang (eLSA), konflik keberagamaan di daerah kota atau tengah jarang terjadi. Bisa jadi karena posisi di tengah ini menjadikan segala hal yang terjadi terkait isu keamanan dan keberagamaan mudah diantisipasi. Sebagaimana ditegaskan oleh salah satu petugas di Balai Kota Semarang, koordinasi antara pihak keamanan, pemerintah, dan warga sekitar terjalin baik sehingga ketika konflik mengemuka segera ditangani. Lalu, bagaimana di daerah pinggir?

Dari perbincangan yang dilakukan dengan informan, nampak ada perbedaan sikap antara warga yang tinggal di daerah pinggir dan di tengah Semarang. Bukan untuk menggeneralisir, di daerah pinggir, nampaknya relasi antar warga tidak terlalu erat. Ekspresi yang muncul dari informan seperti “luru duit wae susah mas...”²¹ (cari duit aja susah mas...), mungkin bisa menggambarkan bagaimana relasi antara warga terjadi di sana. Pernyataan ini diucapkan oleh seorang ibu yang berprofesi sebagai penjual makanan di Desa Ngaliyan, di belakang kampus IAIN Walisongo Semarang yang kebetulan istri ketua RT setempat. Di daerah ini, kebanyakan warga memang banyak yang bekerja sehingga kesibukan itu membuat situasi “guyub” tidak begitu nampak.

²¹Obrolan ringan pada Rabu 4 Juli 2012.

Di saat yang sama, rapat atau pertemuan RT tidak begitu sering dilakukan. Mereka yang tinggal di daerah itu sebagian besar adalah warga Semarang sendiri dan beragama Islam. Memang pernah ada warga non-muslim tinggal di sana namun tidak lama. Konflik yang beraroma agama atau primordial lainnya tidak pernah terjadi di sini. Situasi homogen ini, sedikit banyak, memang mendorong kondisi aman yang berlangsung di sana. Dalam konteks ini *comfort zone* akan tercipta. Pada titik tertentu, *comfort zone* ini mudah membuat orang lupa, bahwa ikatan sosial perlu dirawat, bukan sesuatu yang *taken for granted*. Tanpa perawatan, situasi semacam ini menghadirkan kerenggangan sosial, ketika relasi sosial di antara warga tak lagi dirawat dalam kegiatan dan komunikasi bersama. Kesibukan untuk bekerja dan melakukan aktivitas lain adalah salah satu hal yang bisa memicu kerekatan sosial dalam masyarakat.

Dan, situasi semacam ini cukup rentan ketika diinterupsi oleh hal-hal yang dianggap asing dan bisa membahayakan kenyamanan bersama. Contoh dari hal ini adalah pembangunan gereja Pantekosta di Ngaliyan. Meski berhasil diselesaikan, ini setidaknya menunjukkan bagaimana reaksi masyarakat sekitar ketika sesuatu yang dianggap “asing” datang mengusik mereka. Reaksi keras bermunculan dan berakhir dengan berhentinya aktivitas sementara jamaah gereja Pantekosta. Seandainya aktivitas terus dilaksanakan, bukan tidak mungkin konflik serius bisa muncul di sana. Memang ada soal aspek prosedural (soal prasyarat mendirikan rumah ibadah) di sana, tapi reaksi yang muncul cukup menunjukkan bagaimana situasi *comfort zone* cenderung membuat orang sulit menerima hal baru.

Berbeda dari pinggir, cerita dari tengah relatif berbeda. Di salah satu RT di dekat Simpang Lima Semarang, keguyuban warga sangat erat. Pertemuan warga sering dilakukan. Tak hanya itu, pertemuan rutin di tingkat RW juga dilaksanakan. Program rutin bertemu dengan warga ini dimanfaatkan untuk membicarakan persoalan warga bersama. Isu yang sering muncul adalah persoalan sampah, keamanan dan sebagainya. Di lingkungan ini tinggal berbagai kelompok keagamaan, namun demikian, tidak ada aktivitas yang cukup

demonstratif dari keberadaan kelompok ini. Isu agama juga pernah dibicarakan dalam forum rutin ini, namun jarang, karena agama, sebagaimana dituturkan oleh ketua RT setempat, cenderung menjadi urusan masing-masing.²²

Hal yang sama juga terjadi di Kampung Cina di daerah Kranggan. Mereka yang tinggal di daerah ini, hampir semuanya kelompok etnis Tionghoa. Kalaulah ada yang bukan warga Tionghoa, jumlahnya sangatlah sedikit. Di daerah ini dan sekitarnya, konflik komunal dan yang melibatkan isu keberagaman tidak pernah terjadi. Konflik antar warga yang pernah muncul misalnya diakibatkan isu utang piutang atau isu transparansi keuangan dari pengurus RT, terutama ketua RT terdahulu yang dianggap “gelap” dalam hal laporan keuangannya. Relasi antara komunitas Tionghoa dengan kelompok lain terjalin dengan baik. Pada tahun 1998, ketika penyerangan terhadap kelompok Tionghoa marak di berbagai daerah, di Kampung Cina ini tak sampai pecah konflik. Mereka memang pernah diserang, tapi oleh orang luar, bukan orang Semarang sendiri.²³

Tanpa perlu menyebut contoh yang lain, sekalipun cerita di atas setidaknya bisa menggambarkan dua model toleransi sebagaimana disebut di muka. Sikap toleransi yang muncul di pinggir, setidaknya lewat ekspresi “luru duit wae susah mas...” adalah contoh ekspresi kepasifan dalam rangka membangun ikatan sosial kebersamaan. Apalagi, ini ditambah dengan minimnya kegiatan bersama yang dilakukan oleh warga setidaknya lewat pertemuan RT untuk membicarakan kepentingan warganya. Adapun di tengah, kita ditunjukkan bagaimana keterlibatan aktif dari tiap warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Pertemuan rutin kerap dilakukan, dan perbincangan tentang masalah yang dihadapi menjadi penanda kepedulian warga atas warga lain dan lingkungan sekitarnya. Tidak berlebihan kalau model ini disebut sebagai toleransi aktif dengan jalinan solidaritas sosial yang kuat di antara para warganya.

²²Wawancara pada Jum’at, 6 Juli 2012.

²³Wawancara pada Jum’at, 6 Juli 2012.

Perawatan Toleransi dan Solidaritas Ke-warga-an

Meski “hanya” terjadi di pinggir, kasus keberagaman yang terjadi di Semarang layak untuk disikapi secara serius. Hadirnya kelompok-kelompok yang beraliran keras dalam hal memahami agama di wilayah “pinggir” adalah tantangan yang perlu disikapi semenjak dini. Kehadiran mereka terbukti telah membuat masyarakat tertantang untuk melakukan konfigurasi baru tentang tatanan dan relasi sosial di antara mereka. Kalau tidak ditangani dengan baik, maka sikap radikal dari kelompok garis keras ini akan melahirkan tindak radikal baru yang justru dilakukan oleh warga. Sikap seperti ini pernah terjadi di daerah Gunungpati ketika kelompok *jaulah* akhirnya diusir oleh warga karena perebutan masjid yang tak kunjung urung.²⁴ Penyelesaian konflik dengan tindakan semacam ini bukan tak mungkin akan berulang di tempat lain kalau tidak segera diantisipasi.

Dan untuk itu, kampanye dan praksis toleransi adalah salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk mengikis tindak radikal warga. Toleransi bukanlah sesuatu yang *taken for granted*, melainkan sikap yang dipilih dengan kesadaran akan arti pentingnya sebuah harmoni dan kebersamaan. Ia perlu dirawat dan selalu diperbincangkan, sehingga nilai-nilai yang melekat padanya akan selalu kontekstual. Toleransi ini juga mensyaratkan para pengusungnya untuk mengerti dan memahami posisi masing-masing, sehingga dalam praktiknya, kepentingan warga atau kelompok lain tidak tercederai. Proyek toleransi ala Orde Baru setidaknya bisa menjadi contoh betapa toleransi yang dipaksakan dan dipolitisasi hanya akan menghadirkan kerapuhan sosial yang berakibat fatal.

Dalam konteks perawatan ini, warga Semarang setidaknya sudah memiliki modal yang layak untuk didorong lebih jauh. Kegiatan yang dipertontonkan oleh warga di daerah tengah misalnya, bisa menjadi salah satu mekanisme perawatan yang patut dikembangkan. Apalagi cara yang dilakukan juga tidak *njlimet* dan mahal sebagaimana

²⁴Diskusi terbatas dengan peneliti WMC pada Rabu, 4 Juli 2012

diskusi di hotel-hotel berbintang mewah. Berbekal kesadaran akan pentingnya komunikasi bersama, pertemuan rutin dilakukan, persoalan warga dibicarakan dan tiap warga dilibatkan tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama maupun afiliasi organisasi lainnya. Pada gilirannya tindakan semacam ini akan mendorong lahirnya solidaritas sosial yang kuat.

Tindakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Tengah dalam menyikapi kasus Ahmadiyah juga bisa menjadi contoh bagaimana toleransi dipraktikkan oleh aparaturnegara. Karena sadar posisi gubernur adalah representasi Negara di tingkat provinsi, dan Negara sudah seharusnya netral dalam menyikapi keberagaman. Sang Gubernur cenderung tidak mengambil sikap gegabah dalam menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Jawa Tengah. Sikap ini berbanding terbalik dengan sikap Gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur yang melarang keberadaan Ahmadiyah, padahal pelarangan terhadap Ahmadiyah masih problematik secara konstitusi. Sikap ini semestinya bisa menjadi contoh bagaimana dinamika keberagaman ini dikelola dan disikapi oleh pemerintah.

Sikap lain yang menarik dalam rangka membangun solidaritas keberagaman yang kuat ditunjukkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Sumogawe, Getasan, Kabupaten Semarang. Di sekolah ini, komposisi siswa beragam dan masing-masing dengan jumlah yang cukup besar. Jumlah siswa muslim mencapai 85 orang, Kristen/Katolik 67 orang dan Budha sebanyak 28 siswa. Menyadari keberagaman ini, dengan didukung oleh tokoh masyarakat setempat, dewan guru, wali murid dan lain-lain, tiga tempat peribadatan didirikan di sekolah ini: masjid, gereja, dan vihara, masing-masing berukuran 6 x 6 meter. Tujuannya adalah agar siswa memperoleh pembelajaran agama secara maksimal, baik teori dan praktik. Tak hanya tempat ibadah, pihak sekolah juga menyediakan guru-guru agama Islam, Kristen/Katolik, dan Budha (Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang, tt: 72-74).

Beberapa contoh sikap di atas menunjukkan bagaimana relasi keberagaman di Semarang menunjukkan dinamika yang menarik. Dan

karena itu, layak untuk dibaca lebih jauh. Bukan hanya konflik keberagama(a)n tidak (belum?) sampai meletus menjadi konflik besar, relasi kewargaan yang relatif berbeda di wilayah pinggir dan tengah, juga di struktur yang lebih besar, yakni Negara dan birokrasi di bawahnya yang menunjukkan geliat yang berbeda dengan wilayah lain. Dalam konteks perebutan ruang di wilayah Semarang khususnya dan Pantura pada umumnya, dinamika keberagama(a)n Semarang ini bisa dieksplorasi lebih jauh dengan melihat pergulatan tiga aksis yang saling berjaln kelindan: negara, pasar, dan masyarakat.

Pergulatan: Negara, Pasar, dan Masyarakat

Secara umum, proyek pengaturan agama oleh Negara menemukan momentumnya ketika konsep SARA mulai diperkenalkan pada masa Orde Baru pada tahun 1970-an, di mana Sudomo, Pangkoptantib (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) menjadi aktor utamanya (Sutanto, 2011: 128). Di bawah rezim ini, agama dan gerakan keagamaan mulai “diawasi” karena berpeluang atau dikonsepsikan akan menjadi ancaman yang cukup serius bagi kekuasaan rezim Suharto yang tengah pongah membangun kekuatannya pasca penghancuran gerakan komunisme di Indonesia. Hal yang mencolok dari perwujudan “kekhawatiran” ini di antaranya adalah mulai diaturnya partai-partai di Indonesia dengan proyek fusi partai di mana Pancasila harus menjadi asas tunggal kepartaian baru di bawah rezim ini. Sejalan dengan ini adalah aspirasi umat beragama, khususnya Islam, cukup melalui satu partai, Partai Persatuan Pembangunan, sehingga politik umat beragama mudah diawasi dan “ditertibkan”.

Hasrat pengaturan ini tak luruh meski rezim Orde Baru telah runtuh. Di era reformasi, kita masih menyaksikan bagaimana Negara dengan kewenangan otoritatifnya cukup menunjukkan hasrat yang kuat untuk mengintervensi lebih jauh kehidupan umat beragama di Indonesia. Intervensi ini jelas terkait dengan proyek besar politik regulasi agama di bumi Nusantara ini. Politik regulasi ini dengan mudah diamati lewat kehadiran aturan-aturan yang “baru” terkait

misalnya dengan pendirian rumah ibadah, pembentukan forum komunikasi antarumat beragama dan aturan-aturan lain terkait kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, dan sebagainya. Meskipun ditujukan untuk “mengatur” kehidupan keberagamaan yang lebih baik, dalam banyak kasus, justru aturan-aturan tersebut yang seringkali menjadi biang soal konflik umat beragama di Indonesia.

Sementara pasar selalu mengandaikan kestabilan sosial, ekonomi, dan politik untuk bisa berjalan dengan baik. Dalam situasi yang tak stabil, pasar dan para pelakunya cenderung panik, sehingga aktivitas dan laju ekonomi cenderung tidak pesat. Efek psikologis dari situasi ini dengan mudah bisa diamati, misalnya dengan keengganan para investor untuk berinvestasi, yang nantinya berdampak serius pada anjloknya harga saham dan sebagainya. Dalam situasi *chaotic*, tipe berita semacam ini lazim ditemukan di berbagai media massa. Dalam bahasa yang lain, “aman dan stabil” adalah jaminan bagi keberlangsungan pasar dan rezimnya untuk bekerja. Tanpa jaminan itu, dipastikan pasar akan terus lesu. Dalam hubungannya dengan kehidupan beragama, agama yang dianggap sebagai ancaman perlu diatur, diharmonikan, sehingga pasar bisa berjalan dengan baik.

Di level masyarakat, proyek regulasi agama ini menghadirkan dampak yang luar biasa. Sementara pada satu sisi, ia menghadirkan “jaminan”, namun di sisi lain, ia menghadirkan kecurigaan dan ancaman. Sebagai “jaminan”, masyarakat merasa mendapatkan “pedoman” yang jelas tentang bagaimana misalnya kasus keberagamaan mesti diselesaikan, rumah ibadah mesti didirikan, dan kelompok minoritas perlu diperlakukan. Sebagai kecurigaan adalah ketika jaminan itu menghadirkan sikap saling curiga dalam masyarakat, apalagi ketika jaminan itu ditengarai hanya menguntungkan kelompok mayoritas atau bahkan minoritas. Adapun sebagai ancaman adalah ketika jaminan ini dipolitisasi dan dipakai untuk menekan dan menindas keberadaan yang lain.

Nah, bagaimana melihat pergulatan tiga poros ini dalam konteks Semarang? Pada konteks Negara, intervensi aparaturnegara

dalam kehidupan keberagamaan bisa dibilang berbeda. Dalam kasus Ahmadiyah misalnya, Gubernur Jawa Tengah cenderung tidak mengambil keputusan tertentu mengenai keberadaan kelompok Ahmadiyah di tengah desakan MUI untuk membekukan keberadaan mereka. Di tambah dengan sikap Menteri Agama yang cenderung agresif untuk “memerangi” keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, sikap gubernur ini mungkin sikap yang paling aman dalam menyikapi Ahmadiyah di tengah hiruk pikuk pelarangan Ahmadiyah di berbagai daerah. Sikap yang lebih tegas justru ditunjukkan oleh ketua FKUB Jawa Tengah, Abu Hapsin, yang dengan lantang menolak pembekuan dan pelarangan Ahmadiyah karena itu berarti menghilangkan hak konsitusional warga negara (Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang, tt: 69).

Di level masyarakat, implikasi dari pengaturan agama atau bagaimana kehidupan keberagamaan ini dimaknai cenderung menunjukkan situasi yang dinamis. Sementara, ada hasrat untuk menjadikan aturan yang ada untuk “menjegal” keberadaan “tempat ibadah sementara,” sebagaimana terjadi pada jamaah Hosana di Ngaliyan, sikap mereka terhadap radikalisme yang mengancam juga cenderung tegas. Di sisi lain, muncul juga kecenderungan bagaimana agama tidak terlalu mendapat tempat dalam perbincangan yang serius, karena dianggap sebagai urusan privat. Ini terlihat dari rapat-rapat RT yang dilakukan oleh mereka yang tinggal di tengah di mana isu yang paling sering diperbincangkan adalah isu yang terkait dengan masalah riil mereka sehari-hari, bukan soal agama.

Lalu, bagaimana dengan pasar? Dalam konteks Semarang, mengidentifikasi rezim pasar tidaklah mudah. Posisi Semarang sebagai kota persinggahan dan komunitas di dalamnya yang bergerak dinamis menjadikan analisis mengenai perilaku ekonomi pasar tidak mudah. Untuk itu, melihat pada komunitas yang banyak menguasai perekonomian Semarang mungkin bisa memberikan gambaran awal mengenai bagaimana “pasar” ini memainkan peranannya dalam konteks keberagamaan di Semarang. Dan untuk keperluan ini, melihat komunitas Cina di Semarang bisa menjadi pintu masuk karena

ditengarai banyak pihak, komunitas inilah yang menguasai “pasar” Semarang. Merekalah yang banyak mengendalikan laju ekonomi Kota Semarang. Ini bisa dilihat dari banyaknya industri dari yang besar sampai yang kecil yang digawangi oleh komunitas ini.²⁵

Dalam konteks keberagaman, sebagaimana dituturkan oleh para informan penelitian ini, komunitas Cina adalah komunitas yang cenderung pragmatis. Agama, dan juga etnik, bukanlah hal yang penting bagi mereka. Ke-pragmatis-an ini bisa ditunjukkan misalnya dari banyaknya pegawai yang bekerja di perusahaan atau industri mereka yang rata-rata bukan orang Cina.²⁶ Tindakan pragmatis semacam ini, dalam banyak kasus, ternyata berdampak signifikan dalam konteks mengurai ketegangan identitas Tionghoa dan kelompok lainnya. Ketika demonstrasi dan penjarahan marak di berbagai daerah pada 1998, dan kelompok Cina banyak menjadi titik sasar, aset mereka di Semarang cenderung aman mengingat porak-porandanya perekonomian komunitas Cina akan berdampak besar bagi para pekerjanya yang rata-rata bukan orang Tionghoa. Kepragmatisan kelompok Cina ini dalam menopang kerja ekonomi mereka “selaras” dengan kelakuan rezim pasar yang selalu mengandaikan kestabilan dan keamanan.

Kembali pada pergulatan tiga poros: negara, pasar, dan masyarakat. Dalam konteks Semarang, perebutan ruang oleh tiga kekuatan itu menunjukkan tarik-menarik yang terjadi terus menerus. Pada level Negara, hasrat untuk mengontrol dan mengawasi sebagaimana selama ini ditunjukkan oleh sikap Menteri Agama dalam menyikapi kelompok minoritas misalnya, tidak menemukan ruang pembenarannya ketika Gubernur Jawa Tengah tidak mengambil

²⁵Ini adalah perkiraan umum dari hasil diskusi dan wawancara. Data detail mengenai hal ini belum bisa diperoleh pada penelitian ini mengingat waktu yang sangat terbatas.

²⁶Meskipun pandangan *stereotype* oleh komunitas tertentu terhadap etnik ini masih terus berlangsung, sepertinya ini tidak menjadi soal serius dalam lingkungan kerja.

keputusan apa-apa terkait Ahmadiyah dan Ketua FKUB Semarang yang justru menyatakan bahwa pembekuan dan pelarangan Ahmadiyah melanggar hak konstitusional warga negara. Di level masyarakat, geliat radikalisme menemukan perlawanan oleh kelompok-kelompok yang mapan dengan keberagaman yang selama ini dipraktikkan. Ini, setidaknya, tercermin dari wilayah pinggir Semarang. Sementara di wilayah Tengah, keberadaan forum warga yang dinamis menjadi strategi yang efektif untuk meletakkan persoalan dalam arus perbincangan bersama, bukan pergulatan fisik antar warga.

Sedangkan pasar, dengan melihat komunitas Tionghoa yang menjadi aktor ekonomi yang cukup dominan di Semarang, menunjukkan bagaimana keamanan sosial politik menjadi prioritas utama. Secara umum, pilihan pragmatis dalam merekrut tenaga kerja tanpa memperhatikan etnik dan keberagaman menjadikan relasi antar identitas menjadi cair, bahkan pada titik tertentu menciptakan ketergantungan, sehingga ketika satu bandul bergeser atau hancur akan berdampak pada bandul yang lain. Efek semacam ini, pada gilirannya menciptakan kestabilan tersendiri, dan selanjutnya akan mampu terus menekan gesekan-gesekan massal antara etnik dan kelompok keagamaan.

Perilaku dan dinamika pergulatan tiga axis kekuatan di Semarang ini, nampaknya akan terus berlangsung: masyarakat yang cukup responsif dengan ragam reaksinya dalam menyikapi permasalahan, aparatur negara yang cenderung tidak memihak kelompok tertentu, dan hasrat pasar yang selalu mengandaikan keamanan dan kestabilan. Situasi semacam ini, pada derajat tertentu, setidaknya hingga saat ini, menunjukkan bagaimana Semarang masih “aman” dari pecah dan membludaknya konflik komunal antarwarga. Kalaulah peta semacam ini bisa menjadi “jaminan” keberagaman yang dinamis dan sehat, maka perawatan, kontekstualisasi dan perumusan ulang peta kekuatan ini menjadi tugas serius yang mesti diperhatikan terus-menerus. Ini karena perubahan peta axis kekuatan ini akan berdampak besar bagi dinamika keberagaman di kota atlas ini.

Penutup: Tantangan Radikalisme dari Kampus Umum

Meski perkembangan keberagaman di Semarang menunjukkan geliat berbeda dibanding dengan daerah di sekitarnya, ini bukan berarti kondisi keberagaman di Semarang tanpa tantangan yang berarti. Sementara, geliat di pinggir menunjukkan bagaimana radikalisme sudah mulai menggejala, tantangan lain yang layak untuk dipertimbangkan lebih jauh adalah makin kuatnya kelompok fundamentalisme di kampus-kampus umum seperti Universitas Diponegoro. Fenomena ini tentunya tak bisa dipandang sebelah mata karena posisi mereka sebagai mahasiswa yang sering dianggap sebagai aktor intelektual dan *agent of social change* (penelitian tentang ini akan menjadi fokus penelitian tahun depan) yang diyakini akan membawa perubahan dalam masyarakat.

Sekedar menunjukkan betapa radikalisme ini tumbuh kuat di kampus umum bisa merujuk kepada survei yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia pada tahun 2006 yang menunjukkan bahwa 80% mahasiswa di kampus umum seperti UGM, UNAIR, UNIBRAW, UI dan ITB lebih memilih syariah dari pada Pancasila sebagai dasar Negara (Kompas, 4 Maret 2008). Survei ini setidaknya bisa menjadi indikasi awal betapa pandangan kelompok ini cukup signifikan dalam mempengaruhi pandangan agama para mahasiswa di kampus umum. Khusus di Semarang, UNDIP nampak menjadi ladang persemaian yang cukup massif. Dari informasi sementara yang diperoleh, bukan hanya UNDIP, tapi kampus umum yang lain seperti Universitas Negeri Semarang juga tak luput dari gejala radikalisme ini.

Ini tentunya menjadi PR besar, bukan hanya bagi pemerintah, aktivis toleransi dan kalangan akademisi lain, tapi juga para pemimpin organisasi keagamaan. Kedua kelompok *civil society* terbesar ini mesti lebih aktif dalam mentransformasikan wacana kerukunan dan toleransi yang aktif untuk membangun solidaritas dan memperkuat nalar kewargaan di antara masyarakat. Ini karena sebagai dua kelompok yang paling banyak pengikutnya di Semarang, seringkali umat merekalah

yang akan menjadi obyek radikalisasi kelompok-kelompok baru tersebut. Apa yang terjadi dengan Muhammadiyah adalah contoh bagaimana kehadiran organisasi MTA telah banyak menyedot warganya untuk pindah aliran.²⁷

Keberadaan kelompok-kelompok berfaham keras di kampus-kampus ini ditambah dengan kehadiran kelompok radikal di kawasan pemukiman warga di pinggir menjadikan Semarang dalam kepungan radikalisme keagamaan yang serius. Yang jelas, keberadaan kelompok ini, pada gilirannya akan berdampak pada peta axis kekuatan yang digambarkan di atas. Sangat mungkin peta itu akan mengalami perubahan yang serius, dan ini berarti dampak pada keberagaman di Semarang tak terelakkan. Sebab itu, tentu butuh penyikapan yang serius dalam rangka membangun dan mempertahankan toleransi dan solidaritas kewargaan yang terjalin. Kegagalan untuk mengantisipasi hal semacam ini dan efek domino yang ditimbulkannya akan berdampak pada kondisi masa depan: buyarnya toleransi dan kerukunan bersama yang telah menjadi bagian dari kehidupan warga Kota Semarang. Tentunya, ini bukanlah hal yang diharapkan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

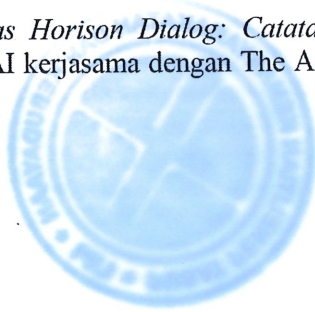
- Anonym. Semarang Kota Paling Aman di Indonesia. Tersedia di: <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/03/29/103655/Semarang-Kota-Paling-Aman-di-Indonesia>, diakses pada 18 November 2012.
- Antara News. 2012. Mahasiswa Semarang Gelar Demo di Mesjid Ahmadiyah. Tersedia di <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1213595982&c=NAS&s=>, diakses pada 14 November 2012.

²⁷Wawancara pada Selasa, 3 Juli 2012

- Anwar, Khoirul. 2012. Masjid Ahmadiyah Gemuh Kendal Ditutup dan Pengususnya Diintimidasi. *eLSA Report on Religious Freedom* Edisi IX Mei 2012: 10-11.
- Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2011. *Kota Semarang Dalam Angka 2010*. Semarang: Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Ceprudin. 2012a. Massa NU Bubarkan Pengajian MTA. *eLSA Report on Religious Freedom* Edisi VI Februari 2012: 8-9.
- Ceprudin. 2012b. Berdzikir, Imam Masjid Dikeroyok Pria Berjenggot. *eLSA Report on Religious Freedom* Edisi VII Maret 2012: 9-11.
- Chetkow-Yanoov, Benyamin. 1999. *Celebrating Diversity: Coexisting in a Multicultural Society*. New York: The Haworth Press.
- Hanna, Milad. 2005. *Menyongsong yang Lain, Membela Pluralisme*. Terj. Mohamad Guntur Romli. Jakarta: Penerbit Jaringan Islam Liberal
- Khalik, Abdul. 2008. Most Islamic studies teachers oppose pluralism, survey finds. Tersedia di: <http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/26/most-islamic-studies-teachers-oppose-pluralism-survey-finds.html>. Diakses pada 18 November 2012.
- Kompas. 2008. *Mahasiswa Tak Minati Pancasila*. Edisi 4 Maret.
- Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang. tt. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2011*. Semarang: eLSA bekerja sama dengan Yayasan TIFA.
- McAfee, Noelle. 2000. *Habermas, Kristeva and Citizenship*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Misrawi, Zuhairi. 2007. *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Penerbit Fitrah.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta:

- Gramedia Pustaka Utama, PPIM, Yayasan Wakaf Paramadina, Freedom Institute, Kedutaan Besar Denmark, Hamid Basyaib.
- Muqtafa, M. Khoirul. 2003. Pluralis Dialogal dan Agenda Baru Agama-agama. *Swara Damai*, Edisi 9 Januari: 19-21.
- Muqtafa, M. Khoirul. 2004. Paradigma Multikultural. Jakarta: *Sinar Harapan*, h.10.
- Setara Institute. 2010. *Toleransi Sosial Masyarakat Perkotaan*. Jakarta: Setara Institute.
- Shokheh, M. 2010. Merespon Tantangan Baru: Dakwah dan Misi di Semarang 1894-1942. *Makalah*, disampaikan pada diskusi terbatas tanggal 14 Desember 2010 di Semarang.
- Sholihan dan Mohammad Sulthon. 2008. *Dimensi Politis dalam Konflik Keagamaan di Indonesia: Studi Kasus terhadap Pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Hosana Ngaliyan Semarang*. Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC) bekerja sama dengan Netherland University of Foreign Cooperation (NUFFIC) Netherland.
- Soleh, Cecep Khoirul. 2012. Solo Memanas, Bom Meledak. *eLSA Report on Religious Freedom* Edisi IX Mei 2012: 6-9
- Suhandjati, Sri *et.al.* 2009. *Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik di Jawa Tengah*. Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC) bekerja sama dengan Netherland University of Foreign Cooperation (NUFFIC) Netherland.
- Sutanto, Trisno S. 2011. Negara, Kekuasaan dan “Agama”: Membedah Politik Perukunan Rezim Orba. Dalam, Bagir, Zainal Abidin *et.al.* 2011. *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: CRCS-UGM dan Mizan.
- The Wahid Institute. 2010. *Laporan Kebebasan Beragama 2010*. Jakarta: The Wahid Institute.

Tim MADIA. 2001. *Meretas Horison Dialog: Catatan dari Empat Daerah*. Jakarta: ISAI kerjasama dengan The Asia Foundation untuk MADIA.





BAB 5

MARGINALISASI DI TUNJUNGAN PLAZA, PUSAT KOTA SURABAYA

Oleh *Syarfina Mahya Nadila*

Pendahuluan

Surabaya, ibu kota propinsi Jawa Timur ini sangat akrab di telinga masyarakat Nusantara sebagai Kota Pahlawan. Kawasan yang merupakan metropolitan di timur Pulau Jawa ini merupakan salah satu pusat perdagangan dan pelabuhan internasional sejak era pemerintahan kolonial. Tingginya percepatan peredaran uang di Surabaya telah menjadikan kota ini menjadi primadona kaum urban mengadu nasib. Seiring dengan perkembangan waktu, total populasi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2010 saja tercatat mencapai 2,757,939 jiwa (BPS-Kota Surabaya Dalam Angka 2010). Laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0.63 per 2000-2010 (BPS-Kota Surabaya Dalam Angka 2010). Tidak mustahil penduduk Kota Surabaya akan terus bertambah 2 kali lipat setiap tahunnya.

Kota Surabaya memiliki luas wilayah sebesar 326.81 km² dengan angka kepadatan penduduk sebesar 8,463 km²/orang (BPS-Kota Surabaya Dalam Angka 2010). Berdasarkan data Bappeko Surabaya, sektor perdagangan, hotel dan restoran telah memberikan kontribusi yang besar dan terus meningkat. Pada tahun 2006 berkontribusi sebesar 36.24%, tahun 2007 kontribusi sebesar 36.73%, dan tahun 2008 kontribusi sebesar naik menjadi 37.81%. (Bappeko, 2011:III-1). Oleh karena itu, wajar bila kota ini kelak akan menjadi kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Peta wilayah Surabaya yang tahun 1825 menunjukkan wilayah masih berupa kampung dan sawah, kini telah menjadi kota yang penuh dengan gedung-gedung bertingkat dan mengalami perluasan wilayah. Berikut gambar peta tahun 1825 dan peta tahun 2003.

Gambar 1
Peta Surabaya 1825



Gambar 2
Peta Surabaya



Sumber: <http://maps.google.co.id>

Surabaya terdiri dari 31 kecamatan yang terbagi ke dalam 5 wilayah. Pada wilayah Kota Surabaya pusat terdiri dari Tegalsari, Simokerto, Genteng dan Bubutan. Pada wilayah Kota Surabaya utara terdiri dari Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, dan Krembangan. Wilayah Kota Surabaya timur terdiri dari Gubeng, Gununganyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tengilis Mejoyo. Wilayah Kota Surabaya Selatan terdiri dari Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karangpilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan. Wilayah Kota Surabaya Barat terdiri dari Benowo, Pakal, Asemrowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri. Dari ke 31 kecamatan tersebut, kecamatan Tegalsari akan dijadikan fokus dalam pembahasan tulisan ini. Adapun alasan pemilihan kecamatan ini sebagai lokasi penelitian karena di kecamatan ini merupakan pusat Kota Surabaya yang terkenal dengan pusat perdagangan, perbelanjaan dan perkantoran. Tempat perbelanjaan yang terkenal adalah Mall Tunjungan Plaza dan Pasar Genteng.

Rencana Kawasan Tunjungan

Pada masa dulu kawasan Tunjungan telah menjadi urat nadi dan *ikon* Kota Surabaya yang memberi perubahan langsung dan tidak langsung bagi Kota Surabaya. Tunjungan merupakan sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat tempat perdagangan dan hiburan serta pemukiman masyarakat. Secara geografi dan administrasi perbatasan Tunjungan terletak di antara *Simpangplein* (persimpangan), Kaliasin. Sebelah Barat berbatasan dengan: Tegalsari, *Juliana Boulevard* (sekarang Jl. Tidar), Kedungdoro, Embong Malang, Blauran, Praban. Sebelah Utara berbatasan dengan: Gemblongan, Kramat Gatung, Baliweti, Jl. Pahlawan. Sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan: Jl. *Simpang Lonceng* (sekarang Jl. Pemuda), Jl. Walikota Mustajab, Jl. Ambengan. Kawasan Tunjungan merupakan daerah yang hampir sama dengan daerah-daerah lain yang berada di sepanjang jalan-jalan raya kota dengan karakteristik utama berupa bangunan-bangunan besar, toko ataupun perkantoran, tempat ibadah, hotel, dan lain sebagainya. Karakteristik semacam itu menandakan bahwa jalan raya sebagai jalur

utama untuk akses transportasi, sehingga memungkinkan Tunjungan termasuk dalam urat nadi jalan kota di Surabaya (Kaifana, 2011:30-31). Kawasan yang dimaksud oleh Kaifana bukanlah kawasan Tunjungan tempat berdirinya Plaza Tunjungan melainkan kawasan Tunjungan yang pada waktu itu berdiri pusat perbelanjaan Siola tidak jauh dari tempat berdirinya Plaza Tunjungan.

Pada sekitar tahun 1950-1970 jalan-jalan di kawasan Tunjungan telah ramai dengan kendaraan-kendaraan seperti bemo, dengan rute: Kebon Binatang–Diponegoro–Arjuna–Rajawali–Perak; Kebun Binatang–Darmo–Kaliasin–Tunjungan–Gemblongan–Jembatan Merah. Selain itu, bus kota, dengan trayek Wonokromo–Tunjungan–Jembatan Merah (pulang-pergi) juga sudah ada. Dokar, trem listrik, kereta api OJS, kereta kosong, juga ada atak²⁸ (Kaifana, 2011: 46-47).

Kawasan Tunjungan pada kala itu memang lebih dikenal sebagai daerah perdagangan, di mana kawasan tersebut termasuk dalam kelurahan Genteng, kecamatan Kranggan. Hal itu berkaitan dengan Keputusan Kepala Daerah Kota Besar Surabaya yang menjelaskan bahwa pada tahun 1952 wilayah kecamatan Kranggan, meliputi Genteng, Embong-Kaliasin, Tegalsari, Kedungdoro, Sawahan dan Simo. Namun, pada perkembangannya pada tahun 1968, Walikota Surabaya menetapkan menjadi tiga wilayah. Ketetapan Walikota ini tertuang dalam Surat Keputusan Kelapa Daerah Kota Besar Surabaya No. 677/K yang berlaku mulai tanggal 9 Oktober 1968, yaitu: *pertama* wilayah Surabaya Utara meliputi kecamatan-kecamatan Tandes, Krembangan, Semampir, Pabean, Tjantjan, Bubutan. *Kedua*, wilayah Surabaya Timur meliputi kecamatan-kecamatan Simokerto, Tambaksari, Gubeng, Sukolilo, dan Rungkut. *Ketiga*, Surabaya Selatan meliputi kecamatan-kecamatan Genteng, Tegalsari, Sawahan, Wonokromo, Wonocolo, Karang Pilang (Kaifana, 2011:32). Lokasi

²⁸Atak adalah alat transportasi yang sejenis dengan taxi. Wawancara dengan Eddy Samson, 24 Juni 2010 di Jl. Asem Mulya IV No. 1 Asem Rowo Surabaya.

kawasan Tunjungan Plaza dibangun, saat ini berada di Kecamatan Tegalsari.

Melihat sejarah kawasan Tunjungan, kawasan ini dijadikan salah satu unit pembangunan Kota Surabaya sebagaimana dituliskan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Tunjungan (UP Tunjungan). Pada rencana detail tersebut tujuan pengembangan wilayah UP Tunjungan adalah untuk mendukung fungsi yang telah ditetapkan dalam RTRW Surabaya yakni diarahkan fungsi utamanya sebagai kawasan permukiman, pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Tunjungan dan mengembangkan kawasan sesuai tema pengembangan, yaitu “Mewujudkan Kawasan UP Tunjungan sebagai Pusat Perdagangan Skala Nasional yang Berkarakter, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan.” (Bappeko, 2011: III-1).

“Berkarakter” diartikan sebagai Kawasan Tunjungan sebagai *shopping street* pusat retail yang cukup besar, perkembangannya beraglomerasi dengan kampung-kampung lama asli Surabaya memiliki karakter khusus sebagai peninggalan artefak kota lama Surabaya. “Berbudaya” memiliki arti kawasan unit pengembangan (UP) Tunjungan yang menyimpan banyak peninggalan cagar budaya dan situs yang perlu untuk dilindungi. Dan “Berwawasan Lingkungan” berarti perencanaan dan pembangunan yang berlangsung di unit pengembangan (UP) Tunjungan harus memegang prinsip *sustainable development* atau pembangunan yang berkelanjutan, sehingga kualitas lingkungan bisa dinikmati (Bappeko: 2011:18). Diharapkan dengan adanya UP Tunjungan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi di Surabaya.

Empat puluh tahun kemudian kawasan ini semakin berkembang dan telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Atas dasar inilah dibuat rencana pusat UP Tunjungan dengan membuat kawasan segi empat emas Tunjungan seperti di bawah ini.

Gambar 3

Rencana Pusat UP Tunjungan: Kawasan Segi Empat Emas Tunjungan
(Jl. Tunjungan - Jl. Embong Malang - Jl. Blauran - Jl. Praban)



Sumber: Bappeko, 2011: III-15

Kawasan UP Tunjungan terdiri dari 4 Unit Distrik dan dari keempat Unit Distrik tersebut akan memiliki Unit Lingkungan. Berikut tabel pembagian struktur wilayah di UP Tunjungan:

Tabel 1
Tabel Pembagian Struktur Wilayah di UP Tunjungan

No	Unit Distrik	Unit Lingkungan
1	UD Simokerto	UL Simokerto
		UL Simolawang-Sidodadi
		UL Kapasan
		UL Tambak Rejo
2	UD Bubutan	UL Jepara-Gundih
		UL Tembok Dukuh
		UL Bubutan
		UL Alon-Alon Contong
3	UD Genteng	UL Kapasari
		UL Peneleh
		UL Ketabang
		UL Genteng
		UL Embong Kaliasin

No	Unit Distrik	Unit Lingkungan
4	UD Tegalsari	UL Kedunggoro
		UL Wonorejo-Tegalsari
		UL Dr. Soetomo
		UL Keputran

Sumber: Hasil Rencana (Bappeko, 2011:III-12)

Setiap wilayah memiliki keunggulan dan kelemahan dalam sektor ekonomi. Untuk mengetahui keunggulan sektoral atau ekonomi basis suatu perekonomian pada suatu wilayah dibandingkan dengan seluruh wilayah suatu daerah dapat diketahui dengan menggunakan metode LQ (*Location Quotient*). Jika nilai LQ lebih besar dari satu maka sektor/subsektor tersebut dianggap sektor yang unggul/kuat dari daerah tersebut atau dengan kata lain daerah tersebut mempunyai keunggulan komparatif atau spesialisasi pada sektor tersebut pada tingkat daerah analisis. Sebaliknya jika nilai LQ kurang dari satu, maka potensi daerah tersebut lemah atau tingkat spesialisasi sektor/subsektor daerah tersebut lebih kecil dari sektor/subsektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih besar atau dalam istilah lain daerah tersebut sebagai pengimpor dari daerah lain. Bila nilai LQ sama dengan satu, berarti tingkat spesialisasi sektor/subsektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama untuk tingkat lebih besar.

Untuk mengetahui keunggulan dari masing-masing kecamatan dan masing-masing kelurahan bisa dibandingkan dengan nilai keseluruhan yang ada di UP Tunjungan. Adapun data yang digunakan adalah jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang dikelompokkan ke dalam masing-masing sektor terdiri dari sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian lainnya, industri pengolahan, perdagangan, jasa, angkutan dan sektor lainnya pada tahun 2010, dengan dasar inilah maka akan terlihat sektor ekonomi mana yang lebih menonjol yang nantinya akan dijadikan basis (Bappeko, 2011:III-5).

Berdasarkan perhitungan LQ didapatkan bahwa yang menjadi sektor basis di UP Tunjungan adalah sektor perdagangan dan sektor jasa. Sektor perdagangan sebesar 1.01 dan sektor jasa sebesar 1.02.

Perkembangan kegiatan perekonomian di sektor perdagangan dan jasa di wilayah UP Tunjungan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan pada wilayah UP Tunjungan merupakan pusat Kota Surabaya serta dilewati oleh jaringan jalan yang merupakan akses regional, sehingga mendorong pertumbuhan wilayah tersebut menjadi kutub pertumbuhan dan perkembangan berbagai macam kegiatan, terutama perdagangan dan jasa. Pada ruas jalan-jalan utama yang melintas tersebut menjadi kawasan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan berkembang untuk kegiatan komersial (Bappeko, 2011:III-5).

Untuk pembagian wilayah UP Tunjungan, UP Tunjungan dibagi lagi kedalam Unit Distrik, dari Unit Distrik (UD) dipecah lagi ke dalam Unit Lingkungan (UL). UP Tunjungan terdiri dari empat unit distrik yaitu, Simokerto, Bubutan, Genteng dan Tegalsari. Diprediksi pada tahun 2031 jumlah penduduk UP Tunjungan menjadi 405,141 jiwa. Dengan jumlah tersebut kepadatan penduduk wilayah Tunjungan diprediksi menjadi 266 jiwa/ha. Jumlah ini termasuk ke dalam kategori wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, karena rentang kepadatan penduduk tinggi adalah 184-262 jiwa/ha (Bappeko, 2011:III-6-III-7). Adapun prediksi luas wilayah, jumlah dan pertumbuhan penduduk di UP Tunjungan pada tahun 2031 dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah, dan Pertumbuhan Penduduk
di UP Tunjungan Tahun 2031

Sistem Perwilayahan		Luas (Ha)	Prediksi ²⁹ Distribusi Penduduk (Jiwa)	Prediksi ³⁰ Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	
Unit Distrik (UD)	Unit Lingkungan (UL)				
Simokerto	Simolawang - Sidodadi	72.88	42,200	579	387
	Simokerto	87.74	23,186	264	
	Kapasari	51.74	16,848	326	
	Tambakrejo	54.11	20,557	380	
Bubutan	Jepara - Gundih	206.89	61,459	297	294
	Tembok Dukuh	56.59	31,384	555	
	Bubutan	85.07	15,595	183	
	Alon-Alon Contong	58.44	8,172	140	
Genteng	Kapasari	33.45	21,387	639	265
	Peneleh	57.98	17,839	308	
	Genteng	53.15	10,887	205	
	Ketabang	138.76	9,694	70	
	Embong Kaliasin	133.67	13,990	105	
Tegalsari	Kedungdoro	75.69	25,530	337	268
	Tegalsari - Wonorejo	121.20	44,177	364	
	Dr. Soetomo	138.42	21,926	158	
	Keputran	95.23	20,311	213	
UP. Tunjungan		1,521.01	405,141	266	

Sumber: hasil rencana (Bappeko, 2011:III-7)

Pada pendahuluan telah disebutkan bahwa tulisan ini akan lebih mengerucut pada kecamatan Tegalsari tempat Tunjungan Plaza dibangun. Pada Unit Distrik Tegalsari terdiri dari Unit Lingkungan Kedungdoro, Tegalsari-Wonorejo, Dr. Soetomo, dan Keputran.

²⁹ Dalam laporan Bappeko disebutkan Rencana Distribusi Penduduk (Jiwa) dalam laporan ini "Rencana" diganti Prediksi Distribusi Penduduk (Jiwa) karena kemungkinan jumlah penduduk yang akan terjadi ditahun-tahun mendatang.

³⁰ Dalam laporan Bappeko disebutkan Rencana Distribusi Penduduk (Jiwa) dalam laporan ini "Rencana" diganti Prediksi Distribusi Penduduk (Jiwa) karena kemungkinan jumlah penduduk yang akan terjadi ditahun-tahun mendatang.

Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di UL Tegalsari-Wonorejo (364 jiwa/ha), kemudian UL Kedungdoro (337 jiwa/ha), Keputran (213 jiwa/ha) dan yang terakhir Dr. Soetomo (158 jiwa/ha). Tingginya kepadatan penduduk ini akan berimplikasi pada banyaknya pemukiman yang harus dibangun di wilayah tersebut.

Dari aspek demografi diprediksi pada tahun 2031 perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di UP Tunjungan terlihat bahwa untuk penduduk terbanyak berada pada usia 26-40 tahun, sebesar 89,276 orang atau sebesar 22.24% dari total penduduk berada pada usia produktif. Untuk angka *dependency ratio* didapatkan *dependency ratio* di Kecamatan Simokerto adalah 61, Kecamatan Bubutan 52, Kecamatan Genteng 74 dan Kecamatan Tegalsari 78. Sedangkan di UP Tunjungan memiliki angka beban tanggungan rata-rata sebesar 65, ini berarti bahwa dalam 100 orang penduduk harus menanggung 65 orang yang tidak produktif (Bappeko, 2011: III-11).

Lokasi kelurahan tempat dibangunnya Tunjungan Plaza adalah di Kelurahan Kedungdoro. Luas Unit Lingkungan Kedungdoro adalah 75.69 ha berpusat pada koridor Jl. Embong Malang–Jl. Basuki Rahmat dengan fungsi utama sebagai perdagangan dan permukiman (Bappeko, 2011: III-13). Fungsi kegiatan pada UL Kedungdoro terbagi dua yaitu fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer sebagai perdagangan dan jasa. Sedangkan fungsi sekunder sebagai kawasan lindung, permukiman, kantor pemerintah/swasta, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum dan tidak diperuntukan untuk industri dan pergudangan (Bappeko, 2011: III-17). Kondisi ini akan berdampak pada tata permukiman di kelurahan tersebut.

Luas area perumahan dan permukiman yang disediakan di wilayah perencanaan adalah 783.13 ha atau sebesar 51.96% dari luas wilayah UP Tunjungan. Luas permukiman di Kecamatan Bubutan adalah 196.78 ha (52.77% dari luas wilayah Kecamatan Bubutan), luas permukiman di Kecamatan Genteng adalah 159.24 ha (38% dari luas wilayah Kecamatan Genteng), luas permukiman di Kecamatan Simokerto adalah 151.93 ha (53.38% dari luas wilayah Kecamatan

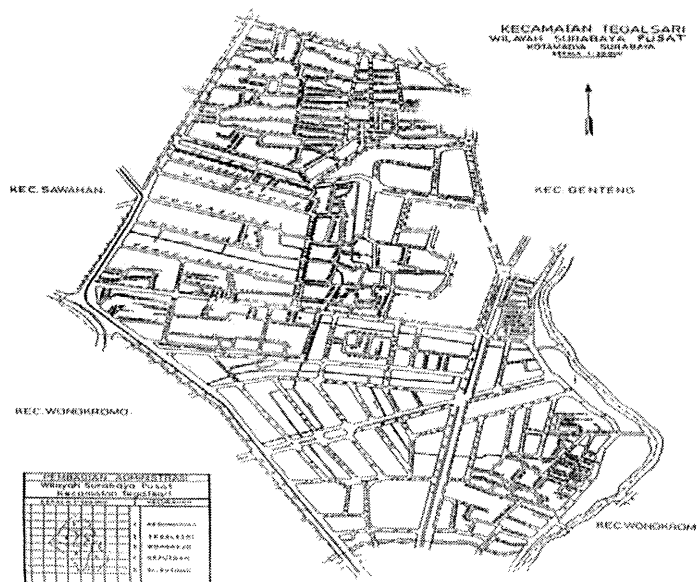
Simokerto) dan luas permukiman di Kecamatan Tegalsari adalah 275.18 ha atau 63.92% dari luas wilayah Kecamatan Tegalsari (Bappeko, 2011:III-79).

Fungsi permukiman di Kecamatan Tegalsari berdasarkan RDTR UP Tunjungan bukanlah fungsi primer tetapi memiliki fungsi sekunder. Meskipun telah diperuntukkan 63.92% dari total luas wilayah Kecamatan Tegalsari untuk permukiman, pada tahap implementasi akan menjadi berbeda bila tidak diawasi penggunaannya dengan baik. Peruntukkan untuk siapa permukiman itu dibangun juga harus menjadi prioritas pemerintah kota. Mereka yang dari kelas sosial bawah juga harus mendapat perhatian dalam hal permukiman mengingat arus urbanisasi buruh-buruh dari luar daerah yang akan datang bekerja ke wilayah ini akan semakin besar, seiring bertumbuhnya pusat kota tersebut.

Kondisi Demografis Kecamatan Tegalsari

Secara geografis kecamatan Tegalsari termasuk ke dalam wilayah Surabaya Pusat, dengan ketinggian ± 1.70 sampai 2.5 meter di atas permukaan air laut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Genteng, sebelah Timur dengan Kecamatan Gubeng, sebelah selatan berbatasan dengan Wonokromo dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sawahan. Luas wilayah seluruhnya ± 4.29 km² terbagi menjadi 5 kelurahan yaitu kelurahan Keputran, Dr. Sutomo, Tegalsari, Wonorejo dan Kedungdoro. Untuk mengetahui letak geografis Kecamatan Tegalsari, berikut peta Kecamatan Tegalsari:

Gambar 4
Peta Kecamatan Tegalsari



Sumber: Diambil dari Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Untuk mengetahui uraian kondisi demografis di Kecamatan Tegalsari berikut tabel jumlah penduduk Kecamatan Tegalsari:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kecamatan Tegalsari

Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2007	Jumlah Penduduk Tahun 2009	Jumlah Penduduk Tahun 2010
Keputran	18,941	21,050	17,412
Dr. Sutomo	19,139	22,820	19,487
Tegalsari	19,848	20,721	19,168
Wonorejo	30,226	25,030	30,542
Kedungdoro	26,690	28,866	25,571
Jumlah	114,844	118,487	112,180

Sumber: BPS Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari dalam Angka 2008, 2010 dan 2011.

Berdasarkan data statistik di atas terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2010 dari tahun 2009 sebesar 6,307 jiwa menjadi 112,180 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak antara tahun 2007, 2009 dan 2010, yakni sebesar 118,487 pada tahun 2009. Untuk Kelurahan Kedungdoro terjadi peningkatan jumlah penduduk ditahun 2009 lalu turun ditahun 2010. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Tegalsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Laju Pertumbuhan Penduduk per Kelurahan Tahun 2000-2010

Kelurahan	Penduduk tahun 2000	Penduduk tahun 2010	Laju Pertumbuhan Penduduk
Keputran	15,418	12,653	-1.9898476
Dr. Soetomo	16,558	13,670	-1.9302699
Tegalsari	15,584	16,769	0.7480778
Wonorejo	23,194	21,948	-0.5599613
Kedung Doro	22,711	20,448	-1.0617568
Jumlah	93,465	85,488	-5

Sumber: BPS Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari dalam Angka 2010.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Tegalsari bernilai negatif dalam kurun waktu 10 tahun. Artinya, jumlah penduduk yang meninggal dan bermigrasi ke tempat lain lebih banyak daripada penduduk yang dilahirkan dan berpindah tempat ke daerah ini. Kondisi ini terjadi karena daerah ini akan dijadikan kawasan pusat jasa dan perdagangan, sehingga daerah pemukiman semakin berkurang. Disisi lain bisa dilihat komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang berguna untuk prediksi angkatan kerja, komposisinya sebagai berikut.

Tabel 5

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia 0-5	6,766	6,005	12,771
Usia 6-9	6,511	7,218	13,729
Usia 10-16	8,717	8,289	17,006
Usia 17	3,270	3,357	6,627
Usia 18-25	8,626	8,461	17,087
Usia 26-40	9,783	10,185	19,968
Usia 41-59	9,174	10,141	19,315
Usia 60+	3,129	2,548	5,677
Jumlah	55,976	56,204	112,180

Sumber: BPS Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari dalam Angka 2011

Tabel di atas memperlihatkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, yaitu sebesar 56, 204 jiwa. Usia penduduk terbanyak berada dalam usia 26-40 dan usia 41-59 jiwa. Pada usia-usia ini termasuk ke dalam usia-usia produksi untuk bekerja dan berkarya. Usia ini diperlukan dalam industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduknya. Untuk mengetahui distribusi tingkat pendidikan berikut tabel distribusi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Tegalsari:

Tabel 6

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Hasil Registrasi Per Kelurahan Tahun 2010

Kelurahan	Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Akademi	Universitas	Pasca Sarjana	Jumlah
Keputran	3,663	2,688	2,472	6,412	456	1,805	123	17,619
Dr. Sutomo	3,533	3,160	2,682	6,902	470	2,592	146	19,485
Tegalsari	4,175	4,340	2,995	6,311	271	993	79	19,164
Wonorejo	6,087	5,726	4,801	11,143	470	2,117	78	30,422
Kedung Doro	5,017	3,852	3,615	10,542	619	1,859	78	25,582
Jumlah	22,475	19,766	16,565	41,310	2,286	9,366	504	112,272

Sumber: BPS Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari dalam Angka 2011.

Tabel di atas memperlihatkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan di masing-masing kelurahan di Kecamatan Tegalsari.

Tingkat pendidikan terbanyak yang dimiliki oleh penduduk Tegalsari berada pada tingkat pendidikan SLTA, yaitu sebesar 41,310 jiwa atau 36.79% dari keseluruhan penduduk. Kelurahan Wonorejo sebagai kelurahan yang menyumbang jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Tegalsari memiliki jumlah penduduk terbanyak untuk tingkat pendidikan SLTA. Pada Kecamatan Kedungdoro terdapat 22.32% tidak bersekolah dari keseluruhan penduduk tidak bersekolah di Kecamatan Tegalsari. Banyaknya penduduk di jenjang SMA masih harus didorong untuk lebih banyak lagi masuk ke dalam jenjang-jenjang perguruan tinggi hingga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Kondisi ini selanjutnya akan mendukung agar pada tahun 2031, pekerja dari Kecamatan Tegalsari bisa masuk ke jenjang pekerjaan manajerial.

Tabel 7

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Registrasi Per Kelurahan Tahun 2010

Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Keputran	0.96	17,412	18,137
Dr. Sutomo	1.38	19,487	14,121
Tegalsari	0.53	19,168	36,166
Wonorejo	0.68	30,542	44,914
Kedung Doro	0.74	25,571	34,555
Jumlah	4.29	112,180	29,579

Sumber: BPS Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari dalam Angka 2011.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tegalsari sebesar 29,579 jiwa/km². Wilayah paling padat adalah Kelurahan Wonorejo sebesar 44,914 jiwa/km² sedangkan Kelurahan Dr. Sutomo adalah yang paling kecil kepadatan penduduknya, yakni sebesar 14,121 jiwa/km². Pada tahun 2010, kepadatan penduduk Kelurahan Kedungdoro adalah 34,555 jiwa/km². Melihat prediksi 2031 kepadatan penduduk di kelurahan Kedungdoro akan bertambah menjadi 337 jiwa/ha. Bila pertambahan jumlah penduduk ini tidak diantisipasi dengan baik akan timbul berbagai permasalahan sosial seperti pengangguran, kekurangan tempat tinggal,

kriminalitas dan lain-lain. Pada tahun 2010 telah terjadi 154 kejadian kriminalitas, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 8
Banyaknya Gangguan Keamanan Menurut Jenisnya Tahun 2010

Jenis Kejahatan	Banyaknya Kejadian Kriminalitas
Pembunuhan	1
Penganiayaan	21
Pencurian	82
Penipuan	16
Perjudian	15
Pengerusakan	2
Penggelapan	14
Penyalahgunaan Narkoba	3
Jumlah	154

Sumber: BPS Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari dalam Angka 2011.

Tindakan kriminalitas terbanyak adalah pencurian sebanyak 82 kejadian, kemudian penganiayaan sebanyak 21 kejadian dan penipuan sebanyak 16 kejadian. Pengurangan tindakan kriminalitas dapat dilakukan dengan cara pembukaan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja dapat diserap pada bidang jasa dan perdagangan sesuai dengan peruntukan kawasan ini ke depannya. Di bawah ini tabel yang menunjukkan kondisi perdagangan dan jasa di Kecamatan Tegalsari.

Tabel 9
Banyaknya Pasar, Pedagang, dan Luas Pasar Menurut Jenisnya Tahun 2010

Indikator	Jumlah
Pasar	
Pasar Pemda	6
Pasar Lainnya	
Pedagang	
Pasar Pemda	2,479
Pasar Lainnya	
Luas Pasar (M ²)	
Pasar Pemda	22,290
Pasar Lainnya	

Sumber: BPS Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari dalam Angka 2011.

Jenis pasar yang ada di Kecamatan Tegalsari adalah pasar Pemda yang berjumlah enam pasar. Jumlah pedagang di pasar pemda adalah 2,479 pedagang. Adapun luas pasar tersebut adalah 22,290 m².

Tabel 10
Banyaknya Mini Market Menurut Kelurahan Tahun 2010

Kelurahan	Mini Market
Keputran	6
Dr. Sutomo	7
Tegalsari	4
Wonorejo	5
Kedung Doro	9
Jumlah	31

Sumber: BPS Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari dalam Angka 2011.

Jumlah mini market yang berada di Kecamatan Tegalsari sebanyak 31 mini market yang tersebar di 5 kelurahan. Kelurahan Kedung Doro merupakan kelurahan dengan mini market terbanyak, yakni sebanyak 9 mini market, sementara kelurahan Tegalsari dengan jumlah minimarket terkecil, yakni sebanyak empat mini market. Pasar-dan mini market yang dibangun dan dikelola oleh komunitas masyarakat sekitar perlu diberikan perhatian besar, mengingat sekitar 20 tahun dari sekarang jumlah penduduk Kecamatan Tegalsari diprediksi sekitar 111,944 jiwa (Bappeko, 2011: III-6). Diharapkan yang dibangun pada masa mendatang bukanlah mall-mall atau supermarket, tetapi pasar dan mini market yang dibangun dan dikelola oleh komunitas masyarakat sekitar. Pasar yang dikelola oleh komunitas selain dapat menjadikan sumber mata pecaharian, sehingga mengurangi pengangguran dan tindakan kriminalitas, juga sekaligus menjadi bukti penguatan ekonomi masyarakat lokal secara mandiri.

Mall di Surabaya

Di Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta dibangun banyak pusat perbelanjaan untuk menopang kebutuhan masyarakatnya dan menambah pemasukan daerah. Tunjungan Plaza

adalah *mall* yang terbesar di Surabaya. Selain itu, terdapat juga pusat-pusat perbelanjaan lainnya yang tersebar di Surabaya. Jumlah pasar atau pusat perbelanjaan modern yang ada di Kota Surabaya sebanyak 123 unit minimarket, yang didominasi oleh Alfamart dan Indomaret, 37 unit supermarket dan 2 hypermarket. Selain itu, Surabaya juga dilengkapi dengan keberadaan sekitar 9 *department store*, 38 *mall* tau pusat perbelanjaan, yang sebagian besar terkonsentrasi di Surabaya pusat dan 14 *supermarket* khusus yang hanya menjual jenis barang tertentu (Bappeko, 2006:9).

Mall-mall tersebut sebagian besar terkonsentrasi di Surabaya Selatan dan Timur (masing-masing 14 unit). Sedangkan di Surabaya Barat (1 unit). Sementara *hypermarket* yang ada saat ini adalah *Carrefour* dan *Giant*, keduanya ada di wilayah Surabaya Selatan (Hal. 9. Studi Pasar Ritel Modern di Surabaya, Bappeko:2006).

Pasar modern yang sering dikunjungi pembeli secara berurutan adalah: *Giant* (72.1%), *Carrefour* (70.1%), *Matahari Dept. Store* (52.1%), *Alfa Supermarket* (38.1%), *Ramayana Dept. Store* (30.1%). Alasan mereka ke Pasar Modern mayoritas untuk belanja (86.8%), jalan-jalan (60.4%), makan-minum bersama (56.3%), bermain/mengantar anak (17.8%) dan nonton film (3.6%) (Bappeko, 2006:3). *Department Store* yang cukup dikenal luas oleh masyarakat Surabaya adalah *Matahari* dan *Ramayana*. Berikut daftar 19 *mall* atau pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya (Bappeko, 2006:9-10).

Tabel 11
Mall/Shopping Center di Surabaya

No.	Mall	Lokasi	Surabaya Area
1.	Tunjungan Plaza 1	Jl. Basuki Rahmad	Pusat
2.	Tunjungan Plaza 2	Jl. Basuki Rahmad	Pusat
3.	Tunjungan Plaza 3	Jl. Basuki Rahmad	Pusat
4.	Tunjungan Center	Jl. Tunjungan	Pusat
5.	Tunjungan Plaza 4	Jl. Embong Malang	Pusat
6.	Surabaya Plaza	Jl. Pemuda	Pusat
7.	World Trade Center	Jl. Pemuda	Pusat
8.	Surabaya Mall	Jl Kusuma Bangsa	Pusat

No.	Mall	Lokasi	Surabaya Area
9.	Tunjungan Center	Jl. Gentengkali	Pusat
10.	Royal Plaza	Jl. A. Yani	Selatan
11.	Maspion Square	Jl. A. Yani	Selatan
12.	Darmo Trade Center	Jl. Raya Wonokromo	Selatan
13.	Golden City Mall	Jl. A. Wahab Siaman	Selatan
14.	Supermall Pakuwon Indah	Jl. Bukit Darmo Boulevard	Selatan
15.	Plaza Marina	Jl. Margorejo Indah	Selatan
16.	Pakuwon Trade Center	Jl. Bukit Darmo Boulevard	Selatan
17.	Galaxy Mall	Jl. Kertajaya Indah Timur	Timur
18.	Jembatan Merah Plaza	Jl. Rajawali	Utara
19.	Indo Plaza	Jl. Stasiun Kota	Utara

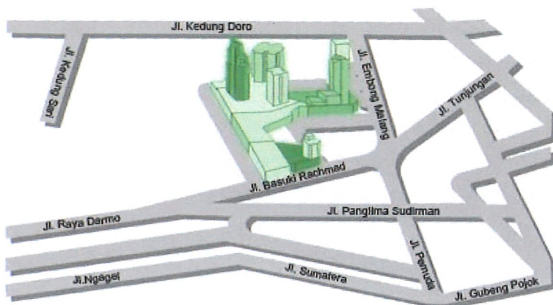
Data diambil dari: (Hlm. 10 Studi Pasar Ritel Modern di Surabaya, Bappeko: 2006).

Frekuensi berbelanja di pasar modern bervariasi antara Supermarket, hipermarket, dan minimarket. Untuk Supermarket 75% pengunjung berbelanja bulanan, untuk hipermarket frekuensi belanja bulanan paling tinggi mencapai 86.4%, sedangkan di minimarket frekuensi belanja bulanan kecil 13.6%; Namun sebaliknya belanja mingguan di minimarket mencapai 63.6%, tertinggi di antara jenis pasar modern lainnya (Sumber: Riset Pasar Modern Carrefour Surabaya, 2006 dalam Bappeko, 2006:3).

Selain *Mall* dan *Shopping Center* seperti tersebut di atas, beberapa *shopping center* akan hadir. Di area Surabaya Barat akan dibangun Sungkono Plaza. Di area Surabaya Pusat akan dibangun *BG Junction*, *Bhutan Trade Mall*, *Crysal Garden*, *Hi Tech Center* Tunjungan, *ITC Mega Grosir*, Pusat Perkulakan Surabaya, *The Empire Palace*, *Gold and Boutique Mall*, *City of Tommorrow*, *Plaza Graha Famili*, Pusat Grosir Wonokromo, *Splazto* akan dibangun di area Surabaya Selatan. *E-Square*, *Galaxy Mall II* dan *Kapas Krampung Commercial Center* akan dibangun di Surabaya Timur. Dan di Surabaya Utara akan dibangun *Atom Mall*, *Jembatan Merah Plaza 3* dan *Pengampon Square*. (Bappeko, 2006:11).

Sebagai *mall* terbesar di Surabaya, Tunjungan Plaza berada di wilayah Surabaya pusat di persimpangan jalan Embong Malang dan jalan Basuki Rachmad, merupakan kategori *Super Block*. *Super Block* adalah kumpulan beberapa pusat perbelanjaan dan toko modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang melayani perkulakan. Menempati lahan minimal 5 ha dan tergabung dalam satu manajemen/administrasi kepengurusan atau kepemilikan (Bappeko, 2011: III-3). Mall ini terdiri dari empat plaza yaitu plaza tunjungan 1, plaza tunjungan 2, plaza tunjungan 3 dan plaza tunjungan 4. *Mall* yang dibangun pada tahun 1986 ini memiliki luas 155,000 m². Berikut denah letak Tunjungan Plaza:

Letak Tunjungan Plaza



Secara lebih detail berikut gambar bangunan *Mall* Tunjungan Plaza:

Gambar Tunjungan Plaza



Meskipun dalam kawasan tersebut berdiri gedung-gedung tinggi dan padat, kawasan samping dan belakang *mall* tidaklah semenarik Tunjungan Plaza. Tepat di sebelah kanan TP 1 terdapat gang kecil yang bernama Jl. Kaliasin Pempa. Di Jalan Kaliasin Pempa ini terdapat pedagang-pedagang kaki lima, rumah makan dan tempat parkir sepeda motor. Berikut beberapa gambar yang diambil saat penelitian lapangan (akhir juni 2012) tentang situasi di Jl. Kaliasin Pempa:

Jalan Kaliasin Pempa



Kondisi Jalan Kaliasin Pempa sudah beraspal, di sisi kanan kiri jalan terdapat rumah-rumah makan, dan tempat parkir motor yang disewakan. Luas jalan aspal di Jalan Kaliasin Pempa tidak begitu luas, nampak di gambar hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Dinding di kanan kiri jalan dipenuhi gambar mural. Bila masuk lebih ke dalam lagi barulah akan terlihat rumah-rumah petak yang tidak beraturan dan tidak tertata dengan baik.

Marjinalisasi Kawasan Sekitar Tunjungan Plaza

Bagian ini akan mendeskripsikan kondisi fisik dan sosial kawasan sekitar Tunjungan Plaza. Untuk mengetahui lingkungan sekitar Tunjungan Plaza tiga orang informan telah diwawancarai. Informan terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan, berusia 22 tahun. Ketiga informan ini berasal dari latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Mereka telah lulus strata I dari Universitas di Surabaya. Informan pertama, WY, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo 4. Informan kedua, RR, dan informan ketiga, DM, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Tempel Sukorejo 1 tepat di belakang Tunjungan Plaza. Mereka telah tinggal di daerah tersebut sejak kecil bersama dengan keluarga inti mereka. Jarak antara rumah tinggal mereka dan Tunjungan Plaza tidaklah jauh, bila menggunakan kendaraan motor memerlukan waktu sekitar 15 menit dengan kecepatan normal.

Lamanya ketiga informan tinggal di wilayah masing-masing akan memudahkan untuk menggambarkan peta wilayah rumah dan Tunjungan Plaza. Para informan diminta untuk menggambarkan lokasi tempat tinggal masing-masing dari arah Tunjungan Plaza. Saat menggambar lokasi tempat tinggal, para informan juga diminta untuk menggambar objek-objek yang ada di sekitar Tunjungan Plaza dan tempat tinggal. Ketiga informan mampu menggambarkan dengan baik di mana lokasi tempat tinggal masing-masing dan juga bangunan-bangunan yang ada disekitarnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh informan, sehingga mampu menggambarkan peta dengan baik, maka dapat membantu mendeskripsikan kondisi marjinalisasi yang terjadi di belakang Tunjungan Plaza dengan kacamata warga yang tinggal dan menetap di wilayah.

Mereka menggambar mulai dengan posisi Tunjungan Plaza di paling kiri, di persimpangan Jalan Embong Malang dan Jalan Basuki Rahmad. Peta ini dilihat dari arah Tunjungan Plaza di Jalan Embong Malang. Di sepanjang jalan ini dibangun Tunjungan Plaza 1, kemudian Tunjungan Plaza 2, hingga Tunjungan Plaza 4 di Jalan Basuki Rahmad. Tunjungan Plaza berhadapan dengan bangunan pertokoan lama yang

Di sebelah Timur Tunjungan Plaza terdapat Jalan Pempa Kali Asin. Sisi kanan kirinya terdapat rumah makan yang berfungsi sebagai tempat makan siang para pegawai Tunjungan Plaza. Masuk ke dalam terdapat banyak tempat kos-kosan sebagai tempat tinggal para pekerja yang bekerja di sekitar Tunjungan Plaza³². Selain kos-kosan banyak juga rumah-rumah petak dibangun di sana. Kondisi ini seperti yang telah disebutkan oleh Purnawan Basundoro dalam bukunya "*Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*":

Terlalu mengumpulnya pusat kegiatan di tengah kota (*central place*) acapkali juga memancing meluasnya wilayah-wilayah kumuh (*slums area*) di wilayah tengah kota itu sendiri. Bagi warga kota kelas bawah yang tempat mencari nafkahnya banyak di wilayah pusat kota, seperti pemulung, sektor informal, tukang becak dan sebagainya, untuk menghemat ongkos transportasi logikanya jelas mereka akan cenderung mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerjanya, yaitu pusat kota. Tetapi karena harga tanah di pusat kota telah melonjak sedemikian tinggi dan wilayah permukiman juga semakin berkurang, sementara tingkat penghasilan mereka pas-pasan, maka pilihan yang biasanya diambil adalah mengontrak rumah di kampung-kampung kumuh di pusat kota atau mendiami stren-stren kali sebagai pemukim liar (Basundoro, 2009:118).

Areal pemukiman yang berupa kos-kosan dan rumah-rumah petak ditandai dengan arsiran. Pada arah selatan dari Jalan Kedung Sari terdapat perumahan padat penduduknya. Saat ditanya dari mana asal para pekerja TP informan mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka berasal dari luar Surabaya³³. Kondisi di wilayah tersebut pada sepuluh

³²Kutipan wawancara dengan WY, 26 Juni 2012 "kan ada gang-gang kecil itu rata-rata sih kos-kos tempat kos", "dari mana sih kurang tau cuman ini kan banyak kos-kos banyak tempat kos, biasanya sih SPG-SPG pegawai-pegawainya di TP itu banyak nginep yang disini".

³³Kutipan Wawancara dengan WY, 26 Juni 2012 "udah-udah ini udah lama sih setau ku kan berhubung aku kalo berobat disini ke puskesmas

tahun yang lalu, tidak terlalu jauh berbeda hanya saja sekarang menjadi sangat padat dengan semakin menjamurnya tempat-tempat makan, rumah kos-kosan. Di seberang Jalan Kali Asin Pompa yang dipisahkan oleh jalan Tegalsari terdapat perkampungan dan pemukiman dengan ukuran rumah-rumah yang lebih besar.³⁴ Di Jalan Kali Asin Pompa juga terdapat tempat parkir motor yang digunakan oleh pengunjung Tunjungan Plaza bila kesulitan mengakses tempat parkir motor di dalam Tunjungan Plaza. Kondisi ini membuat macet Jalan Kali Asin Pompa. Di samping itu, tingkat kriminalitas di Jalan Kali Asin Pompa cukup tinggi antara lain, tindakan kriminalitas pemakaian obat-obatan terlarang.

Karakteris permukiman seperti yang dideskripsikan oleh para informan dan hasil observasi lapangan, permukiman termasuk ke dalam tipe perumahan informal. Berdasarkan cara pengadaannya, perumahan dibagi menjadi 2, yaitu perumahan formal dan perumahan informal. Perumahan formal adalah perumahan yang dibangun secara formal menurut mekanisme pembangunan formal yang berlaku. Ciri ruang fisik perumahan formal adalah terencana dan teratur menurut standar formal, dilakukan oleh sektor publik³⁵ dan swasta (*developer/* pengembang). Sedangkan perumahan informal adalah dibangun tidak melalui mekanisme formal, menurut kemauan dan kemampuan sendiri,

kalo mo minta rujukan ke rumah sakit ke puskesmas kan? Ya itu tempatnya memang seperti itu dulu sampe sekarang yah ada perubahan dikit-dikitlah mungkin lebih banyak warungnya lebih banyak orang-orang yang jualan disitu kalo dulu sih gak..gak sepadat sekarang kalo sekarang itu rasanya kalo aku, kalo mba nya mungkin lewat jalan di samping ini pkl-pkl ini udah macet banget soalnya disini juga ada orang nyediain tempat parkir jadi ada gedung dipake untuk tempat parkir samping-samping jalan ini parkir motor parkir motor itu di samping-samping biasanya kalo aku pengen cepet parkirnya disitu”.

³⁴Kutipan Wawancara dengan WY, 26 Juni 2012 “ini juga daerah perkampungan, semua ini perkampungan sampe ini juga perkampungan padet ini lebih ke perumahan rumah-rumah gede, rumah-rumah gede-gede, bukan perumahan ya, rumah orang tapi rumahnya gede-gede”.

³⁵Dalam hal ini Pemerintah.

sehingga membentuk karakter/ciri yang tidak teratur dan tidak mempunyai prasarana dasar (kampung kota, kampung desa). Biasanya perumahan informal dilakukan oleh swadaya masyarakat dan individu (Bappeko, 2011:III-78). Lokasi di sekitar Plaza Tunjungan dapat dikatakan padat akan bangunan dan pendatang yang mencari pekerjaan dari luar wilayah Tunjungan. Kondisi ini menggambarkan arus urbanisasi yang tidak mampu lagi ditanggung oleh kota di titik-titik pertumbuhan tertentu, hingga menjadikan wilayah ini kumuh dan memunculkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas dan kemacetan.

Penutup

Bertumbuhnya Kota Surabaya menjadi salah satu pusat pertumbuhan di sepanjang Pantura tidak dapat dilepaskan dari masa lalunya sebagai salah satu Kota Pelabuhan pada masa kolonial. Pada masa itu, Surabaya menjadi pintu masuk dan keluarnya barang-barang yang menjadi komoditi di pasaran dunia melalui pelabuhan di muara (sungai) Kalimas. Pada masa selanjutnya, setelah pelabuhan, infrastruktur jalan raya pun dibangun. Jalan raya yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels mulai dari Anyer sampai Banyuwangi lebih dari dua abad lalu ini menjadikan salah satu faktor Surabaya tumbuh dengan pesat sekarang ini³⁶.

Ditengah tumbuhnya pusat-pusat perdagangan di Surabaya, salah satunya yang menarik adalah pusat pertumbuhan Tunjungan. Kawasan Tunjungan sejak dulu telah dikenal sebagai pusat perdagangan. Pada tahun 1970-an kawasan ini telah ramai dengan deretan pertokoan di sisi kanan-kiri jalan. Kawasan ini dilengkapi oleh fasilitas trotoar yang luas dan lebar yang menjadikan tempat ini nyaman untuk berbelanja

Empat puluh tahun kemudian kawasan ini masih tetap menjadi pusat perdagangan, bahkan menjadi pusat perekonomian terbesar di

³⁶ Lihat Bagian Kesimpulan dalam buku ini.

Surabaya. Hanya saja kondisi fisik bangunan banyak yang berubah. Dibangun *mall-mall*, yaitu Tunjungan Plaza 1- 4 di wilayah Tunjungan. ataupun di wilayah lain di Surabaya. Kondisi ini dapat menjadi faktor penarik urbanisasi.

RDTR Surabaya pada tahun 2031 menetapkan kawasan Tunjungan diperuntukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang terintegrasi. Namun, kondisi sekarang terjadi paradoks antara pertumbuhan *mall* beriringan dengan pertumbuhan daerah-daerah kumuh di Kota. Di sekitar Tunjungan Plaza selain terdapat *mall-mall* megah terdapat juga pemukiman-pemukiman kumuh yang dihuni oleh mereka yang mencari pekerjaan di pusat pertumbuhan. Mereka hanya mendapatkan sedikit tempat untuk tinggal dan menetap di pusat kota tersebut. Masalah sosial-spasial warga kota yang semakin menciut karena berdirinya pusat-pusat perdagangan, membuat mereka termarginalisasi ke lahan-lahan sempit di tengah Kota.

Pada tahun 1953, situasi kekurangan lahan untuk pemukiman seperti ini sudah terjadi. Luas Kota Surabaya pada 1953 adalah 82.800.000 meter per segi. Adapun jumlah penduduknya adalah 1.000.000 jiwa, dengan jumlah bangunan perumahan 63.000 buah. Dari seluruh luas kota, yang tergolong tanah kering hanya 49.300.000 meter per segi. Setelah dikurangi untuk persawahan, kuburan, pembuangan sampah, sekolahan, pertamanan, jalan-jalan yang keseluruhannya mencapai 50% dari luas tanah kering, maka yang tersisa untuk pemukiman hanya 24,650,000 meter per segi. Dari luas itu apabila dibagi rata kepada 1,000,000 jiwa penduduk Kota Surabaya, maka masing-masing hanya mendapat 24.5 meter per segi atau lebih kurang 5 X 5 meter. Apabila dihitung dari jumlah rumah yang ada, yaitu hanya 6,000 buah, jika masing-masing keluarga terdiri dari 8 jiwa, maka diperlukan 125.000 rumah. Dengan demikian di Surabaya pada tahun 1953 kekurangan rumah sebanyak 125.000 – 63.000, yaitu 62.000 rumah, atau hampir separuh dari kebutuhan yang ada. Separuh warga yang tidak memiliki rumah sendiri ini sebagian ada yang menyewa, dan sebagian lagi mendirikan rumah-rumah secara tidak sah di berbagai tempat (Basundoro, 2009:120-121).

Hal ini menjelaskan bahwa permasalahan tentang penguasaan lahan akan terus ada seiring dengan bertumbuhnya kota tersebut dan menjadi tujuan urbanisasi. Masalah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota untuk mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya ditahun 2031. Kondisi di Surabaya dapat dijadikan gambaran atau contoh bagi kota-kota lainnya khususnya kota-kota di sepanjang pantai utara (Pantura) dari perkembangan suatu kota yang dulu kecil kemudian menjadi besar.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Bappeko. 2011. *Laporan Akhir Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Unit Pembangunan Tunjungan*. Surabaya: Bappeko (Soft Kopi).
- Kaifana, Lila. (2011). *Kawasan Tundjungan Surabaya Tahun 1950-1970*. Skripsi. Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Bappeko. 2011. *Executive Summary Review Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Unit Pembangunan Tunjungan*. Surabaya: Bappeko (Soft Kopi).
- BPS Kota Surabaya Dalam Angka 2010.
- BPS Kota Surabaya. Kecamatan Tegalsari Dalam Angka 2011.
- BPS Kota Surabaya. Kecamatan Tegalsari Dalam Angka 2011.
- BPS Kota Surabaya. Kecamatan Tegalsari Dalam Angka 2008.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Bappeko (2006). *Studi Pasar Ritel Modern di Surabaya*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Basundoro, Purnawan. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.

<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-14227-3605100009-Chapter1.pdf>

<http://maps.google.co.id>

BAB 6

TRUNOJOYO: GERBANG MADURA YANG SEDANG BERUBAH?

Oleh Anas Saidi

Barangkali tidak ada deposit budaya yang kekayaannya melampaui Pandulungan. Etnis terbesar ketiga di Indonesia ini, tidak henti-henti mengundang rasa penasaran bagi siapa saja yang ingin tahu dari sejumlah “ke-unik-an” yang dimilikinya. Mulai dari corak ke Islaman “tradisional” (Nahdlatul Ulama) yang sangat kental, penjaga tradisi yang paling puritan, mobilitas penghuninya yang sangat tinggi dalam merantau, kuatnya entitas blater yang lekat dengan tradisi caroknya, kepatuhan masyarakatnya pada kyai yang tanpa *reserve* (*sami’na waatho’na*) sampai *stereotipe* yang selalu mengundang rasa jenaka dan kontroversi. Semuanya itu seolah mondar-mandir antara kenyataan dan mitos.

Kuatnya tradisi yang sering ditengarai sebagai filter perubahan, seringkali melahirkan anak kembar. Di satu sisi, modernisasi menjadi tidak secara liar mengancam kebiasaan, mendestabilisasi batas-batas lama, serta merusak tradisi-tradisi yang telah mapan, sedangkan sisi lain perubahan cenderung berjalan sangat lamban. Maka, jadinya, tradisi lebih berfungsi sebagai filter utama terhadap apa saja yang berbau perubahan daripada sebagai energi. Meskipun, tradisi bukan pula sebuah karantina budaya yang beku dan imun terhadap perubahan.

Kompleksitas corak kebudayaan itulah yang nampaknya membuat pulau Pandulungan ini tidak mudah dipahami orang luar terutama dalam waktu singkat. Sudah hampir tiga dekade isu tentang industrialisasi di pulau Pandulungan ini diwacanakan, yang diawali dengan rencana pembangunan jembatan layang itu, telah lama

membuahkan ketegangan antara Jakarta dan Trunojoyo. Pada awalnya 1990-an Menristek BJ Habibie yang memiliki ambisi untuk menjadikan pulau Pandulungan sebagai Batam kedua; bahkan lebih besar lagi. Dengan obsesinya membangun jembatan terpanjang di Indonesia sebagai pintu gerbang industrialisasi, proyek itu direncanakan sebagai bagian dari apa yang disebut dengan Gerbangantara, yang sayangnya kandas di tengah jalan. Rupanya rencana besar itu tidak semulus gagasannya.

Kelompok ulama pulau Pandulungan yang menamakan diri sebagai MUP (Majelis Ulama Pesantren) justru menentang keras rencana itu. Alasan utama MUP, pada waktu itu, jika nanti dibangun jembatan layang dan industrialisasi di mana Kabupaten Trunojoyo dijadikan latarbelakang Jayabaya, para ulama itu khawatir kalau Trunojoyo akan menjadi kota maksiat seperti Batam yang pernah diperkenalkan Habibie. Rupanya upaya Habibie untuk membujuk para ulama dengan melakukan studi banding ke Batam, justru menjadi *boomerang*. Bagi para ulama MUP, Batam bukan tipe ideal industrialisasi yang dibayangkan. Meskipun sejumlah orang berpengaruh terus membujuk para ulama, termasuk melalui pendekatan mantan Gubernur “MN”, yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Pandulungan, rupanya, upaya itu tetap sia-sia. MUP tetap bersikukuh dalam pendiriannya menentang tawaran industrialisasi itu. Apa yang diinginkan oleh MUP adalah jembatan layang minus industrialisasi. Jika industrialisasi harus dilakukan, maka ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi yang intinya: menunggu kesiapan SDM masyarakat Pandulungan, dilakukan secara Islami dan bersifat Indonesiawi.³⁷

³⁷Pada waktu itu, banyak kalangan yang memuji sikap MUP yang menolak pembangunan jembatan yang satu paket dengan industrialisasi. Sikap itu dianggap sebagai upaya untuk melindungi budaya Madura dari arus modernisasi yang dipercayai akan membawa dampak pada sekularisasi. Meskipun begitu, sebagian kalangan—khususnya kelompok terpelajar—berpendapat bahwa sikap para Ulama itu dinilai berlebihan. Bagaimana pun Pandulungan dianggap membutuhkan percepatan pembangunan, khususnya

Setelah sekian lama BJ. Habibie gagal membujuk para ulama, akhirnya ia menyerah dan mengurungkan niatnya untuk membangun jembatan plus industrialisasi di Pandulungan. Dengan rasa putus-asa Habibie dan kecewa dengan sikap para ulama MUP pada waktu itu, akhirnya Menristek itu merencanakan mengalihkan gagasan besarnya ke Lamongan. Meskipun gagalnya pembangunan jembatan layang oleh sebagian ulama non-MUP dan kelompok kelas menengah terdidik disesali, rupanya jembatan yang direncanakan pada tahun 1990-an memakan biaya Rp.500 milyar itu, akhirnya terealisasi juga pada tahun 2009. Meskipun biaya pembangunan jembatan sepanjang 5.4 km itu, membengkak sepuluh kali lipat (menjadi sekitar Rp.5 triliun). Kini, jembatan itu sudah di bangun 3 tahun yang lalu dan telah dilakukan tanpa industrialisasi seperti diinginkan MUP. Banyak perubahan yang terjadi tetapi apakah dampaknya sebesar biayanya. Meskipun rasanya masih terlalu prematur untuk mengevaluasi apakah jembatan terpanjang di Indonesia yang baru berumur tiga setengah tahunan ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Pandulungan.

Gagalnya pembangunan jembatan yang direncanakan secara masak tahun 1990-an yang disusul oleh krisis moneter yang paling kelam tahun 1998, yang menghantarkan jatuhnya rezim Orde Baru, rupanya telah dinilai banyak kalangan malah membawa “*blessing in disguise*” bagi kasus pembatalan pembangunan jembatan. Di satu pihak pemerintah merasa tidak kehilangan muka, karena kegagalan rencana itu lebih disebabkan krisis ekonomi, di lain pihak MUP juga tidak merasa dipaksa untuk merestui sebuah pembangunan yang tidak diyakini manfaatnya bagi masyarakat Pandulungan.

dalam mensejahterakan masyarakatnya yang mayoritas masih miskin, terbelakang dan rendah pendidikannya. Penolakan MUP ditengarai sebagai bagian dari kekhawatiran ulama kehilangan hak-hak istimewanya. Bagi para kelas menengah terpelajar non-bani yang tersebar dalam berbagai jabatan; birokrat, politisi dan LSM, pelestarian politik bani yang bertumpu pada keturunan kyai, mulai diragukan relevansinya dan tidak memadai untuk pendidikan politik masyarakat yang membutuhkan pencerahan yang rasional.

Waktu terus bergulir dan reformasi telah berlangsung. Seluruh penguasa Pandulungan yang pada zaman Orba dikuasai para pejabat militer, dengan gelombang kebebasan politik yang nyaris tanpa tepi, membuat Pandulungan bergeser menuju habitatnya yang paling murni. Seluruh kendali kekuasaan di Pandulungan, telah lukir ke tangan para kyai. Tiga dari empat Bupatiya di Pandulungan berasal dari para kyai yang disegani. Demikian juga hampir seluruh para anggota dewannya berasal dari partai para kyai. Sedangkan para birokratnya yang secara kultural tidak memiliki kewibawaan yang mengakar, semakin mengerucut dalam ketergantungan irama politik yang dikendalikan para kyai tersebut.

Harga yang harus dibayar dari kecenderungan seperti ini, masyarakat madani (*civil society*) menjadi tidak berkembang dan terkukup dalam ketiak negara. Tidak ada lagi kelompok menengah independen yang bebas dari jangkauan kekuasaan negara. Jika di masa lalu ketika para kyai dan pesantrennya menjadi bagian terkuat dalam barisan masyarakat madani yang sangat kritis terhadap Pendopo, kini, para kyai itu telah berubah menjadi bagian dari negara/masyarakat politik (*political society*). Sebagian besar masyarakat pesantren yang di luar kekuasaan, mulai meredup untuk memerankan diri sebagai kelompok oposisional. Apalagi di Trunojoyo, bupatinya, hampir memenuhi kebutuhan yang paling “diidealkan” sebagai prasyarat pemimpin. Ia, cicit dari Kanjeng Sunan, guru dari KH. Hasyim Asy’ari kakek Gus Dur, yang bagi kalangan Nahdhiyin diyakini sebagai “waliyullah”. Sebagai mantan pengusaha pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan jasa perjalanan haji, yang kaya dan memiliki gaya kepemimpinan yang digambarkan sejumlah LSM sangat “otoriter”, menjadi mudah dimaklumi. Dengan komposisi modal yang lengkap tersebut Bupati dengan mudah menundukkan kaum blater, yang biasanya dikonotasikan sebagai “preman”, yang terkenal memiliki akar kekuasaan di wilayah pedesaan. Sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi, dengan cekatan Bupati yang diyakini oleh para birokrat memiliki indra keenam itu, telah mengendalikan seluruh pusat kekuasaan. Akibatnya dengan mudah ia memainkan sejumlah kartu

yang dimiliki. Dengan kata lain, kemampuan Bupati dalam menguasai tiga sumber kekuasaan sekaligus: kyai, blater dan birokrat, membuat kekuasaan yang dikelolanya berjalan nyaris tanpa kontrol yang memadai. Dengan posisi MUP yang sudah tidak lagi kritis, kelas menengah terdidik yang dependen secara ekonomi dan anggota dewan yang tersubordinasi dalam payung politik yang homogen, praktis sudah tidak ada lagi kelompok sosial yang layak dihitung sebagai lawan politik yang berarti.

Tulisan pendek ini akan mencoba mengeksplorasi secara singkat (*rapid assessment*) apa yang telah berubah dalam masyarakat Trunojoyo, setelah semuanya ada di tangan para kyai, khususnya setelah jembatan layang yang memiliki panjang 5.4 km dan memakan biaya 5 triliun rupiah itu dibangun. Apakah Trunojoyo yang menjadi moncong wilayah itu, ikut berubah sejalan dengan terjadinya perubahan infrastruktur yang paling bersejarah dalam masyarakat Pandalungan ini: ataukah perubahan struktur fisik – jembatan itu – hanya sekadar mempermudah jalan menuju Jayabaya dan sebaliknya. Demikian juga – di tingkat makro – apakah reformasi yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat madani (baca: para ulama) untuk merancang masa depannya sendiri, telah memberikan kontribusi positif terhadap masyarakatnya yang selama ini menjadi alasan utama untuk mempertengkkarkan konsep pembangunan yang ditawarkan.

Sekilas tentang Trunojoyo

Bagi mereka yang datang ke Trunojoyo sebelum jembatan itu di bangun, secara sekilas akan memperoleh kesan bahwa tidak terlalu banyak yang berubah di kawasan ini. Kecuali, waktu jarak yang ditempuh ke Jayabaya dan/atau sebaliknya menjadi jauh lebih singkat dengan jalan yang mulus. Meskipun banyak kalangan yang menilai, tarif yang telah ditetapkan untuk jalan tol itu masih terlalu mahal. Sehingga, tidak mengherankan jika tidak terlalu banyak investor yang berkeinginan menempatkan pangkalannya di Trunojoyo. Implikasi ikutan dari adanya tol itu, biaya kapal penyeberangan turun lebih dari

50 persen. Persaingan antara jalan jembatan dengan kapal penyeberangan, membuat masyarakat ada pilihan. Bagi mereka yang tetap memilih kapal sebagai sarana penyeberangan, di samping tarifnya sedikit lebih murah dibandingkan jalan tol, juga jaraknya lebih dekat. Sementara bagi mereka yang menginginkan kecepatan akan memilih lewat jembatan (tol). Hadirnya jembatan tidak sampai mematikan usaha kapal penyeberangan, kecuali menyusutkan volume dan menurunkan harga.

Kesan lain yang cepat terlintas sebagai perubahan di luar jalan yang lebih mulus, adalah banyaknya penyewaan toilet di pinggir jalan – mungkin yang terpanjang di Indonesia –, serta masih kosongnya tanah-tanah di sekitar jembatan. Hamparan tanah kosong itu mengesankan belum adanya kesepakatan pembebasan tanah sebagai bagian rencana industrialisasi yang lebih massif dan menyeluruh. Kesan lain dari perubahan itu, ketika masuk kota, di sebelah kanan terlihat bangunan stadion sepak bola yang mewah, yang konon rumputnya termasuk yang terbaik di Indonesia. Rupanya, seperti umum daerah lain yang sedang menikmati euforia otonomi dengan merayakan identitasnya melalui kesebelasan sepak bola, Trunojoyo juga tidak mau ketinggalan. Olah raga ini dijadikan sarana yang paling efektif untuk menyatukan identitas kedaerahan, sekaligus sebagai sarana untuk melupakan sejenak ingatan kolektif masyarakat atas perbagai masalah pembangunan.

Bangunan lain yang dianggap mercusuar yang masih terus menuai kontroversi adalah *Mall*, yang letaknya berdampingan dengan pasar tradisional. Tidak mudah dipahami bagi mereka yang sensitif atas persaingan antara *Mall* dan pasar tradisional: mengapa kedua pusat perbelanjaan itu harus disandingkan untuk bersaing secara tidak seimbang. Menurut sebagian kalangan DPRD mereka mengaku tidak pernah diajak konsultasi oleh bupati dalam menetapkan keputusan itu. Padahal sebenarnya pasar tradisional itu sudah di bangun lebih dulu. Sedangkan anggota dewan yang lain menyebutkan, meskipun pembangunan *Mall* belakangan dilakukan, sebenarnya *Mall* itu lebih dulu mendapatkan izin. Apapun argumentasi yang dikemukakan di

balik pembangunan *Mall* itu, kini *Mall* megah yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta itu, baru diresmikan pembukaannya sebagai simbol kebanggaan sekaligus keprihatinan.

Sementara Kabupaten Trunojoyo sendiri memiliki 18 kecamatan yang meliputi 381 desa/kelurahan. Luas wilayahnya mencapai 1.261,81 km² dengan jumlah penduduk 973.681 (2009) jiwa. Rata-rata tingkat kepadatan penduduknya sebesar 2.188 jiwa/km² dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,74% per tahun. Yang menarik dari Kabupaten Trunojoyo adalah terlalu banyak pegawai negerinya. Jumlah “abdi negara” ini telah mencapai 9.862 PNS. Belum lagi para honorer yang konon jumlahnya lebih dari 6.000 orang.

Dari jumlah pegawai yang ada, sebagian besar golongan III dan IV (68%) dan 62,5% para lurahnya berpendidikan sarjana. Kesenjangan pendidikan aparatur pemerintah ini berpiramida terbalik dengan tingkat pendidikan para penduduknya. Terlalu besarnya jumlah PNS dan para honorer yang terus diterima, nampak membebani APBD. Dari jumlah APBD tahun 2010, misalnya, Rp.719.093,5 juta (74,76%) digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan dari segi pendapatan, ketergantungannya dengan pusat sangatlah tinggi. Dana yang berasal dari perimbangan mencapai 86,59%, sedangkan PAD-nya hanya 4,79%.

Yang paling mengejutkan dari kondisi Kabupaten Trunojoyo ini adalah masih terlalu tingginya tingkat kemiskinan. Jika tingkat kemiskinan nasional sekitar 12,49%, menurut data rata-rata kemiskinan di Trunojoyo tahun 2010, telah mencapai 58%. Kecamatan yang terendah tingkat kemiskinannya ada di kecamatan Klampus (19, 20%) sedangkan yang tertinggi ada di kecamatan Ramai (88,84%) (lebih jelasnya lihat tabel 1). Angka ini benar-benar tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Mengingat di tingkat nasional – seperti dilaporkan harian Kompas (4/7/2012) – persentase penduduk miskin antara lain ada di wilayah: Maluku dan Papua (24.77%), Bali dan Nusa Tenggara (15.11%); Sumatra (12.07%), Sulawesi (11.78%); Jawa (11.07%),

Kalimantan (6.69%). Mengacu pada data BPS persentase kemiskinan tahun 2011 turun menjadi 12, 49%. Meskipun angka tersebut banyak mengejutkan para anggota dewan, tetapi mereka umumnya mengakui memang tidak ada program khusus yang memprioritaskan pengentasan kemiskinan, termasuk *public services* seperti umumnya yang terjadi di kabupaten lain.

Tabel 1: Keluarga Miskin (Gakin) Menurut Tahapan Keluarga Tahun 2010

Kode	Kecamatan	Kepala Keluarga	Miskin sekali	Miskin	Jumlah Gakin	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Kanal	11.063	1.122	1.777	2.899	26,20
020	Lebeng	10.651	2.409	3.889	6.298	59,13
030	Kwanyir	13.545	3.090	5.940	9.030	66,67
040	Mendung	12.545	3.836	5.233	9.069	72,29
050	Blegah	16.167	7.531	5.671	13.202	81,66
060	Konangan	10.724	5.122	4.350	9.472	88,33
070	Gelisan	17.662	5.157	6.760	11.917	67,47
080	Tanah Putih	15.960	4.578	6.309	10.887	68,47
090	Tengah	7.705	1.657	2.841	4.498	58,38
100	Bocah	13.343	1.022	4.395	5.417	40,60
110	Trunojoyo	17.421	599	2.970	3.569	20,49
120	Bener	12.347	589	2.970	3.049	24,49
130	Arosderas	18.279	*	10.496	13.270	72,60
140	Ramai	12.168	*	6.049	10.810	88,84
150	Kakap	13.570	4.199	3.573	7.772	57,27
160	Tanjung Bulan	11.494	4.340	*	8.481	73,79
170	Sepuluh	15.607	425	*	9.375	60,07
180	Klempis	11.411	*	1.713	*	19,20
Jumlah/ Trunojoyo	241 662	56 089	85 117	141 206	58,43	
2009	211 560	56 962	81 962	138 950	62,68	
2008	231 927	57 159	80 788	137 947	59,48	
2007	226 864	56 895	79 235	136 130	60,01	
2006	221 687	56 927	80 984	137 911	62,21	
2005	218 443	62 137	87 812	149 949	68,64	

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dalam Trunojoyo Dalam Angka.

* Data tidak tercapai.

Sementara itu, dilihat dari struktur ekonominya, Trunojoyo terkenal dalam perdagangan retailnya dari pada *corporate*. Sejak Koentowijoyo melakukan penelitian tahun 1990-an, sampai hari ini

struktur ekonomi itu rupanya tidaklah terlalu banyak berubah. Perkembangan yang mencolok baru dalam jenis bisnis kecil yang bersifat perorangan. Dibandingkan dengan dekade 80-an, memang telah menunjukkan perkembangan yang berarti. Misalnya, jika dalam periode 1985-1989, usaha perorangan hanya mencapai 347 usaha, pada tahun 2005 naik mencapai 568 usaha. Tidak diketahui secara pasti, mengapa dalam perkembangan tahun 2005-2010, justru mengalami penurunan menjadi 231 usaha saja. Apapun penyebabnya, yang jelas jika dilihat dari perkembangan organisasi perusahaan di Trunojoyo, paska jembatan layang, ternyata kurang memiliki dampak yang signifikan. Bahkan, setidaknya dalam periode pertama (2009-2010), untuk CV telah turun dari 79 menjadi 33 dan untuk PO dari 320 buah menjadi 231 buah.

Tabel 2: Perkembangan Organisasi Perusahaan di Trunojoyo tahun 1985-1989.

Organisasi Perusahaan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Total
	1985	1986	1987	1988	1989	
PT	-	2	-	2	-	4
CV	3	18	9	5	3	38
Koperasi	-	-	-	-	-	-
Firma	-	-	-	-	-	-
Perorangan	69	189	44	52	50	347
Pemerintah	-	3	2	-	-	5

Tabel 3: Perkembangan Organisasi Perusahaan di Trunojoyo tahun 2005-2010.

Tahun	PT	Koperasi	CV	PO	Total
2005	10	11	72	568	661
2006	12	11	88	457	568
2007	20	24	67	431	542
2008	11	9	79	334	419
2009	19	9	79	320	427
2010	19	8	33	231	291

Sumber: Trunojoyo dalam Angka 2011.

Karena itu, tidak mengherankan jika hampir semua informan yang diwawancarai mengatakan bahwa hadirnya jembatan layang

baru sebatas mempermudah jarak tempuh dari Jayabaya-Trunojoyo. Belum adanya dampak ekonomi yang secara berarti telah men-sejahterakan rakyat Trunojoyo, khususnya bagi kelompok eceran yang menjadi ciri bisnis di Trunojoyo. Bahkan secara sinis, ada yang mengatakan bahwa dampak yang paling nyata dari jembatan itu hanyalah menjamurnya penyewaan toilet, yang mungkin terpanjang di Indonesia dan restoran mewah milik keluarga Bupati.

Tabel 4: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tahun 2010

No	Bulan	PT	Koperasi	CV	PO	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Januari	3	-	4	20	-	27
2	Februari	-	2	1	20	-	23
3	Maret	2	-	3	26	-	31
4	April	1	2	4	21	-	28
5	Mei	-	1	6	14	-	21
6	Juni	2	1	2	23	-	28
7	Juli	-	1	1	8	-	10
8	Agustus	-	1	-	9	-	10
9	September	4	-	3	19	-	26
10	Oktober	6	-	3	26	-	35
11	November	1	-	3	23	-	27
12	Desember	-	-	3	22	-	25
Jumlah		19	8	33	231		291
2009		19	9	79	320	-	427
2008		11	9	79	334	3	436
2007		20	24	67	431	-	542
2006		12	11	88	457	-	568
2005		10	11	72	568	-	661

Sumber Data: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Trunojoyo.

Indikator lain atas tidak adanya perubahan yang signifikan jembatan itu, kecuali secara terbatas, setelah makam Kanjeng Sunan, di pugar Bupati, adalah semakin banyaknya masyarakat yang berziarah. Perkembangan penginapan jika bisa digunakan sebagai indikator untuk wisata yang menginap di Trunojoyo, ternyata juga tidak berkembang secara signifikan. Di Trunojoyo sejak sepuluh tahun terakhir ini, nyaris tidak ada hotel baru. Hotel Brama, yang merupakan hotel terbesar di

Trunojoyo yang memiliki 31 kamar, pada tahun 2010, telah dikunjungi tamu 5.162 orang wisnus dan 14 wisman. Sedangkan Mess KPN yang memiliki 13 kamar, dikunjungi 3.548 Wisnus; Losmen Bulan yang memiliki 17 kamar, dikunjungi 2.642 Winus. Sayangnya tidak ada data sebelumnya yang dapat digunakan sebagai perbandingan. Minimnya wisma selama sepuluh tahun yang hanya dikunjungi 14 wisman, menggambarkan betapa Trunojoyo belum menjadi tempat tujuan wisata yang menjanjikan.

Singkatnya, Trunojoyo sebagai pintu gerbang terdepan jembatan layang, yang secara ekonomi seharusnya paling banyak mengambil manfaat keuntungan dari kedekatannya dengan ibukota propinsi, ternyata masih jauh dari harapan. Mahalnya biaya tol yang ditetapkan umumnya belum dianggap sepadan dengan kemudahan yang diberikan. Demikian juga, macetnya proses pembebasan tanah sebagai konsekuensi pertarungan antara BPWS dengan Pemda yang belum menemukan jalan keluar, membuat para investor enggan untuk melakukan spekulasi yang penuh resiko (khususnya dalam bidang keamanan). Masyarakat di Trunojoyo hanya sedikit mengambil manfaat para peloncong dari Jayabaya yang sekadar ingin melihat Jembatan, ziarah di kuburan Kanjeng Sunan, atau sekadar belanja batik di kota Bulan. Sehingga, jika harus dilihat terjadinya perkembangan yang cukup mencolok adalah banyaknya warung atau restoran baru yang bermunculan di kota ini.

Dinamika Politik Trunojoyo

Barangkali tidak ada wacana yang paling menarik dibicarakan di Pandulungan, melebihi masalah politik. Ekologi budaya yang sangat kental wilayah santri, yang sebagian besar daerahnya tidak subur, yang memaksa para penghuninya cenderung merantau, membuat seluruh struktur ekonomi dan geografisnya sangat mempengaruhi, wajah orientasi politik yang ada. Pada zaman Orde Baru –berbeda dengan wilayah Indonesia– yang umumnya dimonopoli Golkar, di Trunojoyo partai kyai melakukan perlawanan yang paling gigih. Meskipun secara pelan-pelan akhirnya berhasil di Golkarkan. Namun, setelah reformasi

berjalan partai kyai itu kembali berkibar. Golkar disapu habis oleh PKB (sebelumnya oleh PPP).

Nampaknya, Trunojoyo sangat terlambat dalam mengambil manfaat proses transisi demokrasi dari yang seharusnya. Era Reformasi yang melanda pulau Pandalungan itu, memang telah menampilkan sebuah perubahan baru yang mendasar. Golkar, yang menjadi ikon Orde Baru, telah tergusur dilibas habis oleh politik kyai (PPP-PKB), yang meletakkan basis ideologis keagamaannya pada Nadhatul Ulama sebagai navigator baru dalam mengendalikan kekuasaan. Hampir seluruh Bupati di 4 kabupaten di Pandulungan ini – kecuali Bupati Kologemet – adalah “kyai” yang sangat dihormati. Organisasi keagamaan yang dipimpin para kyai yang pada mulanya ada di luar kekuasaan sebagai pengontrol kekuasaan, kini telah berubah menjadi masyarakat politik yang berdampingan dengan kekuasaan. Absennya peran ini dalam mengontrol jalannya kekuasaan, ikut menyusutkan peran sejumlah lembaga lama seperti MUP, yang kini nyaris tidak terdengar lagi sikap kritisnya sebagai lembaga “peringat”.

PKB yang sempat mendominasi DPRD yang memperoleh kursi 25 dari 45 kursi yang ada pada pemilu 1999-2004, kini anjlog sekitar hanya mendapat 10 kursi, akibat perpecahan dalam tubuh PKB. Meskipun secara *de facto* partai yang didirikan Gus Dur ini mengalami penurunan secara signifikan tetapi secara kultural basis organisasi keagamaannya tidaklah berubah. Ada sejumlah perkiraan atas menurunnya angka perolehan pemilu 2008 ini. Salah satunya adalah perpecahan PKB antara kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur. Sebagai pengikut Gusdurian yang fanatik³⁸, sikap Muhaimin dianggap “melecehkan” Gus Dur. Dan hal ini membuat partai yang dulu bersemboyan “membela yang benar” itu, banyak berhijrah ke partai lain hingga menyusut lebih dari separuh. Sisanya, di luar di PKNU (5 kursi) bertebaran di partai lain, yang kini sedang menjadi tren baru pasca-reformasi.

³⁸Wawancara dengan anggota DPRD-PKB, pertengahan Juni 2012.

Tabel 5: Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 1982-2010

No	Hasil Pemilu	ABRI	PPP	Golkar	PDI-P	PAU	PKB	Pembaharuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1982	6	22	12					40
2	1987	9	17	18	1				45
3	1992	9	13	22	1				45
4	1997	9	15	21					45
5	1999	5	-	3	7	5	25		45
6	Revisi 2005	-	9	-	-	-	25	11	45
7	1999-2006		9	-	-	-	25	11	45
8	2007		9	-	-	-	25	11	45
9	2008		9	-	-	-	25	11	45

Tabel 6: Anggota Fraksi di DPRD di Kabupaten Trunojoyo

No	Fraksi	Pimpinan	Komisi A	Komisi B	Komisi C	Komisi D	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	FKB	1	4	3	2	4	14
2	F. Demokrat	1	-	1	1	1	4
3	F. PPP	1	1	1	1	1	5
4	F. KNU	1	1	1	1	1	5
5	F. Pembaharuan Nurani	-	2	2	2	1	7
6	F. Reformasi Perjuangan Rakyat	-	2	2	3	2	9
Jumlah		4	10	10	10	10	44

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Trunojoyo

Di luar Golkar dan PDI-P, rupanya partai-partai baru itu tidak dimaknai sebagai partai sekuler yang biasanya dilawankan dengan tradisi Trunojoyo yang basis kulturalnya tetap NU.³⁹ Nano-nananya partai politik di sini, kata seorang politisi muda dari PPP, tidak pernah keluar dari tradisi NU sebagai basis kultural keagamaannya. Bahkan PAN yang sekarang mendapatkan 4 kursi di dalamnya juga dari kelompok Nahdliyin. Salah satunya adalah anak Bupati (R. KH Panji) Gus Fais, yang sekarang sedang mencalonkan diri menjadi Bupati

³⁹Wawancara dengan anggota DPRD dari PDI-P, 26 Juni 2012.

untuk menggantikan ayahnya yang jabatannya berakhir bulan Desember 2012.

Secara berkelakar Bupati yang sekarang, Raden KH Panji, pernah menyatakan sebentar lagi, PAN (baca: Muhammadiyah) akan memiliki Bupati yang pertama di Trunojoyo. Heterogenitas kultural yang dimasa lalu dianggap sangat sensitif, secara pelan-pelan sudah mulai cair. Ditanamkannya putra mahkota di Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikonotasikan partainya Muhammadiyah, merupakan percobaan yang berani. Semuanya itu hanya memperlihatkan betapa *powerfullnya* bupati ini. Banyak kalangan yang merasa was-was terjadinya destabilisasi politik sepeninggalnya Bupati ini. Gus Fais dianggap terlalu muda (belum ada 30-an) dan sama sekali tidak memiliki jam terbang dalam dunia politik. Meskipun begitu, tidak ada satu partai pun yang berani menandingi calon Bupati itu, kecuali dari PKNU yang akan mengusung Gus Muslim, yang sebenarnya masih sama-sama keturunan Kanjeng Sunan. Seluruh partai sepenuhnya terkendali dalam jangkauan Bupati, sehingga tidak ada satupun anggota dewan yang berani bersikap kritis, yang mengatasnamakan partai. Kekuatan Bupati jauh melampaui partainya PKB yang mengunggulnya. Sebagian besar informan yang diwawancarai, selalu menyisipkan pesan “*off the record*”, meskipun isinya sama sekali tidak mengkritik secara langsung kebijakan Bupati. Suasana ini, nampaknya, meminjam istilahnya Foucault dalam suasana Panoptikon. Perasaan yang merasa selalu diawasi secara berlebihan oleh pengawas tak terlihat.

Fakta seperti ini, membuat sebagian dari LSM (“plat hitam”), setidaknya bagi salah seorang tokohnya, menafsirkan bahwa kenyataan seperti itu sesungguhnya merupakan bagian dari skenario Bupati, untuk menaruh kesan bahwa di Trunojoyo seolah benar-benar ada demokrasi, terutama jika dilihat heterogenitas partai yang ada. Strategi itu, katanya juga digunakan oleh Bupati untuk menguji daya tawarnya di kalangan para kyai, yang dimasa lalu sangat sensitif atas munculnya kekuatan politik di luar NU, khususnya yang berbasis Muhammadiyah. Ditanamkannya putra mahkota menjadi kader di PAN, hanyalah sebagai upaya pembelian kesan politik, daripada upaya sungguh-

sebenarnya yang bersifat ideologis. Dengan tiadanya reaksi para kyai atas percaturan politik seperti ini, membuktikan bahwa Bupati terlalu *powerful* dihadapan siapapun, termasuk para kyai yang selama ini menjadi rujukan tunggal para umat.⁴⁰ Meskipun begitu sikap Bupati dalam memainkan kartu politiknya, seringkali dianggap tidak konsisten. Terutama jika sudah berkaitan dengan keinginan politiknya. Persengketaan yang tiada henti dengan BPWS dalam rencana industrialisasi di Trunojoyo, yang membuat rencana pembebasan tanah mengalami kemacetan. Di hadapan para kyai pendukungnya Bupati sering kali mengingatkan jika sampai terjadi industrialisasi (baca: di bawah kendali BPWS), maka akan bermunculan gereja di Trunojoyo. "Semua kyai secara bersama saling bersahutan menyalah "astaghfirullah".⁴¹ Upaya Bupati dalam menolak modernisasi yang dikawatirkan disponsori BPWS yang merupakan perwakilan dari pusat ini, dianggap oleh para kyai sebagai pembelaan Bupati terhadap wejangan KH. Kalijaga, bahwa "bangunlah Pandulungan dan jangan membangun di Pandulungan", yang bagi masyarakat Trunojoyo dianggap wasiat agung. Upaya BPWS yang tidak melibatkan orang Pandulungan di dalamnya, yang menjadi alasan Bupati untuk tidak mau kompromi dengan BPWS, bagi kalangan kritis dianggap merupakan bagian strategi Bupati untuk memperjuangkan keinginannya, agar Pemerintah Daerah dilibatkan sebagai aktor utama dalam pembebasan tanah dan bukan oleh BPWS.⁴² Sementara itu, oleh para pendukungnya dianggap sebagai strategi Bupati untuk memperjuangkan masyarakat Trunojoyo untuk terlibat penuh dalam pembangunan daerahnya sendiri, seperti yang diwasiatkan KH. Kalijaga.

Apapun tafsirnya terhadap tingkah-laku politik Bupati, Nampaknya ia merupakan pemain ulung dalam memindahkan setiap bidak catur politiknya, khususnya dalam menghadapi setiap perubahan yang dihadapi. Kepiawaiannya dalam mengelola kekuasaan mulai dari

⁴⁰Wawancara dengan tokoh LSM plat "hitam", awal 11 Juni 2012.

⁴¹Wawancara dengan salah seorang kyai yang dekat dengan Bupati, awal Juni 2012.

⁴²Wawancara dengan tokoh LSM, 26 Juni 2012.

menundukkan kelompok blater, kewibawaannya yang nyaris tanpa batas berkat dampak ikutan sebagai cicit Kanjeng Sunan, serta pengalamannya sebagai pengusaha besar pengiriman TKW dan jasa perjalanan haji di Jayabaya, sampai mantan anggota DPR-RI, membuat figur Bupati ini merupakan sosok yang paling komplisit sekaligus yang paling kontroversi dibandingkan siapapun Bupati yang ada di Pandulungan.

Ketika awal dipilih menjadi Bupati, mantan anggota DPR-RI ini, telah memperlihatkan sejumlah fakta betapa *powerfullnya*. Sejak awal terpilihnya, ia sudah digugat oleh sebagian aktivis kritis tentang keaslian ijazah SLTA-nya yang mengaku diperoleh dari salah satu Sekolah Menengah Atas di Jakarta. Kemudian ketika diketahui “ketidakasliannya”, berubah mengaku dari Aliyah Girimulyo yang ternyata juga diragukan atas ketidakcocokan tahun ijazah dengan berdirinya Madrasah Aliyah tersebut. Belakangan gelar SPd-nya diperoleh dari salah satu Universitas di Trunojoyo. Dengan para penggugatnya, ia dengan santai berseloroh, “jika ijasahnya asli maka saya tidak hanya menjadi Bupati tetapi akan menjadi Gubernur”.⁴³ Apapun fakta yang sebenarnya terjadi, berkat kepiawaiannya dalam mengelola kekuasaan, sampai dua periode menjadi Bupati, tidak satupun para penggugatnya yang berhasil memperkarakan “ketidak-aslian” ijazahnya melalui jalur hukum. Sebagai cicit Kanjeng Sunan, yang paling tua dan paling senior dalam jajaran *trach* kyai yang ada sekarang, ditambah penguasaannya atas kaum blater, nyaris tidak ada figur kepimpinannya yang dapat menandingi “kedigdayaannya”.

Bahkan, popularitasnya masih terus bergaung sampai hari ini. Meskipun masa jabatannya akan berakhir tanggal 12-12-2012 nanti. Dalam salah satu survei, yang dilakukan salah satu LSM yang berpusat di Pematang, telah menunjukkan seandainya Bupati ini masih dimungkinkan untuk dipilih lagi, ternyata ada sekitar 80% responden yang akan memilihnya kembali. Angka ini, tidak jauh berbeda dengan perolehan jabatan kedua ketika Bupati dipilih langsung (sekitar 82%).

⁴³ Wawancara dengan salah satu tokoh LSM, 15 Juni 2012.

Bahkan, angka itu melampaui kekuatan bani Kanjeng Sunan secara keseluruhannya mencapai angka sekitar 75%⁴⁴. Jika hasil survei ini mencerminkan realitas yang sebenarnya, maka kewibawaan bani Kanjeng Sunan yang masih mencapai 75% itu, membuktikan bahwa politik patronase yang mengandalkan politik dinasti, agaknya masih akan berlangsung lama dalam mendominasi panggung politik lokal di Trunojoyo. Apalagi dalam pemilihan Bupati yang akan diselenggarakan 12 Desember 2012 itu, calonnya masih di seputar para cicit Kanjeng Sunan (Gus Fais, anak Bupati, dan Gus Muslim, anak Kyai Kalijaga yang keduanya masih darah Kanjeng Sunan).

Fakta sosiologis ini seringkali melahirkan ketidaksabaran di kalangan golongan menengah terpelajar yang non-bani. Politik bani dianggap merugikan proses percepatan perubahan yang lebih demokratis di Trunojoyo. Kedua calon Bupati yang *trach* bani itu, sama-sama dianggap kurang memadai untuk dipilih sebagai calon Bupati. Para pembaharu yang sebagian besar generasi muda terdidik masih merasa harus menanti di ruang tunggu, kapan perubahan yang rasional dalam sistem demokrasi substansial itu akan dimulai. Sebagian di antara mereka sangat pesimis bahwa perubahan itu akan terjadi dalam waktu pendek. Pertama-tama bukan hanya masih kuatnya cengkeraman kekuasaan yang dikendalikan kelompok *bani*, tetapi juga oleh tipisnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya sebuah perubahan demi akuntabilitas dan keterbukaan yang dibutuhkan. Bagi sebagian besar penduduk, rasa aman yang berhasil diciptakan pemerintah sekarang sudah mencukupi untuk dijadikan rujukan pilihan dan dianggap prestasi gemilang yang jarang dinikmati sebelumnya, demikian paling tidak yang diungkapkan salah seorang anggota DPRD pendukung Bupati. Sebagian masyarakat, masih terikat dengan paradigma lama, akibat rendahnya pendidikan (politik) yang dialami. Dan, kenyataan ini dianggap sebagai takdir yang harus diterima sebagai konsekuensi model kepemimpinan tradisional yang melingkar dalam

⁴⁴Wawancara dengan ketua tim survei yang juga dosen Universitas Bangkalan, 26 Juni 2012.

pemimpin karisma yang didasarkan oleh keturunan.⁴⁵ Sementara yang lain, memperlihatkan kecenderungan yang sebaliknya. Optimisme itu didasarkan pada besarnya kesadaran baru, khususnya di kalangan anak muda terdidik, di manapun posisi mereka. Meskipun masih harus menunggu satu periode lagi, demikian perkiraan mereka, paling tidak, kuatnya kesadaran kolektif kelas menengah terdidik ini, besar kemungkinan akan mampu menciptakan kondisi yang lebih menjanjikan.

Kepemimpinan Kharisma dan Harga Kulturalnya

Nampaknya Trunojoyo, lepas dari homogenitas politik yang otoriter dari rezim Orde Baru, masuk dalam homogenitas baru yang tidak jauh berbeda di bawah dominasi politik “kyai” yang juga tidak demokratis. Ciri utama dari model patronase ini adalah *ketakdhiman-nya* dengan para keturunan bani Kanjeng Sunan, meskipun secara keilmuan belum layak disebut kyai (tidak dapat membaca kitab kuning). Mereka tetap dicium tangannya dan disebut sebagai kyai (kultural) atau minimal disebut Gus. Bupati yang sekarang dan anaknya yang sedang dicalonkan untuk mengantikannya termasuk kyai jenis kultural ini konon lulusan politeknik di Singapura. Semuanya itu membuat homogenitas kultural telah mendapatkan legitimasinya yang paling kuat. Jika di masa lalu model kepatuhan itu muncul dalam politik dominasi, kini di kandang hegemoni adalah dominasi dalam persetujuan. Trunojoyo rupanya lebih istimewa dibandingkan dengan 3 Kabupaten lainnya. Maha kewibawaan yang diwariskan oleh Kanjeng Sunan, ternyata memiliki keawetan yang melampaui kelanggengan kultural yang dibutuhkan. Anak-cucu-cicit, sebagai pemegang saham geneologi kultural masih tetap menikmati profit kekuasaan yang melimpah. Tampilnya, cicit, Kanjeng Sunan yang menjadi Bupati saat ini, yang mewarisi modal kultural yang nyaris tanpa tapal batas itu, membuahkannya sejumlah *trade off*. Gaya kepemimpinannya yang tidak

⁴⁵Wawancara dengan tokoh LSM yang dekat dengan pemerintah, 25 Juni 2012.

demokratis serta kejeliannya dalam mengelola kekuasaan, yang merupakan konvergensi antara: kyai-blater dan pengusaha, secara positif telah melahirkan sejumlah “kelebihan”. Pembangunan fisik yang menonjol, di luar pembangunan mercusuar stadion megah, jalan-jalan di tingkat kecamatan yang sampai desa, listrik masuk desa dan pembangunan Trunojoyo Plasa yang kontroversial, adalah sejumlah “keberhasilan” pembangunan infrastruktur yang dirasakan sebagai hasil yang paling nyata.

Dalam bidang politik, stabilitas politik mencapai yang mencapai puncaknya dalam dekade terakhir yang belum pernah ditampilkan sebelumnya, telah melahirkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, yang di masa lalu dianggap terlalu bertele-tele jika masuk dalam ruang DPRD. Di mata para pendukungnya, kondisi seperti ini dianggap jauh lebih berharga bagi orang Trunojoyo, daripada kemakmuran sekalipun. Meskipun harga yang harus dibayar, sangatlah mahal. Budaya demokrasi cenderung berjalan di tempat; oposisional partai bersifat semu; deskresi terus berjalan tanpa akuntabilitas; masyarakat madani kehilangan ruang publik untuk menegosiasikan keinginannya, para kyai tenggelam dalam irama kekuasaan yang diciptakan Bupati. Semua takut berbicara, karena merasa saling diawasi. Sebagai konsekuensi logisnya *abuse of power* bermunculan dalam semua lini. Proses demokratisasi yang seharusnya memberi sosialisasi atas pentingnya prinsip keterbukaan, ditutup oleh model pengawasan Panopticon.

Kelas menengah yang diartikan sebagai kelompok independen – baik secara ekonomi maupun secara politik – dari ketergantungan negara dan ada di luar arus utama nyaris tidak muncul sebagai pengontrol kekuasaan. Semuanya tersedot oleh cengkeraman negara. Meskipun jumlah LSM terus bermunculan bagaikan jamur di musim hujan. Jumlahnya telah mencapai sekitar 38 buah, tetapi yang memerankan diri sebagai masyarakat madani hanya dapat dihitung dengan jari. Sebagian besar, menurut salah seorang tokoh LSM paling senior, telah bersifat hipokrit. Mereka yang berani berteriak menyuarkan kritik, menurutnya merupakan kelompok sakit hati

karena sudah tidak dipakai lagi oleh Bupati. Salah satu tujuannya untuk menaikkan harga tawarnya atau bercita-cita terpilih menjadi anggota dewan dengan menjanjikan suara lain.⁴⁶ Keberaniannya dalam menyuarakan kritiknya di ruang publik sifatnya sangat tentatif. Mereka lebih banyak memilih menjadi bagian negara (plat merah) daripada mengambil posisi sebaliknya. Mengambil tempat di luar kekuasaan umumnya dianggap terlalu beresiko. Baik dari segi keamanan maupun finansial, umumnya upaya kritis yang ingin dilakukan terbentur oleh tertutupnya sejumlah akses dalam menjangkau sumber kekuasaan.⁴⁷ Dalam kenyataan seperti ini, seorang akademisi yang sedang melakukan penelitian doktoralnya, merasa “kebingungan” untuk membuat kategorisasi seperti apa persisnya kelompok LSM itu harus didefinisikan. Kebingungan itu sebagian disebabkan oleh tidak konsistennya antara apa yang *dikatakan* dengan apa yang *dilakukan*. Meminjam istilahnya Goffman, antara *front stages* (panggung depan) dengan *back stages* (panggung belakang). Masing-masing LSM yang mengklaim diri sebagai plat hitam, tetapi secara diam-diam melakukan kerjasama dengan pemerintah, khususnya dalam memperoleh proyek. Sementara LSM yang didefinisikan plat merah oleh LSM lain, dengan tangkas juga melakukan kritik keras atas politik yang dijalankan Pendopo, untuk sekadar menangkis bahwa dirinya tidak seburuk yang disangka.

Apapun kategori dan posisi yang diperankan LSM (hitam atau merah), yang menarik tak satu pun dari kelompok terdidik ini yang

⁴⁶Wawancara dengan tokoh LSM paling tua di Bangkalan, yang sering dikategorikan “plat merah”, tanggal 27 Juni 2012.

⁴⁷Seorang aktivis gerakan anti korupsi, menceritakan tidak berhasilnya melakukan analisis kritis terhadap APBD, karena aksesnya untuk memperoleh data-data yang seharusnya terbuka untuk publik, tetap dianggap rahasia oleh para penyelenggara Negara. Karenanya, upaya-upaya yang ditempuh saat ini lebih bersifat melakukan pendampingan terhadap program-program yang rawan korupsi. Dalam pendampingan seperti ini saja, menurut pengakuannya sudah terlalu banyak ancaman dari para blater yang dekat dengan kekuasaan.

tidak menginginkan perubahan secara radikal dan segera. Mereka sangat menyadari tidaklah mudah jalan itu ditempuh dalam waktu singkat. Meskipun optimisme itu tetap muncul sebagai harapan. Di sini, di antara mereka tidak ada yang saling menyalahkan. Konsistensi dan pilihan di antara mereka pada akhirnya lebih disebabkan oleh daya tahannya dalam menghadapi godaan ekonomi dan daya tahan untuk menjadi kelompok di dalam atau di luar pagar kekuasaan. Meskipun fakta sosiologisnya, bahwa kelompok ini sebagian besar adalah para tokoh mahasiswa ketika mereka duduk di bangku kuliah. Entah mantan ketua Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama (IPNU), aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan sebagainya. Kerisauan umum dalam kelompok ini adalah dominannya politik dinasti yang bertumpu pada geneologi. Pengistimewaan yang berlebihan pada faktor keturunan itu sudah dianggap tidak sesuai dengan semangat zaman. Mestinya ukuran kyai dan bukan kyai, bukan terletak pada nasabnya tetapi lebih pada kealimannya dalam penguasaan ilmu agama dan keteladanannya dalam bertingkah-laku, demikian ungkap salah seorang kelompok kritis. Pelestarian model seperti ini, di samping dianggap akan memperpanjang “irrasionalitas” cara keberagamaan dan penetapan tokoh yang mestinya didasarkan pada *expertise*, juga akan membuat kesadaran politik masyarakat berjalan di tempat dan cenderung steril dari upaya pencerahan.⁴⁸

Kyai, Blater, dan Birokrat

Sementara itu, tentang kyai atau ulama sebagai pemimpin yang lebih dominan di bandingkan blater atau bahkan birokrasi, sejarawan Koentowiyoyo (alm.) memberi penafsiran yang menarik. Menurutnya atas sentralisasi kekuasaan yang lebih berpusat pada kyai daripada birokrat dari struktur tanah. Ulama mempunyai akar ke bawah yang kokoh di Pandulungan. Ekologi Pandulungan yang terdiri tegalan,

⁴⁸Wawancara dengan tokoh LSM plat “hitam” mantan tokoh PMII, tanggal 19 Juni 2010.

menurut Koento, dapat menjelaskan mengapa sejak dulu ulama mempunyai kedudukan yang kokoh. Di Jawa di mana desa induk (*nuclear village*) menjadi satu, dan di luar pedesaan itu terletak persawahan. Cengkeraman birokrasi atas desa sangat kuat. Adanya dua faktor itu, yaitu desa induk dan sawah, memudahkan birokrasi mengurus desa. Namun, tidak demikian halnya dengan di Pandulungan, di mana desa-desanya tersebar (*scattered village*). Rumah-rumah di Pandulungan akan berdiri sendiri, dan di kelilingi tegalan di sekitarnya. Beberapa rumah (enam atau tujuh) membentuk dusun (hamlet). Dusun-dusun itu bergabung membentuk desa. Dapat dimengerti jika Pandulungan memerlukan adanya institusi yang mendekatkan jarak geografis antar desa. Institusi itu adalah *mesigit* (masjid) desa. Sambil mengutip ketentuan fiqh Syafi'i yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya shalat Jum'at ialah hadirnya empat puluh orang laki-laki dewasa. Rekrutmen empat puluh orang laki-laki dewasa itu hanya mungkin diadakan melalui berkumpulnya orang dari dusun-dusun yang tanpa keharusan syari'ah itu tidak akan bersatu ke dalam satuan yang lebih besar yang bernama desa.

Semuanya itu, menurut sejarawan UGM ini, menjelaskan mengapa masjid dan bukan birokrasi, mengapa ulama dan bukan birokrat? Birokrasi dahulu dalam jaman kerajaan-kerajaan tradisional tidak memiliki cukup sarana untuk mengenggam masyarakat, paling-paling melalui aturan tentang *apanage* (percaton, gaji berupa desa, tanah dan tenaga kerja), kumpulan desa, izin bepergian, pajak, pengerahan tenaga dan izin menjual (1998: x). Tingginya mobilitas geografis orang Pandulungan juga menjelaskan mengapa ikatan dengan birokrasi hampir-hampir tidak ada. "Berbeda dengan di Jawa, desa-desa itu tidak memiliki pemerintahan lokal yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa pola pemukiman yang berserakan maupun pola desa yang terstruktur "secara longgar" ini telah menghalangi perluasan kontrol negara, dan oleh karena itu ikut melanggengkan praktik carok (Jonge, 2011).

Sementara itu, Toewen Boueswa (1983) seperti dikutip Jonge (2011:135) mengemukakan bahwa selama dasa warsa terakhir, carok

terutama meningkat dalam percaturan kriminal di Trunojoyo. Kabupaten paling barat di Pandalungan ini adalah kampung halaman sejumlah besar preman tukang blater yang beroperasi di Jayabaya. Makin jelas bahwa lingkaran-lingkaran preman ini, keberanian fisik khususnya sangat dihargai termasuk anak buahnya (Jonge, 2011:141). Jika seorang preman memerlukan investasi untuk keperluan bisnis atau upacara keluarga, seperti pernikahan, ia biasanya mengadakan semacam pesta pengumpulan dana, disebut *remo*, dan mengundang gerombolannya sendiri maupun rekan-rekan dan jago-jago lokal.

Apa yang ingin ditegaskan di sini, secara kultural, kekuasaan di masyarakat Trunojoyo-Pandalungan, terbagi dalam tiga segmen. Ulama, blater dan birokrasi. Ulama memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dua entitas lainnya, bukan karena semata-mata karena secara kultural agama memainkan peran yang sangat dominan dalam masyarakat Pandalungan, tetapi juga karena dukungan struktural yang berpusat pada ekologi Tegal. Dengan bergesernya posisi ulama yang di masa lalu ada di luar pagar kekuasaan dan sekarang menjadi bagian kekuasaan, ada sejumlah *trade off* yang membuat masyarakat madani yang bertumpu pada organisasi keagamaan, menjadi lumpuh. Para ulama pada umumnya menjadi kehilangan daya kritisnya dalam setiap menyikapi perubahan yang dinahkodai oleh kelompoknya sendiri. Seperti kelazimannya masyarakat homogen yang tidak memiliki kontrol, berbagai *abuse of power* telah banyak menampilkan diri di sini. Cara kerja kekuasaan telah mendahului cara kerja agama, yang secara natural selalu menyuarakan kepentingan kaum dhu'afa. Terbaikannya kaum miskin yang mencapai angka yang sangat memprihatinkan serta besarnya belanja APBD yang digunakan untuk membiayai penyelenggara negara (amil) merupakan disfungsi yang paling menyolok dari perpekstif moral agama. Bagi masyarakat Pandalungan yang sangat memahami bagian amil (baca penyelenggara negara) dalam posisinya sebagai distributor kekayaan negara kepada delapan asnaf (terutama bagi fakir miskin), besarnya anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai yang mencapai 74%, sedangkan kemiskinan telah membengkak sedemikian rupa, merupakan kelalaian

yang paling memilukan atas pesan agama. Demikian setidaknya komentar para anggota DPRD oposisi dalam menanggapi angka kemiskinan tersebut.

Pilkada: Perpanjangan Politik Dinasti

Meskipun Pilkada yang dilaksanakan 12 Desember 2012 itu mudah untuk diramalkan hasilnya, tetapi pembatalan peserta nomor urut satu menjelang pelaksanaan Pilkada (5 Desember 2012) melalui surat putusan PTUN No 136/G/2012/PTUN, tetaplah mengejutkan. Apalagi pembatalan itu mendekati hari H pemilihan. Alasan pembatalan itu didasarkan atas hasil keputusan PTUN bahwa pasangan nomor satu (Gus Muslim) dinilai tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Pasangan yang didukung PKNU dan Partai Persatuan Nasional (PPN) yang dulu namanya Partai Persatuan Trunojoyo. Perpecahan internal membuat DPD Partai Persatuan Daerah Trunojoyo melakukan gugatan ke PTUN Surabaya yang intinya tidak merasa mendukung pasangan Gus Muslim. Dengan hanya dukungan PKNU saja pasangan ini tidak mencukupi syarat minimal. Ketidakpuasan para pengikut pasangan Gus Muslim atas diskualifikasi pasangan ini, sempat membuat amok massa dengan menyegel kantor KPUD dan demonstrasi besar-besaran yang intinya minta penundaan pemilu yang dianggap penuh konspirasi dan manipulasi. Menanggapi keinginan penundaan para pengikut pasangan nomor satu ini, Bupati dengan tegas mengatakan, jika Pilkada ditunda “carok”.

Dengan ditolaknya peninjauan keputusan oleh Mahkamah Kontituasi, pupus sudah harapan terjadinya pemilu ulang seperti diinginkan para pendukung Gus Muslim. Dengan demikian pasangan ini gagal untuk berlaga mengikuti Pilkada. Dengan gugurnya pasangan nomor satu yang secara politik merupakan saingan terberat putra mahkota, maka dengan mudah mereka memenangkan angka mutlak (93,47%). Perolehan angka yang melebihi ayahnya ketika dipilih menjadi Bupati pada tahun 2007 (sekitar 80%).

Peristiwa Pilkada Trunojoyo telah digelar dengan pemenang anak Bupati, dengan angka yang sangat menyakinkan, akibatnya besar golput dari pendukung Gus Muslim. Peristiwa itu setidaknya menyisakan sejumlah tafsir. *Pertama*, kemenangan mutlak itu –apapun cara yang ditempuh– telah menunjukkan betapa politik dinasti masih memainkan peran penting dalam memilih pemimpin. Memilih Bupati masih dimaknai sebagai memilih pemimpin kharisma yang berlandaskan “keturunan” dan bukan memilih manajer pemerintahan yang memiliki profesionalitas, integritas, komitmen dan *expertise* yang terukur. *Kedua*, Pilkada juga mencerminkan betapa tidak mudahnya memisahkan antara agama sebagai sumber moralitas, politik sebagai sumber kekuasaan dan kekerasan sebagai instrumen yang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Dalam kenyataannya agama dengan segala simbolisasi “kesuciannya” telah dilucuti sebagai instrumen kekuasaan dan menjadi ajang pertengkaran antar kyai pendukung. Inilah barangkali seperti diingat Thomas Ode’a bahwa dilema institusionalisasi agama seringkali membawa distorsi atas tidak tertengoknya pesan awal di mana agama itu diturunkan. Agama telah menjadi bulan-bulanan kepentingan sesuatu yang sama sekali tidak agamis.

Mungkin ada benarnya apa yang disebut A’la intelektual putra Pandulungan (2004) yang mengatakan ”bahwa keberagamaan – yang sampai derajat tertentu – minimalis atau dan formalis mengantarkan sebagian masyarakat Pandulungan kepada upaya untuk menjadikan agama sebagai alat kepentingan yang sarat dengan nuansa politik pragmatis. Agama dijadikan media untuk merengkuh kekuasaan dan sejenisnya. Politisasi agama sangat berkepentingan dengan penggunaan simbol-simbol agama dan diletakkan dalam makna yang baru...”.

Selanjutnya ia mengatakan: “Dampak yang sangat dirasakan adalah munculnya fenomena di kalangan elit dan masyarakat Pandulungan – meskipun tidak secara keseluruhan – yang meletakkan politik hampir identik dengan “agama” itu sendiri. Sehingga ia dianggap sebagai pamungkas dalam menyelesaikan segala persoalan.

Politik yang telah menjadi “agama baru” itu membuat sebagian “ulama yang dipenuhi dengan *passions politique* bersifat sangat pragmatis”.

Ketiga, dari seluruh peristiwa politik itu telah menunjukkan bahwa – meminjam istilahnya Max Weber – model kepemimpinan di Trunojoyo ini merupakan corak otoritas tradisional: antara model pengawasan patriarkalisme: di mana pengawasan berada dalam tangan satuan kekerabatan (bani) yang dipegang oleh seorang individu tertentu yang memiliki otoritas warisan. Dengan model otoritas “Karismatik”, yang berkaitan dengan masalah teologi (*trach* kyai) (Johnson, 1981: 229) dan bukan otoritas legal-rasional yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan legal formal yang mengutamakan prinsip-prinsip: *expertise*, profesionalitas, integritas dan sebagainya. Pilkada masih memilih *trach* dan bukan memilih Bupati sebagai manajer kekuasaan yang membutuhkan persyaratan khusus yang terukur. *Keempat*, dalam kesadaran masyarakat seperti ini, rasionalitas politik yang diekspresikan dalam pilihan politik belum bekerja. Semuanya masih didasarkan pada emosi dan irrasionalitas. Belum terjadi kesadaran kolektif-kritis tentang arti pentingnya proses demokrasi ditempuh jalan menemukan sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsibel, dan di atas segalanya mencerminkan jaminan atas usaha yang sungguh-sungguh untuk mensejahterakan masyarakat.

Penutup

Trunojoyo adalah sebuah potret pergeseran masyarakat madani (*civil society*) yang pernah diperankan para kyai melalui Basra yang sangat kritis pada kekuasaan, kini menjadi masyarakat politik (*political society*), yang “terkooptasi” oleh negara. Harga yang harus dibayar dari pergeseran ini, kelompok masyarakat madani telah kehilangan fungsinya sebagai mediator antara negara dengan masyarakat. Kontrol kekuasaan yang seharusnya diperankan masyarakat madani menjadi mandul. Jalannya kekuasaan menjadi tidak terkontrol dan rasionalitas politik tidak bekerja. Sebaliknya, peran para kyai yang semula sebagai resi yang selalu mengingatkan setiap

terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), kini malah menjadi penjaga *status-quo*. Dalam ekologi kebudayaan seperti ini tidak mengherankan jika kekuasaan bergerak dalam naluriannya sendiri sebagai pemungut otoritas yang cenderung disalahgunakan (*power tends to corrupt*). Politik yang seharusnya menjadi arena ruang publik dalam mengejawantahkan kebebasan, kesetaraan, akuntabilitas, transparansi dan sebagainya, menjadi ruang yang membungkam kebebasan dan perbedaan. Ritual politik yang digelar dalam Pilkada menjadi sekadar pemenuhan ritual mencari legitimasi publik yang terdistorsi oleh sejumlah kepentingan. Politik menjadi kosong dari maknanya yang paling dalam, sebagai distribusi kewenangan yang menjadi hak rakyat secara adil dalam memperjuangkan kesejahteraan. Sebaliknya, ruang politik menjadi tempat berkerumunnya para pemungut kekuasaan sebagai jalan memupuk kekayaan.

Kasus Trunojoyo memberikan pelajaran yang paling empiris tentang tergilasnya wibawa agama ketika para juru bicaranya telah tergoda masuk dalam ruang politik. Hilangnya peran utama para ulama yang selalu mengingatkan, yang berubah menjadi menjaga *status-quo*, secara tidak disadari membuat paran agamawan pergeser dari tugas awalnya sebagai juru bicara “pencerahan” menjadi pedagang legitimasi. Institusi agama seperti pesantren, menjadi tempat yang tidak netral lagi untuk menyuarakan pesan Agama. Banyaknya ulama Pendopo yang begitu berkepentingan atas buah akhir dari kekuasaan, mengingatkan stigma keras Imam Ghazali tentang “*ulama dunia*” (*ulama syu'*).

Akhirnya, betapapun lambatnya proses perubahan yang terjadi di Pandalungan, kecenderungan ini jelas bukan masyarakat statik yang terlembaga dalam tema *stereotype*⁴⁹ yang semi-permanen. Ia selalu

⁴⁹Seringkali ada keadaan-keadaan yang menyebabkan pencirian terhadap orang lain menjadi semakin menyimpang dan menghakimi. Stereotype memenuhi kebutuhan tertentu dan menjalankan fungsi tertentu. Stereotype bukanlah pengamatan yang bebas nilai, melainkan ciptaan akal, suatu kreasi yang secara sadar atau tidak sadar dikonstruksi, bisa digunakan

hadir dalam proses menjadi (*becoming*) yang terus berubah dan tidak sedang menuju kebekuan tradisi. Sikapnya yang cenderung resistensi terhadap perubahan, agaknya lebih merupakan konsekuensi logis dari rasa kehati-hatian yang berlebihan atas nasib *status-quo* yang menemukan pasangannya dalam pemahaman keagamaan. Dalam masyarakat yang homogen dan sedikit terisolasi, terutama bagi para perantaunya, tanah kelahiran seringkali menghadirkan semangat romantisasi untuk memelihara “keaslian tradisi” yang selalu dirasakan sebagai kenyamanan daripada menjemput ketidakpastian yang ditawarkan setiap perubahan. Perubahan, seolah-olah menjadi ancaman atas kelangsungan sesuatu yang ingin diabadikan. Dalam masyarakat seperti ini terlalu banyak kepentingan yang “terganggu”, jika perubahan itu dilakukan secara terbuka dan segera.

Kehadiran jembatan layang yang sangat megah ternyata belum memperlihatkan tanda-tanda yang signifikan dalam membawa perubahan ekonomi secara mendasar. Industrialisasi yang diharapkan sebagai bagian satu paket dalam pembangunan jalan layang, nampaknya masih jauh dari realiasi. Salah satu hambatannya, di luar keenganan kaum Ulama (MUP) yang masih membutuhkan kepastian formasi perubahan yang ditawarkan, secara riil masih terjadi tarik ulur antara BPWS yang merupakan perpanjangan Jakarta yang memiliki kewenangan untuk membebaskan tanah, dengan Pemerintah Daerah yang belum menemukan kompromi. Pemerintah Daerah cq Bupati, menghendaki agar proses pembebasan itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam bahasa lokal, uang BPWS tinggal ditransfer ke Pemerintah Daerah dan BPWS tinggal menunggu hasilnya. Sebagai badan otonom yang memiliki otoritas dalam membangun industrialisasi di Pandulungan, permintaan itu terlalu sulit untuk dipenuhi. Sementara bagi Pemerintah Daerah di Pandulungan, hal itu dianggap tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang dipahami. Bagi mereka permintaan seperti ini seringkali dimaknai

bahkan berguna (untuk melihat realitas sosial, pen). Lihat. Huub de Jonge, Garam Kekerasan dan Aduan Sapi: LKiS, 2011: hal. 61.

sebagai apa yang disebut “membangun Pandulungan oleh orang Pandulungan”. Rupanya ketidaksepakatan inilah yang membuat pembebasan tanah mengalami kendala struktural yang paling akut sampai hari ini.

Sementara itu, salah satu perubahan yang paling mendasar dalam dimensi makro adalah terjadinya bergeseran pengelolaan kekuasaan dari para petinggi militer ke tangan para kyai. Dengan begini: pertanyaannya adalah apakah berubahnya lembaga keagamaan dari *civil society* menjadi *political society* ini, merupakan sebuah berkah; ataukah, sebuah peragaan empiris atas terlenanya para kyai dalam menikmati kekuasaan duniawi yang mengoda?

Daftar Pustaka

- Abdul A'la, 2004. *Membaca Keberagaman Masyarakat Madura*, Kata Pengantar buku Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar Masdura. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa.
- Jonge De Huub. 2011. *Garam Kekerasan dan Aduan Sapi: Esai-esai tentang orang Madura dan Kebudayaan Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- John, Paul Doyle. 1981. *Sociological Theory Classical Founders And Contemporary Perspective*, Published Simultaneously in Canada.
- Muthmainnah. 1998. *Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi*. Yogyakarta: LKPSM.
- _____. 2001. Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, Madura, dalam Jamil Gunawan, dkk (eds) *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. LP3ES.

- Koentowijoyo. 1993. *Madura Dijual: Mengatasi Keterbelakangan Ekonomi Sebuah Kota Sekunder dalam buku Radikalisasi Petani: Esai-Esai Sejarah*, Yogyakarta: Intervensi Utama.
- Rozki, Abdur. 2004. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar Madura*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa.
- Wiyanto, Latief. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.

BAB 7

KESIMPULAN: KETEGANGAN SOSIAL DI TENGAH PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh Riwanto Tirtosudarmo

Sukar untuk dibantah bahwa Jakarta, Semarang dan Surabaya sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Pantura terutama dimungkinkan karena adanya sarana infrastruktur ekonomi yang telah menghubungkan kota-kota di Pantura menjadi sebuah kesatuan ekonomi. Pada masa kolonial pelabuhan di kota-kota Pantura merupakan pintu masuk dan keluar barang-barang yang menjadi komoditas di pasaran dunia. Pembuatan jalan raya oleh Gubernur Jendral Daendels lebih dari dua abad yang lalu, meneguhkan kawasan Pantura, mulai dari Anyer sampai Banyuwangi, sebagai kawasan yang paling berkembang, baik secara demografis, sosial maupun politik. Perubahan atau transformasi sosial di kawasan ini di samping disebabkan oleh alasan ekonomi juga karena alasan sosial-politik mengingat di kota-kota ini administrasi pemerintahan, baik kolonial maupun setelah kemerdekaan, berpusat. Sebagai pusat-pusat pertumbuhan, berbagai ketegangan sosial secara alamiah muncul, sebagai akibat persinggungan berbagai faktor yang saling berinteraksi, dalam sebuah masyarakat yang mengalami perubahan sosial secara cepat.

Peran modal (*capital*) atau pasar sudah berlangsung sejak masa kolonial dan memperoleh momentumnya ketika pemerintahan Soeharto (Orde Baru) berkuasa. Kasus-kasus yang dikemukakan dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa ketegangan sosial yang terjadi hampir selalu berkaitan dengan perubahan dimensi *sosial-spasial* yang cenderung

menciptakan tekanan-tekanan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada posisi marjinal atau rentan secara sosial-politik, terutama ketika harus berhadapan dengan pemerintah sebagai representasi dari “Negara”, kekuatan kapital, dan pasar yang semakin dominan.

Kelompok kyai dan para pengikutnya di Bangkalan Madura, terpaksa harus merespon kehadiran Jembatan Suramadu yang pada awalnya mereka tolak. Keberhasilan pembangunan Jembatan Suramadu oleh pemerintah memperlihatkan kekuatan “Negara” sekaligus “pasar” yang memiliki daya tekan untuk merubah dimensi *sosial-spasial* yang selama ini relatif dikuasai oleh para Kyai Madura. Jika Jembatan Suramadu adalah kisah perubahan sosial yang terjadi di pinggiran Kota Surabaya, kasus Tunjungan Plaza, menghadirkan pengalaman warga kota yang bermukim di pusat perkotaan Surabaya. Kasus Tunjungan Plaza memperlihatkan betapa dimensi *sosial-spasial* warga kota semakin menciut dengan berdirinya pusat-pusat perdagangan yang harus menggusur penduduk karena kebutuhan akan lahan.

Semarang meskipun skala pertumbuhannya lebih kecil dari Surabaya dan Jakarta tidak kurang dengan berbagai perubahan sosial yang mencerminkan semakin padatnya penduduk kota dan semakin kompleksnya hubungan antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas kultural-keagamaan yang berbeda. Di Kecamatan Mranggen, yang secara administratif berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Demak, kehadiran sebuah pesantren (Futuhiyyah) bisa menggambarkan dinamika dan transformasi sosial yang terjadi dari posisinya sebagai sebuah institusi pendidikan di satu sisi dan lokasinya yang terjepit di antara pusat pertumbuhan modal (Kota Semarang) dan pusat administrasi pemerintahan (Kabupaten Demak). Ketangguhan (resiliensi) sebuah identitas kultural keagamaan yang bersandar pada hirarki kekuasaan seorang ulama berpengaruh terbukti mampu bertahan dari tekanan perubahan *sosio-spasial* dan transformasi sosial yang berlangsung dengan cepat. Di Kota Semarang sendiri, anggapan yang selama ini berkembang bahwa wilayah ini “aman” dan mampu

menjaga “toleransi keberagaman” terbukti tidak sepenuhnya benar. Di tengah-tengah tradisi keberagaman dan toleransi penduduknya yang tinggi, dari pengamatan yang dilakukan terlihat ancaman intoleransi yang tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Kesadaran untuk menjaga solidaritas dan keberagaman harus tetap dikumandangkan, jika intoleransi dan ketegangan hubungan antar kelompok beragama tidak ingin berkembang di Kota Semarang.

Jakarta barangkali adalah sebuah kota yang menyimpan persoalan kemasyarakatan yang paling besar dan kompleks di Indonesia. Perkembangan Jakarta secara *sosio-spasial* tidak tertahankan karena Jakarta merupakan pusat perekonomian Indonesia. Dugaan bahwa lebih dari 75% perputaran uang di Indonesia berada di Jakarta menjadi penanda bahwa Jakarta sesungguhnya telah menjadi “pulau” tersendiri di Indonesia (Dick, 2010). Sebagai ilustrasi kompleksitas persoalan kemasyarakatan di Jakarta, sengaja dipilih kasus sengketa pertanahan di Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara. Sengketa lahan semacam ini boleh dikatakan *typical* di lingkungan perkotaan, ketika penduduk bertambah dan menempati tanah-tanah Negara yang semula tidak terurus oleh Pemerintah. Ketika kepentingan Negara dan modal akan lahan untuk pembangunan muncul, sengketa antara warga kota dan Negara tidak mungkin dihindarkan. Kronologi yang menggambarkan proses berkembangnya persengketaan antara warga Tanah Merah dan Pemerintah Daerah serta Pertamina yang mewakili kepentingan Negara dan modal dengan sangat jelas memperlihatkan gagalnya pelayanan publik dan tidak berjalannya komunikasi politik antara pemerintah kota dan warga kotanya. Persengketaan yang terjadi di Tanah Merah tampaknya akan selesai dengan pendekatan Gubernur DKI Jakarta yang baru yang terbukti berhasil menjalin komunikasi politik yang tepat antara pemerintah dan warga-kotanya.

Jakarta, Semarang dan Surabaya sebagai pusat-pusat ekonomi Indonesia memang terbukti mampu tumbuh dan berkembang melampaui batas-batas wilayah administratifnya. Proses perkembangan kota secara *spasial* atau yang dikenal dengan sebutan aglomerasi,

metropolitanisasi, *urban cornubation*, *mega cities*, dan lain-lain istilah itu; sesungguhnya hanya menunjukkan besarnya kekuatan modal yang didukung oleh Negara dalam menguasai warga-kotanya. Jakarta dengan *Jabodetabek*-nya, Semarang dengan *Kedungsepur*-nya, serta Surabaya dengan *Gerbangkertosusilo*-nya bisa dipastikan akan semakin tumbuh tanpa atau adanya kendali dari Negara. Akhirnya, sebagai kesimpulan sementara, kasus-kasus yang telah dilaporkan dalam tulisan ini, barangkali dapat menggambarkan terjadinya sebuah proses perubahan sosial yang di dalamnya berlangsung ketidakadilan yang bersifat struktural. Ketidakadilan struktural ini terjadi terutama akibat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Sebagian besar warga kota berada tidak saja dalam posisi miskin secara ekonomi, namun juga dalam posisi “miskin kekuasaan”, sementara di pihak lain Negara dan pasar terlalu besar dalam mendominasi kekuasaan. Ketidakadilan struktural inilah tampaknya tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, jika Indonesia ingin mencapai cita-cita konstitusinya sebagai Negara yang berdaulat dan mampu mensejahterakan warga-negaranya.

Optimisme bahwa warga-negara harus mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat banyak di tengah tekanan-tekanan perubahan *sosio-spasial* di wilayah perkotaan yang berkembang karena adanya proses ketidakadilan yang bersifat struktural akibat kepentingan modal yang didukung oleh Negara haruslah tetap dikobarkan. Dari ke-lima kasus yang telah dipaparkan dalam tulisan ini kita dapat melihat bahwa warga-negara dan berbagai kelompok dalam masyarakat sesungguhnya memiliki strategi dan resiliensinya sendiri untuk tetap bertahan dari tekanan dan berusaha untuk mengembangkan diri. Pesantren, institusi keagamaan lain, forum warga, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, dan tidak kalah pentingnya pemimpin pemerintahan yang memiliki komitmen terhadap rakyatnya; adalah beberapa contoh yang memperlihatkan masih tingginya optimisme dalam masyarakat untuk mengembangkan kehidupannya dalam solidaritas yang berkeadilan, bermartabat, sejahtera, toleran dan diakui hak-haknya, tidak saja sebagai

warganegara namun juga sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki identitas kulturalnya sendiri-sendiri, karena semua itu sesungguhnya telah dijanjikan untuk dijamin eksistensi dan pengembangannya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.



